

Outlook **Industri Sawit** **Indonesia Q4 2026**

Menjaga Ruang Tumbuh di Tengah Keseimbangan Baru

Oktober 2026

Outlook Industri Sawit Indonesia **Q4 2026**

Menjaga Ruang Tumbuh di Tengah Keseimbangan Baru

Oktober 2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena **Outlook Industri Sawit Indonesia Q4 2026** dapat diselesaikan sebagai bagian dari upaya IPOSS untuk membaca perkembangan, tantangan, dan arah industri sawit nasional pada penghujung tahun 2026.

Outlook kali ini mengangkat tema **“Menjaga Ruang Tumbuh di Tengah Keseimbangan Baru”**. Tema tersebut merefleksikan perubahan yang semakin nyata dalam struktur industri sawit Indonesia. Kebutuhan domestik terus meningkat, terutama seiring penguatan mandatori biodiesel, sementara pertumbuhan produksi relatif terbatas. Pada saat yang sama, ekspor tetap memiliki posisi strategis sebagai sumber devisa, penopang neraca perdagangan, dan bagian penting dari ekosistem industri sawit.

Perubahan tersebut membuat perkembangan industri sawit tidak lagi cukup dibaca hanya dari produksi, ekspor, atau harga secara terpisah. Keseimbangan antara kebutuhan domestik, ekspor, dan persediaan semakin berkaitan dengan kemampuan meningkatkan produktivitas, menjaga daya saing, mengelola risiko iklim, mempertahankan akses pasar, serta membangun kepastian dan kualitas tata kelola industri.

Atas dasar itu, *Outlook* Industri Sawit Indonesia Q4 2026 disusun dengan pendekatan yang terintegrasi. Analisis mencakup perkembangan *supply-demand* dan stok minyak sawit nasional, risiko iklim terhadap produksi, perkembangan harga CPO dan instrumen perdagangan, kontribusi sawit terhadap perekonomian dan ketahanan energi, peran Peremajaan Sawit Rakyat dalam memperkuat kapasitas produksi, serta sejumlah perkembangan kebijakan yang berpotensi memengaruhi arah industri memasuki 2027.

Penyusunan *Outlook* memanfaatkan data historis, proyeksi, pemodelan, serta telaah terhadap perkembangan pasar, kebijakan, dan regulasi. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya memberikan

gambaran mengenai kondisi industri pada akhir 2026, tetapi juga membantu memahami keterkaitan antarperubahan tersebut dan implikasinya terhadap kemampuan industri mempertahankan pertumbuhan ke depan.

Dalam perspektif tersebut, “**ruang tumbuh**” tidak dimaknai sebagai perluasan areal perkebunan, melainkan sebagai kemampuan industri untuk terus meningkatkan kapasitas dan nilai yang dihasilkan. Ruang tumbuh tersebut terutama dibangun melalui peningkatan produktivitas, penguatan perkebunan rakyat, penciptaan nilai tambah domestik, pemeliharaan ruang ekspor, peningkatan efisiensi, serta penguatan tata kelola yang mampu menjaga akses pasar dan kepastian usaha. Perspektif inilah yang menjadi benang merah dalam keseluruhan pembahasan *Outlook Q4 2026*.

Kami menyadari bahwa proyeksi dan analisis dalam *Outlook* ini tetap berada dalam lingkungan yang dinamis. Perubahan kondisi pasar, harga energi, iklim, perdagangan global, maupun kebijakan dapat mengubah sebagian asumsi yang digunakan. Oleh karena itu, *Outlook* ini diharapkan menjadi kerangka untuk membaca arah perubahan, risiko, dan pilihan strategis, bukan semata-mata kumpulan proyeksi.

Kami berharap ***Outlook Industri Sawit Indonesia Q4 2026*** dapat menjadi salah satu bahan rujukan bagi pemerintah, pelaku usaha, pekebun, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya dalam memahami perkembangan industri sawit dan mempersiapkan langkah memasuki tahun 2027.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan data, informasi, masukan, dan dukungan dalam penyusunan *Outlook* ini. Semoga publikasi ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan industri sawit Indonesia yang semakin produktif, berdaya saing, dan mampu menjaga ruang tumbuhnya di tengah keseimbangan yang terus berubah.

Pengurus IPOSS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	v
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Penyusunan <i>Outlook</i> Q4 2026	3
1.3 Struktur dan Integrasi Analisis	5
1.4 Kerangka Besar <i>Outlook</i> Q4 2026.....	7
BAB 2. <i>OUTLOOK SUPPLY-DEMAND</i> Q4 2026	9
2.1 <i>Outlook</i> Produksi Q4 2026.....	9
2.1.1 Produksi Kumulatif Nasional s.d Q4 2026.....	9
2.1.2 Dinamika Produksi Q4 secara Year-on-Year.....	12
2.2 <i>Outlook</i> Konsumsi Q4 2026	15
2.3 <i>Outlook</i> Ekspor Q4 2026.....	18
2.4 <i>Outlook</i> Neraca dan Stok Akhir Q4 2026	20
2.4.1 Neraca Minyak Sawit Nasional 2026.....	20
2.4.2 Stok Akhir Q4 2026.....	23
BAB 3. <i>OUTLOOK IKLIM DAN DAMPAKNYA TERHADAP</i> PRODUKSI	27
3.1 <i>Climate Hazard</i> Q4 2026.....	27
3.2 <i>Spatial Exposure</i> dan Prioritas Mitigasi.....	32
3.3 Implikasi Iklim terhadap Produksi dan Arah Mitigasi	37
BAB 4. <i>OUTLOOK HARGA CPO</i> Q4 2026	44
4.1 Harga CPO Global	44
4.2 Harga CPO Domestik	48
BAB 5. <i>OUTLOOK PUNGUTAN EKSPOR DAN BEA KELUAR</i> SAWIT Q4 2026	51
5.1 <i>Outlook</i> Harga Referensi CPO Q4 2026.....	51
5.2 <i>Outlook</i> Pungutan Ekspor Q4 2026	54
5.3 <i>Outlook</i> Bea Keluar Q4 2026	56
5.4 Integrasi Proyeksi PE dan BK Q4 2026	57

5.5 Proyeksi PE dan BK dan Insentif Hilirisasi.....	59
5.6 PE dan BK dalam Menjaga Keseimbangan Ekonomi Industri Sawit ..	62
BAB 6. KONTRIBUSI SAWIT DALAM PEREKONOMIAN.....	66
6.1 Kontribusi Sawit terhadap Neraca Perdagangan.....	66
6.2 Program B50 dan Tantangan Menjaga Ruang Ekspor Sawit	70
6.3 Mandatori B50 dan Penciptaan Nilai Ekonomi Domestik	75
6.4 Outlook Program Biodiesel B50 Q4 2026.....	78
6.5 Tantangan Implementasi B50 dan Transformasi Peran Sawit dalam Ketahanan Energi	84
BAB 7. OUTLOOK KONTRIBUSI SAWIT RAKYAT (PSR) DALAM MENDUKUNG KETAHANAN ENERGI NASIONAL	87
7.1 Perkembangan PSR 2017–2026: Percepatan yang Masih Tertahan ..	87
7.2 Kontribusi PSR terhadap Produksi CPO Nasional	89
7.3 PSR sebagai Sumber Pertumbuhan Produksi ke Depan	91
7.4 Outlook Kebijakan Percepatan PSR 2027	92
7.4.1 Penguatan Kelembagaan Pekebun	93
7.4.2 Pendampingan Multipihak dan Dukungan Pembiayaan.....	93
7.4.3 Sistem Informasi dan Verifikasi Berbasis SLA (<i>Service Level Agreement</i>)	94
BAB 8. PERSPEKTIF INDUSTRI DAN KEBIJAKAN	95
8.1 Menyambut Implementasi EUDR: Kesiapan Indonesia dari Data Kebun ke Bukti Perdagangan.....	95
8.1.1 Dari Pengapalan ke Kebun Sumber	95
8.1.2 Tiga Tingkat Kesiapan EUDR.....	98
8.1.3 <i>Governance</i> dan <i>Export Readiness</i>	99
8.1.4 Outlook Q4 2026–Q1 2027: Uji Pengapalan Produk	100
8.2 Bursa Mineral dan Komoditas Strategis: Kesiapan Pasar Menentukan Kredibilitas Harga.....	101
8.2.1 BMKS Memasuki 2027 dengan Regulasi yang Sudah Tersedia..	101
8.2.2 Pelajaran dari Bursa Fisik CPO Indonesia	102
8.2.3 Pasar Spot, Likuiditas, dan Desain Insentif Awal.....	103
8.2.4 Outlook Q4 2026: DSI, BMKS, dan Uji Kesiapan Menuju 2027 ..	104
8.3 HGU di Tengah Reforma Agraria: Risiko HGU dan Keberlanjutan Industri Sawit.....	105
BAB 9. PENUTUP	107
DAFTAR PUSTAKA	111

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Proyeksi Total Pungutan Ekspor dan Bea Keluar CPO pada Q4 2026 (USD/ton).....	58
Tabel 2.	Proyeksi Pungutan Ekspor dan Bea Keluar Produk Kelapa Sawit dan Turunannya Q4 2026 (USD/ton).....	60
Tabel 3.	Kontribusi Sawit Terhadap Neraca Perdagangan Indonesia, 2015–Semester I 2026	67
Tabel 4.	Proyeksi HIP Biodiesel, HIP Solar, dan Insentif Q4 2026	81
Tabel 5.	Simulasi Beban Pembiayaan Biodiesel B50 Q4 2026	82
Tabel 6.	Sensitivitas Insentif Q4 2026 terhadap Jalur Harga Brent.....	83
Tabel 7.	Estimasi Produksi CPO Tahun 2026 berdasarkan Areal PSR Tertanam sejak 2017 - 2023.....	90
Tabel 8.	Ilustrasi Kebutuhan Pemenuhan Traceability per Shipment Ekspor Produk RPO	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Produksi Kumulatif Nasional s.d. Q4 2026	9
Gambar 2.	Perkembangan Produksi Minyak Sawit Nasional per Kuartal, Q1 2024–Q4 2026	12
Gambar 3.	Perbandingan Produksi Nasional Q4 Antar Tahun	13
Gambar 4.	Proyeksi Konsumsi Minyak Sawit Nasional Tahunan sampai dengan 2026	15
Gambar 5.	Proyeksi Konsumsi Minyak Sawit Nasional Per Triwulan s.d 2026.....	17
Gambar 6.	Ekspor Produk Sawit Nasional Tahunan sampai dengan 2026.....	18
Gambar 7.	Ekspor Produk Sawit Nasional Kuartalan sampai dengan Q4 2026.....	19

Gambar 8. Perbandingan Produksi, Alokasi Domestik, dan Ekspor Minyak Sawit	21
Gambar 9. Pangsa Konsumsi Domestik dan Ekspor terhadap Total Alokasi Minyak Sawit.....	22
Gambar 10. Stok Akhir Minyak Sawit Tahun 2026	24
Gambar 11. Monitoring dan Prediksi ENSO, September 2026.....	28
Gambar 12. Monitoring dan Prediksi IOD, September 2026	29
Gambar 13. Prediksi Curah Hujan Bulan Oktober – Desember 2026	30
Gambar 14. Matriks Keterpaparan Produksi Sawit terhadap Tingkat Kekeringan Q4 2026.....	34
Gambar 15. Hubungan Water Stress Index (WSI) dan Vapor Pressure Deficit (VPD) dengan Produksi TBS pada Berbagai Periode sebelum Panen	38
Gambar 16. Harga CPO Global (BMD) Aktual dan <i>Forecast</i> (Q4 2026)	47
Gambar 17. Harga CPO Domestik Aktual dan <i>Forecast</i>	50
Gambar 18. Forecasting Harga Tiga Bursa dan Harga Referensi Q4 2026	53
Gambar 19. Pungutan Ekspor CPO Q1 - Q4 Tahun 2026	54
Gambar 20. Bea Keluar CPO Q1 - Q4 Tahun 2026	56
Gambar 21. Pergeseran Ranking Komoditas Ekspor Utama Indonesia, 2017–2025.....	69
Gambar 22. Simulasi Total Kebutuhan Pembiayaan BPDP pada Berbagai Selisih HIP Biodiesel-HIP Solar	72
Gambar 23. Simulasi Produksi CPO minimum pada Berbagai Selisih HIP Biodiesel-HIP Solar.....	73
Gambar 24. Persebaran Pabrik dan Perkembangan Kapasitas Terpasang Biodiesel Indonesia, 2020–2026.....	77
Gambar 25. Proyeksi HIP Biodiesel, HIP Solar, dan Selisih Insentif Q4 2026.....	80
Gambar 26. Akumulasi Kinerja PSR 2017–2026	88
Gambar 27. Perbandingan Target dan Realisasi PSR Tahun 2026	89



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri sawit Indonesia memasuki penghujung tahun 2026 dalam konfigurasi yang berbeda dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Perubahan tersebut tidak semata-mata tercermin dari pergerakan produksi, harga, atau ekspor, tetapi dari semakin banyaknya fungsi yang harus dipenuhi oleh industri sawit secara bersamaan. Sawit tetap menjadi salah satu sumber penting penerimaan ekspor dan surplus perdagangan, namun pada saat yang sama perannya di dalam negeri semakin besar sebagai bahan baku pangan, oleokimia, serta energi melalui penguatan mandatori biodiesel.

Perubahan paling nyata terlihat pada struktur penggunaan minyak sawit nasional. Pada 2026, produksi minyak sawit diproyeksikan mencapai sekitar **52,4 juta ton**, sementara konsumsi domestik meningkat menjadi sekitar **27,1 juta ton**. Untuk pertama kalinya dalam periode pengamatan *Outlook*, penggunaan domestik diproyeksikan mencapai sekitar **51,3%** dari total penggunaan minyak sawit nasional, melampaui porsi ekspor sebesar **48,7%**. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa pasar domestik telah berkembang menjadi salah satu penentu utama keseimbangan industri sawit Indonesia.

Penguatan pasar domestik memberikan manfaat strategis. Implementasi mandatori biodiesel B50 memperbesar peran sawit dalam mendukung ketahanan energi dan substitusi impor bahan bakar fosil. Namun, perubahan tersebut sekaligus membawa konsekuensi terhadap keseimbangan pasokan. Pertumbuhan konsumsi domestik berlangsung lebih cepat dibandingkan pertumbuhan produksi, sementara ekspor tetap diperlukan untuk menghasilkan devisa, mempertahankan posisi Indonesia di pasar global, serta menjadi salah satu basis penerimaan yang mendukung berbagai program pengembangan industri sawit.

Dalam kondisi tersebut, ekspor dan stok semakin berperan sebagai ruang penyesuaian ketika pertumbuhan pasokan tidak secepat pertumbuhan kebutuhan domestik. Artinya, tantangan industri tidak lagi hanya terletak pada bagaimana mengalokasikan produksi antara pasar domestik dan ekspor, tetapi semakin bergeser pada bagaimana memperbesar kapasitas pasokan agar peningkatan kebutuhan domestik dapat dipenuhi tanpa terus-menerus mempersempit ruang ekspor dan persediaan.

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena kemampuan meningkatkan pasokan tidak sepenuhnya berada dalam kendali pasar. Produksi sawit dipengaruhi oleh siklus biologis tanaman dan kondisi agroklimat, sehingga perubahan iklim dan *water stress* dapat memengaruhi produksi baik dalam jangka pendek maupun melalui respons tertunda pada periode berikutnya. Pada saat yang sama, ekspansi areal semakin terbatas sehingga tambahan produksi ke depan semakin perlu bertumpu pada peningkatan produktivitas, peremajaan tanaman, perbaikan praktik budidaya, serta peningkatan produktivitas perkebunan rakyat.

Perubahan keseimbangan pasokan dan permintaan juga berinteraksi dengan pembentukan harga dan kebijakan perdagangan. Harga CPO global dan domestik dipengaruhi oleh berbagai fundamental pasar, sementara Harga Referensi, Pungutan Ekspor, dan Bea Keluar selanjutnya memengaruhi insentif perdagangan dan nilai ekonomi yang diterima sepanjang rantai industri. Pada saat yang sama, sebagian penerimaan dari ekspor kembali memiliki keterkaitan dengan pembiayaan berbagai program sawit, termasuk dukungan terhadap program biodiesel. Dengan demikian, perubahan pada satu bagian dari sistem dapat menghasilkan konsekuensi terhadap bagian lainnya.

Memasuki 2027, tantangan industri juga semakin dipengaruhi oleh perubahan lingkungan kebijakan dan tata kelola. Implementasi EUDR meningkatkan tuntutan terhadap ketertelusuran rantai pasok dan kemampuan membuktikan asal komoditas hingga kebun sumber. Pengembangan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) dan

sistem perdagangan komoditas nasional membawa agenda penguatan transparansi dan kredibilitas pembentukan harga. Sementara itu, dinamika kebijakan pertanahan dan reforma agraria menempatkan kepastian HGU sebagai bagian penting dalam menjaga keberlanjutan investasi dan basis produksi.

Ketiga perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan industri untuk tumbuh ke depan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menghasilkan lebih banyak CPO. Akses pasar, kualitas dan interoperabilitas data, kredibilitas mekanisme perdagangan, kepastian usaha, serta keberlanjutan basis produksi menjadi bagian dari ruang tumbuh industri itu sendiri.

Dalam konteks inilah *Outlook Industri Sawit Indonesia Q4 2026* mengangkat tema **“Menjaga Ruang Tumbuh di Tengah Keseimbangan Baru.”** Keseimbangan baru menggambarkan perubahan struktur ketika pasar domestik menyerap bagian yang semakin besar dari produksi, sementara ekspor, stok, ketahanan energi, dan daya saing global tetap harus dipertahankan. Adapun ruang tumbuh menggambarkan kebutuhan untuk menciptakan kapasitas tambahan—baik melalui produktivitas, efisiensi, penguatan sawit rakyat, maupun tata kelola dan kebijakan—agar pertumbuhan satu fungsi industri tidak mengurangi kemampuan fungsi lainnya.

Dengan demikian, persoalan utama yang dibawa dalam *Outlook* ini bukan sekadar berapa besar produksi, konsumsi, ekspor, atau harga CPO pada akhir 2026. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah *bagaimana industri sawit Indonesia dapat mempertahankan ruang tumbuh ketika semakin banyak kepentingan bergantung pada pasokan minyak sawit yang sama.*

1.2 Tujuan Penyusunan Outlook Q4 2026

Outlook Industri Sawit Indonesia Q4 2026 disusun untuk memberikan gambaran yang terintegrasi mengenai perkembangan industri sawit pada penghujung 2026 sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang akan memengaruhi arah industri memasuki 2027. Analisis tidak hanya diarahkan pada proyeksi indikator pasar, tetapi juga pada keterkaitan

antara produksi, konsumsi domestik, ekspor, stok, iklim, harga, instrumen perdagangan, ketahanan energi, kapasitas pasokan, serta perubahan lingkungan kebijakan.

Secara khusus, *Outlook Q4 2026* bertujuan untuk:

1. Mengevaluasi perkembangan dan proyeksi keseimbangan *supply-demand* minyak sawit nasional hingga akhir 2026, mencakup produksi, konsumsi domestik, ekspor, dan stok;
2. Mengidentifikasi risiko iklim terhadap kegiatan produksi pada Q4 2026 serta implikasi biologisnya terhadap pembentukan produksi pada periode berikutnya;
3. Memproyeksikan perkembangan harga CPO global dan domestik serta implikasinya terhadap Harga Referensi, Pungutan Ekspor, dan Bea Keluar;
4. Mengevaluasi perubahan peran ekonomi sawit melalui kontribusinya terhadap perdagangan, penguatan ketahanan energi melalui B50, serta interaksi antara kebutuhan domestik, ruang ekspor, dan pembiayaan program;
5. Menilai kontribusi dan potensi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sebagai salah satu sumber peningkatan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas tanpa bergantung pada ekspansi areal; serta
6. Mengidentifikasi perkembangan strategis terkait akses pasar, infrastruktur perdagangan, dan kepastian basis produksi yang dapat memengaruhi daya saing dan keberlanjutan industri sawit memasuki 2027.

Dengan tujuan tersebut, *Outlook* ini diharapkan tidak hanya memberikan gambaran mengenai apa yang terjadi pada industri sawit sepanjang 2026, tetapi juga menjelaskan keterkaitan antarperubahan tersebut serta implikasinya terhadap kemampuan industri menjaga keseimbangan antara kebutuhan domestik, ekspor, dan pertumbuhan ke depan.

1.3 Struktur dan Integrasi Analisis

Outlook Q4 2026 disusun sebagai rangkaian analisis yang saling terhubung. Pembahasan dimulai dari fundamental fisik industri, kemudian bergerak menuju risiko terhadap kemampuan produksi, pembentukan harga dan instrumen perdagangan, perubahan fungsi ekonomi sawit, kebutuhan peningkatan kapasitas pasokan, hingga lingkungan kebijakan dan tata kelola yang menentukan kemampuan industri mempertahankan ruang tumbuhnya.

Bab 2 membahas *supply-demand* minyak sawit nasional hingga Q4 2026, mencakup produksi, konsumsi domestik, ekspor, neraca penggunaan, dan stok. Bab ini menjadi titik awal untuk membaca perubahan struktur penggunaan minyak sawit ketika kebutuhan domestik meningkat lebih cepat dibandingkan produksi dan ekspor menjadi salah satu ruang penyesuaian.

Bab 3 membahas *Outlook* iklim dan dampaknya terhadap produksi melalui analisis *climate hazard*, *spatial exposure*, serta implikasinya terhadap produksi dan kebutuhan mitigasi. Analisis ini menempatkan iklim sebagai salah satu faktor yang memengaruhi kemampuan industri mempertahankan pasokan, baik melalui gangguan operasional dalam jangka pendek maupun respons biologis tanaman yang dapat muncul dengan jeda waktu.

Bab 4 membahas *Outlook* harga CPO global dan domestik. Analisis harga ditempatkan setelah pembahasan fundamental pasokan dan risiko iklim agar proyeksi harga dapat dibaca dalam konteks perubahan ketersediaan pasokan, konsumsi domestik, ekspor, stok, serta perkembangan pasar minyak nabati global.

Bab 5 membahas *Outlook* Harga Referensi, Pungutan Ekspor, dan Bea Keluar. Analisis tidak berhenti pada besarnya tarif, tetapi melihat bagaimana instrumen tersebut memengaruhi *export netback*, insentif hilirisasi, serta keseimbangan ekonomi antara kepentingan ekspor, pasar domestik, dan pembiayaan pengembangan industri sawit.

Bab 6 memperluas pembahasan dari keseimbangan pasar menuju kontribusi ekonomi sawit. Analisis mencakup kontribusi sawit terhadap neraca perdagangan, perubahan ruang ekspor akibat B50, penciptaan nilai ekonomi domestik, *Outlook* program biodiesel Q4 2026, serta tantangan implementasinya. Bab ini menunjukkan bahwa peran ekonomi sawit semakin berkembang dari komoditas penghasil devisa menjadi komoditas yang sekaligus memiliki fungsi strategis dalam ketahanan energi nasional.

Bab 7 menempatkan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dalam konteks kebutuhan peningkatan kapasitas pasokan. Analisis membahas perkembangan PSR, kontribusi tanaman hasil peremajaan terhadap produksi saat ini, potensi tambahan produksi seiring bertambahnya umur tanaman, serta kebutuhan percepatan PSR sebagai salah satu jalur peningkatan produktivitas perkebunan rakyat. Dalam kondisi ruang ekspansi yang semakin terbatas, peningkatan produktivitas pada areal yang telah tersedia menjadi semakin penting untuk memenuhi kebutuhan domestik sekaligus mempertahankan ruang ekspor.

Bab 8 membahas perspektif industri dan kebijakan yang dapat memengaruhi kemampuan industri menjaga ruang tumbuh memasuki 2027. Pembahasan difokuskan pada tiga isu strategis: kesiapan menghadapi EUDR sebagai bagian dari upaya mempertahankan akses pasar dan ketertelusuran rantai pasok; pengembangan BMKS dan sistem perdagangan sebagai bagian dari penguatan transparansi dan pembentukan harga; serta dinamika HGU dan reforma agraria yang berkaitan dengan kepastian usaha dan keberlanjutan basis produksi.

Rangkaian tersebut membentuk satu alur analisis yang saling berkaitan: *keseimbangan pasokan dan permintaan menunjukkan tingkat keketatan industri; iklim memengaruhi kemampuan mempertahankan pasokan; fundamental pasar berinteraksi dengan pembentukan harga; harga selanjutnya memengaruhi instrumen dan insentif perdagangan; peningkatan penggunaan domestik mengubah fungsi ekonomi sawit dan ruang ekspor; keterbatasan pasokan*

meningkatkan pentingnya produktivitas dan PSR; sedangkan akses pasar, infrastruktur perdagangan, dan kepastian basis produksi menentukan kemampuan industri mempertahankan ruang tumbuhnya.

1.4 Kerangka Besar Outlook Q4 2026

Outlook Q4 2026 memilih judul “**Menjaga Ruang Tumbuh di Tengah Keseimbangan Baru**” untuk membentuk kerangka besar dalam membaca perkembangan industri sawit Indonesia pada triwulan terakhir di tahun 2026.

Keseimbangan baru tersebut terbentuk ketika penggunaan domestik mengambil porsi yang semakin besar dalam struktur penggunaan minyak sawit nasional, sementara pertumbuhan produksi relatif terbatas dan industri tetap perlu mempertahankan ekspor, stok, serta daya saing global.

Dalam kerangka ini terdapat tiga dimensi yang saling berkaitan. **Pertama, keseimbangan pasokan**, yaitu kemampuan produksi untuk memenuhi kebutuhan pangan, energi, oleokimia, ekspor, dan pembentukan stok secara bersamaan. Ketika pertumbuhan produksi lebih lambat dibandingkan pertumbuhan kebutuhan domestik, ekspor dan stok menjadi semakin sensitif terhadap perubahan pasokan.

Kedua, keseimbangan nilai ekonomi, yaitu bagaimana sawit tetap menghasilkan devisa dan menopang neraca perdagangan sekaligus menciptakan nilai ekonomi di dalam negeri melalui hilirisasi, substitusi impor energi, dan aktivitas ekonomi domestik. Dalam dimensi ini, ekspor dan pasar domestik tidak ditempatkan sebagai dua kepentingan yang saling meniadakan, tetapi sebagai fungsi ekonomi yang perlu dijaga keseimbangannya.

Ketiga, keberlanjutan ruang tumbuh, yaitu kemampuan industri menciptakan tambahan kapasitas dan mempertahankan daya saing ketika ekspansi areal semakin terbatas dan lingkungan usaha semakin kompleks. Tambahan produksi semakin perlu diperoleh

melalui produktivitas, peremajaan, efisiensi, dan penguatan perkebunan rakyat. Pada saat yang sama, pertumbuhan tersebut perlu didukung oleh akses pasar, ketertelusuran rantai pasok, mekanisme perdagangan yang kredibel, serta kepastian atas basis produksi.

Karena itu, **ruang tumbuh dalam Outlook ini tidak dimaknai sebagai perluasan areal semata**. Ruang tumbuh mencakup kemampuan meningkatkan produktivitas dan kapasitas pasokan, mempertahankan ruang ekspor, menciptakan nilai tambah domestik, membangun persediaan yang memadai, memperkuat sawit rakyat, serta membangun tata kelola yang menjaga akses pasar dan kepastian usaha.

Perspektif tersebut juga mengubah cara melihat pertumbuhan industri sawit. Pertumbuhan tidak cukup diukur dari peningkatan produksi atau konsumsi secara terpisah, tetapi dari kemampuan industri meningkatkan kapasitasnya **tanpa mengorbankan fungsi ekonomi lainnya**. Peningkatan penggunaan CPO untuk energi, misalnya, akan memberikan nilai strategis yang lebih kuat apabila dapat berjalan bersamaan dengan terjaganya kebutuhan pangan, ruang ekspor, stok, penerimaan negara, dan daya saing global.

Dengan demikian, tantangan utama industri sawit Indonesia memasuki 2027 bukan sekadar menentukan bagaimana pasokan yang tersedia dialokasikan, tetapi **bagaimana memperbesar ruang tumbuh ketika semakin banyak kepentingan bergantung pada pasokan yang sama**. Kemampuan menjawab tantangan tersebut akan sangat menentukan apakah keseimbangan baru yang terbentuk pada 2026 dapat menjadi fondasi pertumbuhan yang lebih kuat, atau justru berkembang menjadi keterbatasan baru bagi industri sawit Indonesia.



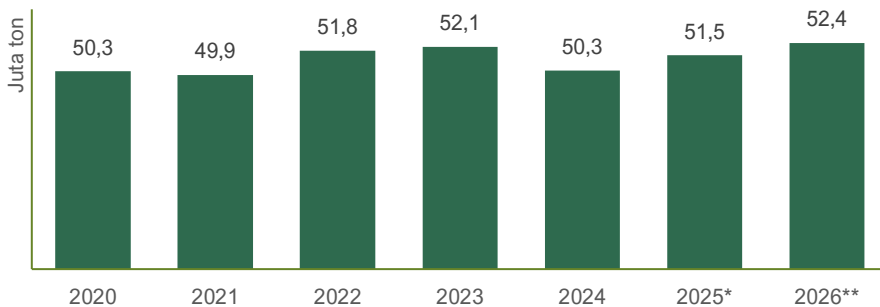
BAB 2. OUTLOOK SUPPLY-DEMAND Q4 2026

Dinamika *supply-demand* minyak sawit pada Q4 2026 mencerminkan interaksi antara kemampuan produksi, kebutuhan domestik, ekspor, dan perubahan stok yang diperkirakan terjadi selama tiga bulan terakhir tahun 2026. Pembahasan diawali dengan perkembangan produksi sebagai sumber pasokan utama, kemudian dilanjutkan dengan konsumsi domestik, ekspor, serta implikasinya terhadap neraca dan stok minyak sawit nasional. Dinamika tersebut menjadi penting karena berkaitan erat dengan pembentukan harga minyak sawit di pasar domestik maupun global, terlebih ketika kebijakan Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia semakin memengaruhi keseimbangan pasokan dan permintaan di pasar.

2.1 Outlook Produksi Q4 2026

2.1.1 Produksi Kumulatif Nasional s.d Q4 2026

Produksi minyak sawit Indonesia pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 52,4 juta ton, terdiri atas 47,3 juta ton crude palm oil (CPO) dan 5,1 juta ton palm kernel oil (PKO). Dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 51,5 juta ton, produksi meningkat sekitar 0,9 juta ton atau 1,86%.



Gambar 1. Produksi Kumulatif Nasional s.d. Q4 2026

Sumber: BPS (2025b), Ditjenbun (2025), diolah kembali oleh IPOSS

*) Data estimasi **) Data proyeksi

Secara historis, produksi tahun 2026 merupakan capaian tertinggi dalam periode 2020–2026. Namun demikian, peningkatan tersebut masih relatif terbatas. Produksi tahun 2026 hanya sekitar 0,3 juta ton lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 52,1 juta ton. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan produksi pada tahun 2026 belum sebesar yang sebelumnya diharapkan.

Pada awalnya, kondisi pertanaman memberikan ruang bagi peningkatan produksi yang lebih tinggi pada tahun 2026. Kondisi curah hujan dan ketersediaan air pada periode 2024–2025 relatif mendukung pembentukan potensi produksi tanaman yang akan terealisasi pada tahun 2026. Dengan mempertimbangkan adanya time lag antara kondisi pertumbuhan tanaman, pembentukan bunga dan buah, hingga realisasi panen, produksi tahun 2026 dalam kondisi normal seharusnya memiliki peluang untuk meningkat lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun, potensi tersebut tidak sepenuhnya terealisasi. Sepanjang tahun 2026 terdapat sejumlah gangguan yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi kemampuan produksi nasional. Bencana banjir di beberapa wilayah Sumatera pada awal tahun menyebabkan sebagian areal perkebunan terdampak serta mengganggu kegiatan panen dan operasional kebun. Pada periode berikutnya, kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah turut memberikan tekanan terhadap sebagian areal produksi dan aktivitas perkebunan.

Dinamika pengelolaan perkebunan juga menjadi faktor yang perlu diperhitungkan. Sepanjang periode tersebut terjadi perubahan penguasaan dan pengelolaan pada sejumlah areal, baik melalui akuisisi kebun oleh perusahaan lain maupun melalui proses penertiban, pengambilalihan, dan penyitaan lahan. Perubahan pengelolaan tersebut pada sebagian kebun menimbulkan periode transisi yang dapat memengaruhi intensitas pemeliharaan, kegiatan panen, pengangkutan hasil, hingga pencatatan produksi. Dengan demikian, areal yang secara fisik masih merupakan perkebunan kelapa sawit belum tentu dapat mempertahankan tingkat

produktivitas yang sama selama proses transisi pengelolaan berlangsung.

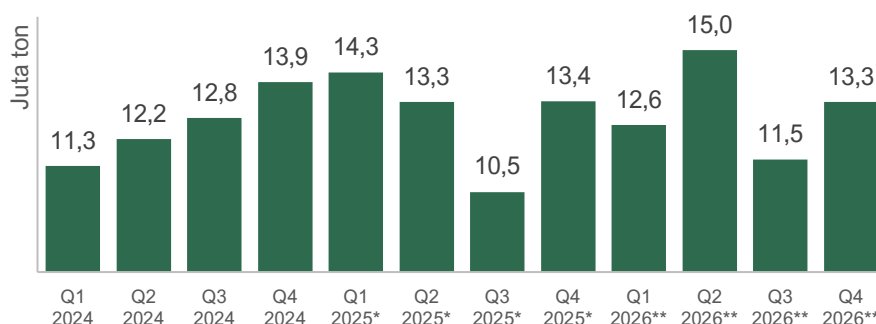
Di sisi lain, tambahan produksi yang diharapkan berasal dari Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) juga belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap produksi nasional. Areal PSR yang diremajakan pada periode 2022–2023 sebagian mulai memasuki fase tanaman menghasilkan pada 2026. Namun, karena realisasi luas PSR pada periode tersebut masih relatif terbatas dibandingkan luas perkebunan sawit nasional, tambahan produksi dari tanaman hasil peremajaan belum cukup besar untuk mendorong peningkatan produksi nasional secara signifikan. Terlebih, tanaman yang baru memasuki fase menghasilkan masih berada pada tahap awal peningkatan produktivitas dan belum mencapai potensi produksi puncaknya.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya dua sisi dari proses peremajaan. Pada satu sisi, tanaman tua yang diremajakan sementara keluar dari basis produksi nasional. Pada sisi lainnya, areal hasil PSR tahun-tahun sebelumnya yang mulai kembali menghasilkan belum cukup luas dan belum mencapai produktivitas optimal untuk memberikan tambahan produksi yang besar. Oleh karena itu, hingga tahun 2026, PSR belum menjadi sumber pertumbuhan produksi yang cukup kuat untuk mengimbangi berbagai tekanan yang terjadi pada areal eksisting.

Dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan tersebut, produksi minyak sawit tahun 2026 diperkirakan tetap meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi kenaikannya tidak sebesar potensi yang sebelumnya diperkirakan dalam *Outlook 2026*. Proyeksi produksi sebesar 52,4 juta ton mencerminkan masih adanya peningkatan produktivitas dan potensi produksi tanaman, tetapi sebagian tambahan produksi tersebut tertahan oleh gangguan pada areal produksi, transisi pengelolaan perkebunan, serta belum besarnya kontribusi tanaman hasil peremajaan terhadap produksi nasional.

2.1.2 Dinamika Produksi Q4 secara Year-on-Year

Setelah mengalami penurunan pada Q3 2026, produksi minyak sawit nasional diproyeksikan kembali meningkat pada Q4 2026. Total produksi pada periode Oktober–Desember 2026 diperkirakan mencapai sekitar 13,3 juta ton, meningkat sekitar 1,8 juta ton atau 15,6% dibandingkan Q3 2026 yang mencapai sekitar 11,5 juta ton. Peningkatan tersebut terutama mencerminkan adanya pergeseran produksi menjelang akhir tahun setelah produksi berada pada level yang relatif rendah pada kuartal sebelumnya.



Gambar 2. Perkembangan Produksi Minyak Sawit Nasional per Kuartal, Q1 2024–Q4 2026

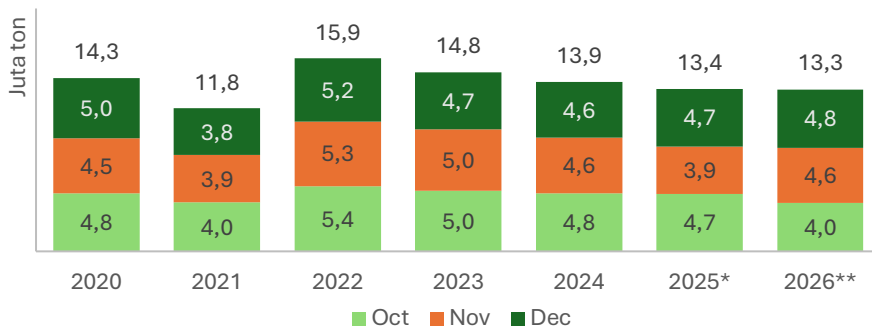
Sumber: BPS (2025b), Ditjenbun (2025), diolah kembali oleh IPOSS

*) Data estimasi **) Data proyeksi

Pergerakan produksi sepanjang tahun 2026 menunjukkan distribusi produksi antarkuartal yang cukup fluktuatif. Produksi pada Q1 mencapai sekitar 12,6 juta ton dan meningkat menjadi 15,0 juta ton pada Q2, sebelum turun menjadi 11,5 juta ton pada Q3, lalu kembali meningkat menjadi 13,3 juta ton pada Q4. Kenaikan produksi pada Q4 tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya peningkatan kapasitas produksi, tetapi lebih mencerminkan pergeseran sebagian realisasi produksi dari Q3 ke Q4, terutama akibat proses pembentukan dan pematangan buah yang berlangsung lebih panjang dari pola normal.

Indikasi tersebut menjadi lebih jelas apabila produksi Q4 2026 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Meskipun meningkat sekitar 15,6% dibandingkan

dengan Q3 2026, produksi Q4 sebesar 13,3 juta ton relatif sama dengan Q4 2025 yang mencapai 13,4 juta ton, sedikit lebih rendah dibandingkan Q4 2024 sebesar 13,9 juta ton, dan masih sekitar 16% di bawah Q4 2022 yang mencapai 15,9 juta ton. Dengan demikian, kenaikan produksi dari Q3 menuju Q4 lebih tepat dibaca sebagai perubahan distribusi waktu produksi dalam tahun berjalan, sementara secara year-on-year belum terlihat adanya peningkatan produksi yang signifikan. Pergeseran tersebut antara lain berkaitan dengan perubahan kondisi agroklimat yang memengaruhi waktu pembentukan dan pematangan buah. Perbandingan produksi Q4 antartahun tersebut disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Perbandingan Produksi Nasional Q4 Antar Tahun

Sumber: BPS (2025b), Ditjenbun (2025), diolah kembali oleh IPOSS

*) Data estimasi **) Data proyeksi

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan produksi pada Q4 2026 lebih tepat dipahami sebagai pergeseran distribusi produksi antarkuartal, bukan sebagai peningkatan kapasitas produksi secara struktural. Produksi yang tidak sepenuhnya terealisasi pada Q3 diperkirakan sebagian bergeser ke Q4, sehingga produksi Q4 meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya. Hal ini juga menjelaskan mengapa peningkatan produksi Q4 secara quarter-to-quarter cukup tinggi, sementara secara year-on-year produksi relatif tidak berbeda dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pergeseran distribusi produksi tersebut berkaitan dengan dinamika pembentukan dan pematangan buah kelapa sawit. Dalam kondisi

normal, perkembangan buah sejak penyerbukan hingga matang membutuhkan waktu sekitar 5–6 bulan. Namun, kondisi lingkungan yang kurang mendukung dapat memperlambat proses pengisian dan pematangan buah sehingga periode perkembangan buah menjadi lebih panjang. Akibatnya, sebagian produksi yang sebelumnya diperkirakan dapat dipanen pada Q3 baru terealisasi pada periode berikutnya.

Secara bulanan, pergeseran tersebut terlihat dari distribusi produksi Q4 2026. Produksi Oktober diproyeksikan masih relatif rendah, sekitar 4,0 juta ton, kemudian meningkat menjadi sekitar 4,6 juta ton pada November dan 4,8 juta ton pada Desember. Dibandingkan tahun sebelumnya, produksi November 2026 diproyeksikan sekitar 17,9% lebih tinggi dibandingkan November 2025 yang mencapai 3,9 juta ton, sedangkan produksi Desember 2026 relatif sama dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pola ini mengindikasikan bahwa sebagian tambahan produksi Q4 terkonsentrasi pada November dan Desember.

Kondisi curah hujan pada Q4 diharapkan lebih mendukung proses fisiologis tanaman dan pematangan buah. Meskipun pengaruh El Niño masih berlangsung, keberadaannya tidak serta-merta berarti tidak terjadi hujan. Pengaruhnya lebih terkait dengan kecenderungan berkurangnya curah hujan dibandingkan kondisi normal. Dengan demikian, apabila curah hujan pada Q4 membaik dibandingkan periode sebelumnya, ketersediaan air yang lebih memadai diharapkan dapat mendukung aktivitas fisiologis tanaman, termasuk proses fotosintesis, pengisian buah, dan pematangan tandan.

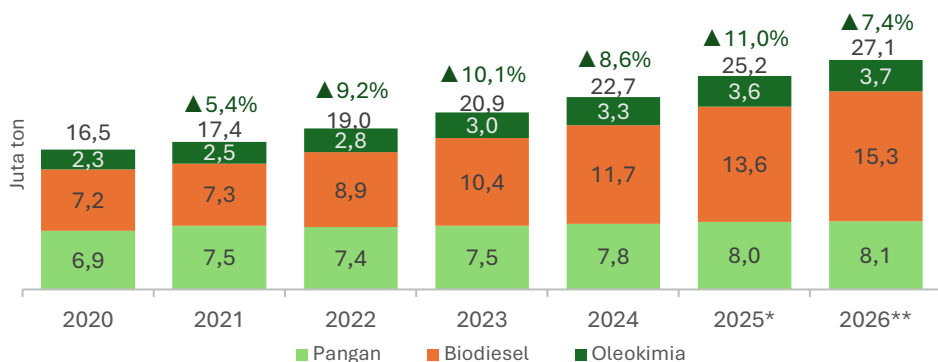
Namun demikian, peningkatan produksi pada Q4 tidak dapat seluruhnya dipandang sebagai tambahan produksi baru. Sebagian merupakan realisasi produksi yang bergeser dari periode sebelumnya. Hal ini konsisten dengan total produksi Q4 2026 yang diproyeksikan sekitar 13,3 juta ton, relatif sama dengan Q4 2025 sebesar 13,4 juta ton dan masih lebih rendah dibandingkan beberapa capaian historis Q4 sebelumnya.

Dengan demikian, dinamika produksi Q4 2026 menunjukkan adanya redistribusi waktu panen dari Q3 menuju Q4, terutama ke November dan Desember, sementara kapasitas produksi secara keseluruhan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pergeseran tersebut menjadi salah satu faktor yang memungkinkan produksi tahunan 2026 tetap meningkat dibandingkan tahun 2025, meskipun kenaikannya masih lebih rendah dibandingkan potensi yang sebelumnya diharapkan.

2.2 Outlook Konsumsi Q4 2026

Konsumsi domestik minyak sawit Indonesia pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 27,1 juta ton, meningkat dari 25,2 juta ton pada tahun 2025. Dengan demikian, konsumsi domestik bertambah sekitar 1,9 juta ton atau 7,4%, jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan produksi pada periode yang sama.

Peningkatan konsumsi domestik terutama berasal dari penggunaan minyak sawit untuk biodiesel. Konsumsi biodiesel diproyeksikan meningkat dari sekitar 13,6 juta ton pada 2025 menjadi 15,3 juta ton pada 2026, atau bertambah sekitar 1,7 juta ton. Dengan demikian, hampir 90% tambahan konsumsi domestik pada tahun 2026 berasal dari peningkatan kebutuhan biodiesel.



Gambar 4. Proyeksi Konsumsi Minyak Sawit Nasional Tahunan sampai dengan 2026

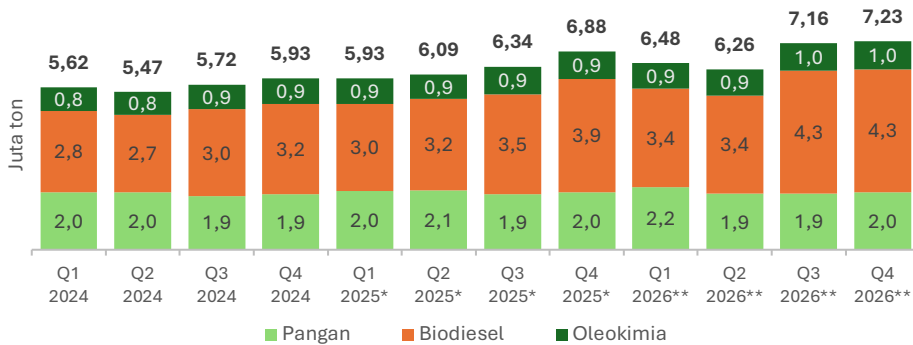
Sumber: BPS (2025a), Ditjenbun (2025), diolah kembali oleh IPOSS

*) Data estimasi **) Data proyeksi

Berdasarkan Gambar 4, konsumsi untuk pangan dan oleokimia menunjukkan pertumbuhan yang relatif terbatas. Konsumsi pangan meningkat dari sekitar 8,0 juta ton menjadi 8,1 juta ton, sedangkan konsumsi oleokimia meningkat dari sekitar 3,6 juta ton menjadi 3,7 juta ton.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan konsumsi domestik minyak sawit Indonesia semakin ditentukan oleh kebijakan energi. Implementasi mandatori B50 yang berlaku mulai 1 Juli 2026 meningkatkan kebutuhan biodiesel dan mengubah struktur penggunaan minyak sawit di dalam negeri. Meskipun kebijakan tersebut masih memberikan masa transisi bagi penyaluran persediaan biodiesel untuk pencampuran B40 hingga 30 September 2026, ketentuan tersebut terutama berkaitan dengan proses penyaluran selama masa transisi. **Kondisi ini tidak serta-merta berarti bahwa kebutuhan CPO sebagai bahan baku produksi biodiesel pada Q3 2026 masih berada pada tingkat kebutuhan B40.** Dalam proyeksi ini, peningkatan kebutuhan CPO untuk produksi biodiesel karena itu telah diperhitungkan sejak Q3 2026.

Secara kuartalan, perubahan tersebut mulai terlihat pada semester kedua 2026. Konsumsi domestik diproyeksikan mencapai sekitar 6,5 juta ton pada Q1, kemudian 6,3 juta ton pada Q2. Sejalan dengan mulai berlakunya B50, konsumsi meningkat menjadi sekitar 7,2 juta ton pada Q3 dan bertahan pada level yang relatif sama pada Q4 sebesar 7,23 juta ton.



Gambar 5. Proyeksi Konsumsi Minyak Sawit Nasional Per Triwulan s.d 2026

Sumber: BPS (2025a), Ditjenbun (2025), diolah kembali oleh IPOSS

*) Data estimasi **) Data proyeksi

Kenaikan paling besar terjadi pada konsumsi biodiesel. Setelah berada pada kisaran 3,4 juta ton pada Q1 dan Q2, konsumsi biodiesel meningkat menjadi sekitar 4,3 juta ton pada Q3 dan bertahan pada level yang sama pada Q4. Dengan demikian, perubahan struktur konsumsi akibat implementasi B50 telah tercermin sejak Q3 dan berlanjut sepanjang Q4 2026.

Pada Q4 2026, biodiesel diproyeksikan menyerap sekitar 59% konsumsi domestik, sedangkan pangan sekitar 28% dan oleokimia sekitar 13%. Struktur tersebut menunjukkan semakin dominannya penggunaan minyak sawit untuk sektor energi dibandingkan penggunaan domestik lainnya.

Dalam perspektif supply-demand, peningkatan konsumsi domestik menjadi salah satu perubahan paling penting pada tahun 2026. Ketika produksi hanya meningkat sekitar 0,9 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya, konsumsi domestik bertambah sekitar 1,9 juta ton. Artinya, tambahan konsumsi domestik lebih besar dibandingkan tambahan produksi yang tersedia.

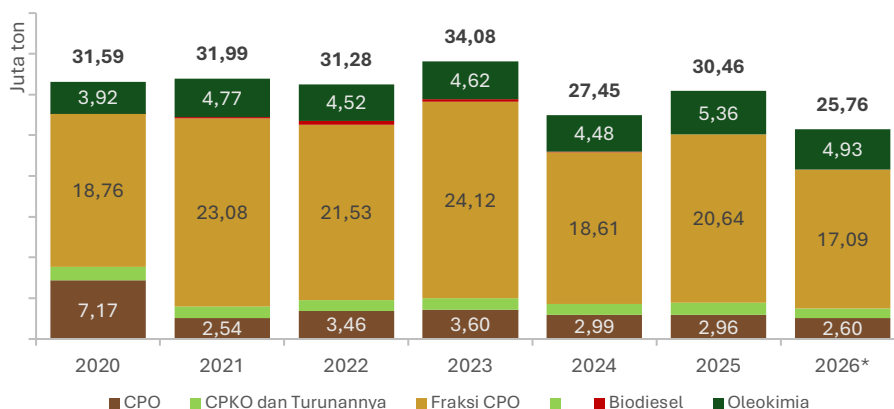
Pada Q4 2026, konsumsi domestik sebesar 7,23 juta ton setara dengan sekitar 54% produksi kuartalan yang diproyeksikan mencapai

13,3 juta ton. Kondisi tersebut mempersempit ruang pasokan yang tersedia untuk ekspor dan pembentukan stok.

Dengan demikian, implementasi B50 tidak hanya meningkatkan permintaan minyak sawit domestik, tetapi juga mengubah keseimbangan alokasi produksi nasional. Perubahan tersebut menjadi semakin penting memasuki tahun 2027 ketika B50 akan berlaku selama satu tahun penuh.

2.3 Outlook Ekspor Q4 2026

Di tengah peningkatan konsumsi domestik yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan produksi, ekspor menjadi salah satu komponen utama yang mengalami penyesuaian. Total ekspor produk sawit Indonesia pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 25,76 juta ton, turun sekitar 4,70 juta ton atau 15,4% dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 30,46 juta ton.



Gambar 6. Ekspor Produk Sawit Nasional Tahunan sampai dengan 2026

Sumber: BPS (2026b), diolah kembali oleh IPOSS

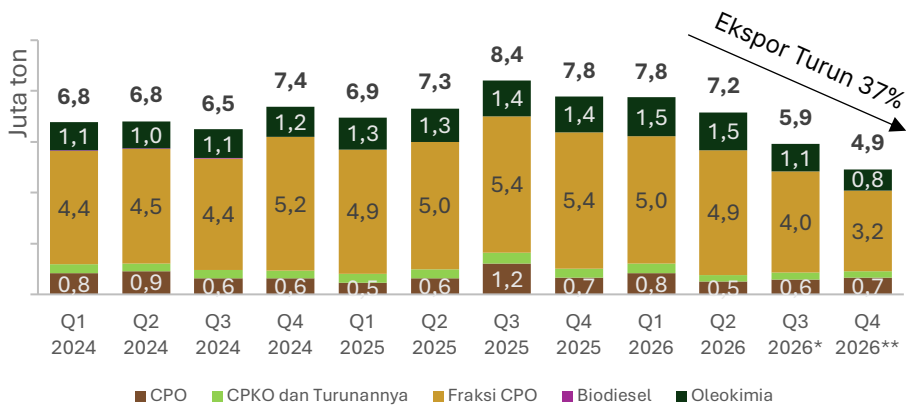
*) Data estimasi

Volume ekspor tahun 2026 menjadi yang terendah dalam periode 2020–2026 dan sekitar 24% lebih rendah dibandingkan puncak ekspor tahun 2023 yang mencapai 34,08 juta ton. Penurunan tersebut menunjukkan terjadinya perubahan yang cukup besar dalam alokasi penggunaan minyak sawit nasional.

Penurunan ekspor terutama terjadi pada kelompok fraksi CPO yang merupakan komponen terbesar dalam struktur ekspor sawit Indonesia. Ekspor fraksi CPO diproyeksikan turun dari sekitar 20,64 juta ton pada tahun 2025 menjadi 17,09 juta ton pada tahun 2026, atau berkurang sekitar 3,55 juta ton. Ekspor CPO juga turun dari sekitar 2,96 juta ton menjadi 2,60 juta ton, sedangkan ekspor oleokimia turun dari 5,36 juta ton menjadi sekitar 4,93 juta ton.

Meskipun mengalami penurunan, fraksi CPO tetap menjadi komponen terbesar dalam struktur ekspor dengan pangsa sekitar 66% dari total ekspor produk sawit. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan ekspor tidak hanya terjadi pada CPO sebagai bahan baku, tetapi juga pada produk olahan yang selama ini menjadi komponen utama ekspor sawit Indonesia.

Secara kuartalan, penurunan ekspor terlihat semakin kuat pada semester kedua 2026. Ekspor pada Q1 masih mencapai sekitar 7,8 juta ton dan kemudian turun menjadi 7,2 juta ton pada Q2. Pada Q3, ekspor kembali turun menjadi sekitar 5,9 juta ton dan diproyeksikan hanya mencapai 4,9 juta ton pada Q4 2026.



Gambar 7. Ekspor Produk Sawit Nasional Kuartalan sampai dengan Q4 2026

Sumber: BPS (2026b), diolah kembali oleh IPOSS

*) Data estimasi **) Data proyeksi

Dibandingkan Q3 2026, ekspor Q4 turun sekitar 16,9%. Apabila dibandingkan dengan Q4 2025 yang mencapai sekitar 7,8 juta ton, penurunan mencapai sekitar 37,2%. Dengan demikian, tekanan

terhadap ekspor semakin kuat setelah implementasi B50 pada semester kedua tahun 2026.

Penurunan pada Q4 terutama berasal dari ekspor fraksi CPO yang turun dari sekitar 4,0 juta ton pada Q3 menjadi 3,2 juta ton pada Q4. Ekspor oleokimia juga turun dari sekitar 1,1 juta ton menjadi 0,8 juta ton. Sementara itu, ekspor CPO meningkat tipis dari sekitar 0,6 juta ton menjadi 0,7 juta ton, tetapi peningkatan tersebut belum mampu mengimbangi penurunan pada kelompok produk lainnya.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa ekspor semakin berperan sebagai variabel penyesuaian dalam neraca minyak sawit nasional. Ketika konsumsi domestik meningkat sementara pertumbuhan produksi relatif terbatas, sebagian pasokan yang sebelumnya tersedia untuk pasar ekspor perlu dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Namun demikian, perubahan volume ekspor tidak sepenuhnya ditentukan oleh ketersediaan pasokan domestik. Permintaan negara tujuan, harga relatif minyak sawit terhadap minyak nabati lainnya, serta kondisi perdagangan global tetap memengaruhi realisasi ekspor. Karena itu, penurunan ekspor perlu dilihat sebagai hasil interaksi antara semakin terbatasnya ruang pasokan domestik dan perkembangan permintaan di pasar internasional.

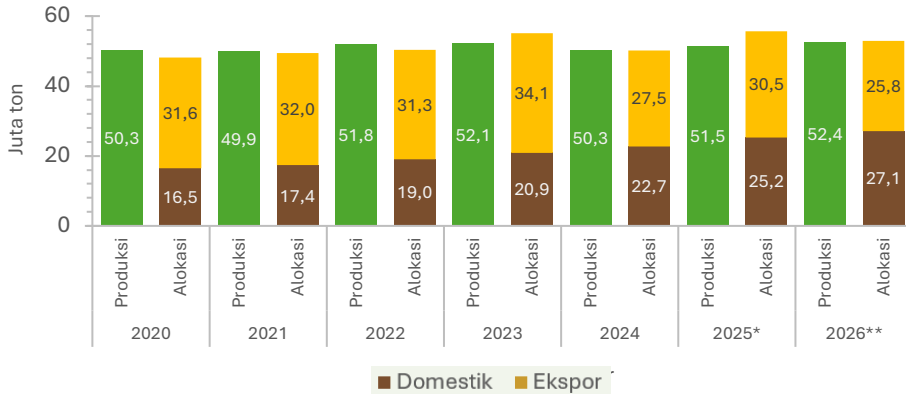
Secara keseluruhan, *Outlook* ekspor Q4 2026 menunjukkan terjadinya perubahan yang semakin nyata dalam struktur penggunaan minyak sawit Indonesia. Pasar domestik menyerap bagian produksi yang semakin besar, sementara ekspor menjadi komponen yang menyesuaikan untuk menjaga keseimbangan pasokan.

2.4 Outlook Neraca dan Stok Akhir Q4 2026

2.4.1 Neraca Minyak Sawit Nasional 2026

Perubahan produksi, konsumsi domestik, dan ekspor sepanjang tahun 2026 membentuk struktur neraca minyak sawit yang berbeda

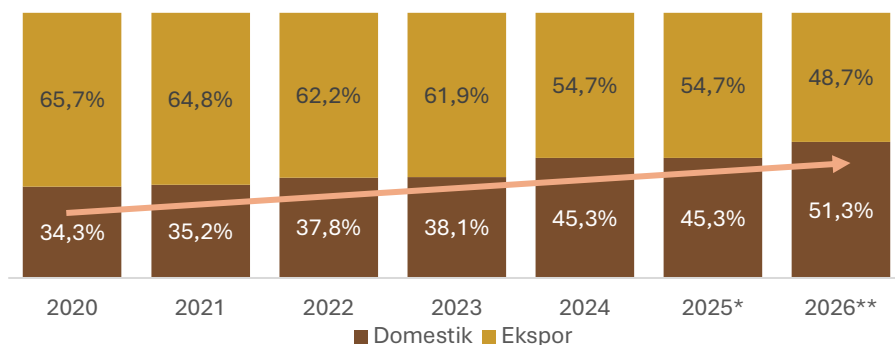
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Produksi minyak sawit nasional diproyeksikan mencapai sekitar 52,4 juta ton, sementara alokasi domestik mencapai 27,1 juta ton dan ekspor sekitar 25,76 juta ton.



Gambar 8. Perbandingan Produksi, Alokasi Domestik, dan Ekspor Minyak Sawit
Sumber: BPS (2025a, 2026b), Ditjenbun (2025), IPOSS (2026a), diolah kembali oleh IPOSS
(*) Data estimasi (**) Data proyeksi

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, perubahan terbesar terjadi pada struktur penggunaan minyak sawit. Alokasi domestik meningkat sekitar 1,9 juta ton, sementara ekspor turun sekitar 4,7 juta ton. Dengan demikian, peningkatan kebutuhan domestik tidak sepenuhnya dipenuhi oleh tambahan produksi, tetapi juga melalui perubahan alokasi pasokan yang sebelumnya tersedia untuk pasar ekspor.

Perubahan tersebut membawa struktur penggunaan minyak sawit Indonesia memasuki titik penting. Pada tahun 2025, konsumsi domestik mencakup sekitar 45,3% dari total penggunaan minyak sawit, sementara ekspor mencapai 54,7%. Pada tahun 2026, komposisi tersebut berbalik menjadi 51,3% untuk konsumsi domestik dan 48,7% untuk ekspor.



Gambar 9. Pangsa Konsumsi Domestik dan Ekspor terhadap Total Alokasi Minyak Sawit

Sumber: BPS (2025a, 2026b), IPOSS (2026a), diolah kembali oleh IPOSS

*) Data estimasi **) Data proyeksi

Dengan komposisi tersebut, untuk pertama kalinya dalam periode pengamatan, volume penggunaan minyak sawit di dalam negeri melampaui volume ekspor. Pergeseran ini menjadi salah satu perubahan paling penting dalam struktur supply-demand minyak sawit Indonesia pada tahun 2026. Perlu ditekankan bahwa rasio tersebut menggambarkan komposisi antara konsumsi domestik dan ekspor sebagai tujuan penggunaan, bukan persentase produksi yang dikonsumsi di dalam negeri.

Perubahan struktur tersebut terjadi melalui dua proses secara bersamaan. Pertama, konsumsi domestik meningkat, terutama didorong oleh bertambahnya kebutuhan biodiesel setelah implementasi B50. Kedua, ekspor mengalami kontraksi yang cukup besar. Dengan demikian, peningkatan pangsa domestik hingga melampaui ekspor tidak semata-mata mencerminkan ekspansi pasar domestik, tetapi juga menunjukkan semakin terbatasnya volume yang dialokasikan ke pasar ekspor.

Dari perspektif neraca, kondisi ini menunjukkan bahwa ekspor menjadi komponen yang paling besar mengalami penyesuaian ketika pertumbuhan konsumsi domestik lebih cepat daripada pertumbuhan produksi. Sepanjang masih terdapat ruang untuk mengurangi ekspor, keseimbangan fisik domestik dapat tetap terjaga. Namun, konsekuensinya adalah semakin sempitnya ruang antara kebutuhan

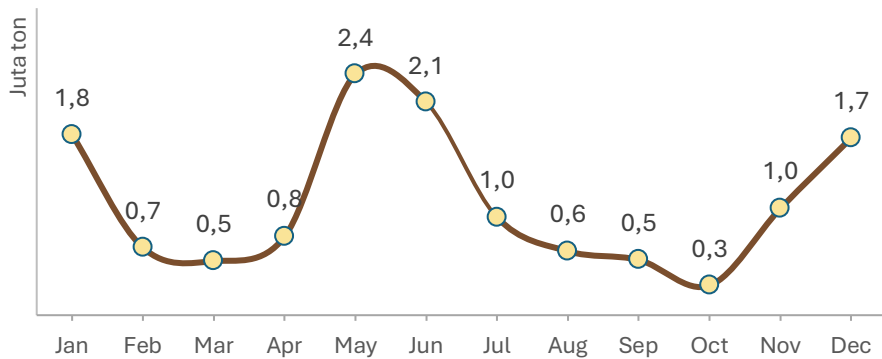
domestik, ekspor, dan persediaan apabila produksi tidak tumbuh lebih cepat pada periode berikutnya.

Neraca tahunan tersebut juga belum menggambarkan tekanan pasokan yang terjadi di dalam tahun. Produksi, konsumsi, dan ekspor tidak terdistribusi secara merata setiap bulan, sementara posisi stok pada suatu periode merupakan akumulasi dari keseimbangan periode sebelumnya. Oleh karena itu, meskipun neraca tahunan 2026 terlihat lebih seimbang dibandingkan tahun 2025, tingkat persediaan pada beberapa periode sepanjang tahun tetap berada pada posisi yang rendah.

Untuk melihat kapan tekanan pasokan terjadi dan bagaimana penyesuaian produksi, konsumsi, serta ekspor memengaruhi persediaan, perkembangan stok bulanan sepanjang tahun 2026 perlu dianalisis secara lebih rinci pada bagian berikutnya.

2.4.2 Stok Akhir Q4 2026

Pergerakan stok sepanjang tahun 2026 menunjukkan bahwa keseimbangan pasokan minyak sawit nasional tidak berlangsung merata antarbulan. Meskipun secara tahunan selisih antara produksi dan total penggunaan relatif kecil, pada beberapa periode terjadi defisit pasokan yang menyebabkan stok turun ke tingkat yang sangat rendah, sementara pada periode lainnya surplus produksi memungkinkan persediaan kembali terbentuk.



Gambar 10. Stok Akhir Minyak Sawit Tahun 2026

Sumber: BPS (2025a, 2026b), Ditjenbun (2025), diolah kembali oleh IPOSS

Pada awal tahun, stok minyak sawit berada pada kisaran 1,8 juta ton pada Januari 2026, kemudian turun menjadi sekitar 0,7 juta ton pada Februari dan 0,5 juta ton pada Maret. Posisi stok kemudian meningkat menjadi sekitar 0,8 juta ton pada April dan mencapai sekitar 2,4 juta ton pada Mei, sebelum sedikit menurun menjadi 2,1 juta ton pada Juni.

Memasuki semester kedua, tekanan terhadap persediaan kembali meningkat. Stok turun menjadi sekitar 1,0 juta ton pada Juli, 0,6 juta ton pada Agustus, dan 0,5 juta ton pada September. Penurunan tersebut sejalan dengan rendahnya produksi pada Q3, sementara konsumsi domestik meningkat setelah implementasi B50. Dengan demikian, sebagian kebutuhan pada periode tersebut harus dipenuhi melalui pengurangan persediaan.

Tekanan terhadap stok masih berlanjut pada awal Q4. Pada Oktober 2026, stok diproyeksikan mencapai titik terendah sekitar 0,3 juta ton. Posisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun neraca tahunan terlihat relatif seimbang, pada periode tertentu ruang pasokan yang tersedia sangat terbatas.

Namun, memasuki November dan Desember, posisi stok mulai meningkat menjadi sekitar 1,0 juta ton pada November dan 1,7 juta ton pada Desember 2026. Peningkatan stok pada akhir tahun terutama terjadi karena distribusi produksi yang bergeser ke bagian akhir Q4, sementara ekspor turun dan konsumsi domestik relatif stabil.

Jika dilihat berdasarkan neraca kuartalan, pola perubahan stok tersebut menjadi lebih jelas. Pada Q1 2026, produksi lebih rendah dibandingkan gabungan konsumsi domestik dan ekspor sehingga terjadi defisit arus pasokan sekitar 1,7 juta ton. Kondisi berbalik pada Q2 ketika produksi yang lebih tinggi menghasilkan surplus sekitar 1,5 juta ton. Pada Q3, neraca kembali mengalami defisit sekitar 1,6 juta ton sehingga stok kembali terkuras.

Pada Q4, produksi diproyeksikan mencapai sekitar 13,3 juta ton, sementara konsumsi domestik sekitar 7,2 juta ton dan ekspor sekitar 4,9 juta ton. Dengan demikian, terdapat surplus arus pasokan sekitar 1,2 juta ton. Surplus inilah yang memungkinkan stok meningkat dari sekitar 0,5 juta ton pada akhir September menjadi sekitar 1,7 juta ton pada akhir Desember.

Namun, pembentukan kembali stok pada Q4 perlu dibaca bersama dengan dinamika produksi dan ekspor. Tambahan pasokan pada Q4 sebagian merupakan pergeseran distribusi produksi dari Q3, bukan peningkatan kapasitas produksi secara struktural. Pada saat yang sama, ekspor Q4 turun menjadi sekitar 4,9 juta ton, jauh lebih rendah dibandingkan Q4 2025 yang mencapai sekitar 7,8 juta ton. Dengan demikian, pemulihan stok pada akhir tahun tidak hanya ditopang oleh meningkatnya produksi Q4, tetapi juga oleh berkurangnya volume yang keluar melalui ekspor.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa stok berfungsi sebagai penyangga utama terhadap ketidaksinkronan waktu antara produksi dan penggunaan. Ketika produksi turun sementara konsumsi domestik dan ekspor tetap tinggi, stok akan terkuras. Sebaliknya, ketika produksi meningkat dan/atau ekspor menurun, sebagian

pasokan dapat kembali membentuk persediaan. Karena itu, posisi stok menjadi indikator penting untuk membaca tingkat keketatan neraca yang tidak selalu terlihat dari agregat tahunan.

Meskipun stok akhir tahun diproyeksikan kembali mencapai sekitar 1,7 juta ton, posisi tersebut masih lebih rendah dibandingkan stok awal tahun sebesar 2,2 juta ton. Artinya, sepanjang tahun 2026 Indonesia masih menggunakan sekitar 0,5 juta ton persediaan untuk menutup selisih antara produksi dan total penggunaan.

Posisi stok yang relatif rendah tersebut menjadi perhatian penting memasuki tahun 2027. Implementasi B50 selama satu tahun penuh akan mempertahankan kebutuhan minyak sawit domestik pada tingkat yang tinggi. Apabila peningkatan produksi tetap terbatas, maka ruang untuk memenuhi kebutuhan domestik, mempertahankan ekspor, dan sekaligus membangun stok akan semakin bergantung pada kemampuan produksi nasional untuk tumbuh lebih tinggi.

Dengan demikian, neraca tahun 2026 menunjukkan situasi yang cukup unik. Secara tahunan, keseimbangan produksi dan konsumsi membaik dibandingkan tahun 2025, tetapi secara bulanan stok sempat turun ke tingkat yang sangat rendah. Perbaikan stok pada akhir Q4 juga belum sepenuhnya menunjukkan bertambahnya kelonggaran pasokan, karena terjadi bersamaan dengan penurunan ekspor yang cukup besar. Kondisi ini menegaskan bahwa tantangan ke depan bukan hanya menjaga keseimbangan neraca secara tahunan, tetapi juga memastikan tersedianya ruang pasokan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan domestik, ekspor, dan persediaan secara bersamaan.



BAB 3. OUTLOOK IKLIM DAN DAMPAKNYA TERHADAP PRODUKSI

Produksi kelapa sawit tidak hanya ditentukan oleh kondisi tanaman pada saat panen, tetapi merupakan hasil dari proses pembentukan yang berlangsung dalam periode yang panjang. Kondisi iklim, terutama ketersediaan air, karena itu dapat memengaruhi produksi melalui beberapa horizon waktu. Sebagian pengaruhnya dapat terlihat dalam kondisi tanaman dan kegiatan operasional pada periode berjalan, sementara pengaruh terhadap pembentukan bunga dan tandan dapat baru tercermin pada produksi beberapa bulan hingga beberapa tahun kemudian.

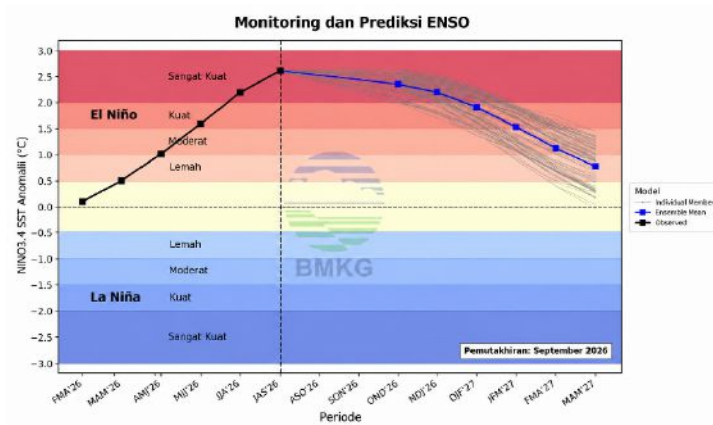
Karakter tersebut penting dalam membaca *Outlook* produksi 2026, sebagaimana dibahas pada Bab 2. Bahwa diperkirakan produksi minyak sawit Indonesia pada 2026 diperkirakan mencapai sekitar 52,4 juta ton, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya meskipun pertumbuhannya relatif terbatas yang penyebabnya dapat dilihat dari berbagai faktor, salah satunya iklim.

Atas dasar itu, pembahasan iklim dalam bab ini akan diarahkan untuk melihat kondisi *climate hazard* memasuki Q4 2026, keterpaparannya terhadap wilayah produksi sawit, serta langkah mitigasi yang diperlukan untuk menjaga momentum produksi di tengah meningkatnya variabilitas iklim. Pendekatan ini sekaligus mempertimbangkan bahwa sebagian konsekuensi biologis dari tekanan iklim 2026 sebagian tercermin pada produksi Q4 2026 dan Sebagian tercermin pada produksi periode berikutnya.

3.1 *Climate Hazard* Q4 2026

Indonesia memasuki Q4 2026 setelah melalui musim kemarau yang lebih kering dari kondisi normal di banyak wilayah. Menjelang akhir September, El Niño telah berkembang menjadi kategori sangat kuat. Kondisi ini penting bagi sektor sawit karena El Niño pada umumnya berkaitan dengan berkurangnya pembentukan hujan di sebagian wilayah Indonesia, terutama ketika berlangsung pada musim kemarau dan masa peralihan menuju musim hujan. Hingga

pertengahan September, sekitar 81% Zona Musim Indonesia masih berada dalam musim kemarau dan sebanyak 1.637 titik pengamatan telah mengalami lebih dari 60 hari tanpa hujan berturut-turut (BMKG, 2026d).

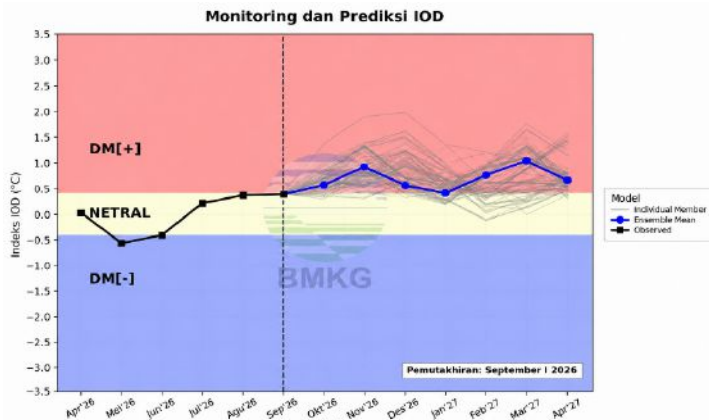


Gambar 11. Monitoring dan Prediksi ENSO, September 2026

Sumber: BMKG (2026c)

Monitoring ENSO menunjukkan anomali suhu muka laut NINO3.4 telah mencapai sekitar 2,6°C pada periode Juli–Agustus–September 2026, menempatkan El Niño pada kategori sangat kuat. Hasil pemodelan menunjukkan intensitasnya diproyeksikan menurun secara bertahap setelah September. *Ensemble mean* masih berada pada kisaran 2,4°C pada Oktober–November–Desember 2026 dan sekitar 2,2°C pada November–Desember 2026–Januari 2027, sebelum terus melemah pada awal 2027. Dengan demikian, Q4 2026 masih berada di bawah pengaruh El Niño yang kuat, tetapi dengan kecenderungan menuju pelemahan.

Pada saat yang sama, perkembangan *Indian Ocean Dipole* (IOD) perlu diperhatikan karena dapat memperkuat atau mengurangi pengaruh ENSO terhadap kondisi hujan di Indonesia. Hingga September 2026, indeks IOD hasil observasi masih berada di sekitar batas atas kondisi netral setelah meningkat secara bertahap sejak pertengahan tahun.



Gambar 12. Monitoring dan Prediksi IOD, September 2026

Sumber: BMKG (2026c)

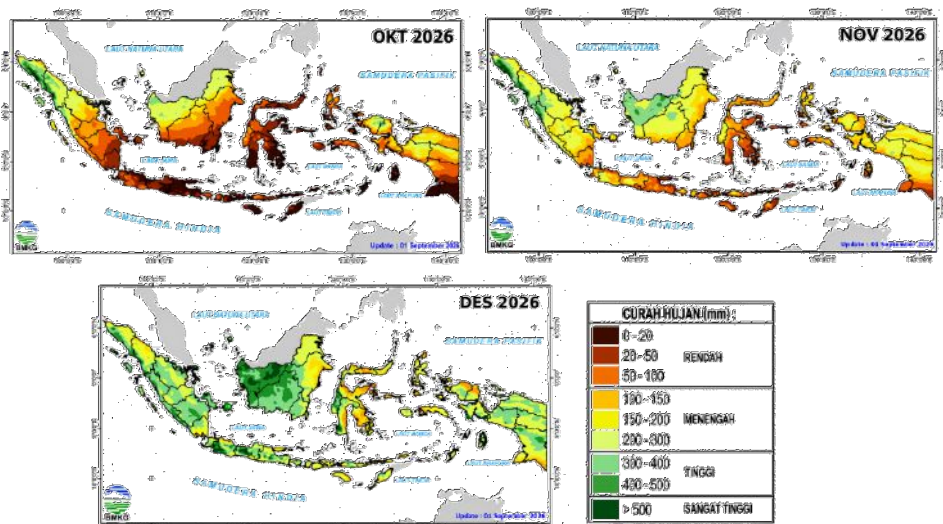
Berbeda dengan ENSO yang telah menunjukkan kondisi kuat berdasarkan hasil observasi, sinyal IOD positif pada Q4 2026 masih terutama berasal dari hasil prediksi. *Ensemble mean* memperkirakan indeks IOD meningkat menjadi sekitar $+0,6^{\circ}\text{C}$ pada Oktober, $+0,9^{\circ}\text{C}$ pada November, dan sekitar $+0,6^{\circ}\text{C}$ pada Desember 2026. Meskipun terdapat penyebaran yang cukup lebar antar anggota model, proyeksi tersebut menunjukkan adanya potensi IOD positif selama Q4 2026 yang dapat memperkuat kecenderungan kondisi kering di sebagian wilayah Indonesia.

Kombinasi El Niño yang masih kuat dan potensi berkembangnya IOD positif menyebabkan tekanan iklim pada awal Q4 masih perlu diwaspadai. Namun, kondisi tersebut tidak berarti seluruh wilayah Indonesia akan mengalami tekanan kekeringan dengan intensitas yang sama. Pengaruh fenomena iklim global berinteraksi dengan perkembangan musim dan kondisi atmosfer regional, sehingga distribusi curah hujan bulanan menjadi indikator yang lebih langsung untuk melihat perkembangan *hazard* pada tingkat wilayah.

Prakiraan BMKG menunjukkan perubahan yang cukup jelas sepanjang Q4. Pada Oktober, sekitar 49,9% wilayah Indonesia diperkirakan menerima curah hujan kurang dari 100 mm selama sebulan, sedangkan sekitar 45,1% berada pada kategori hujan menengah. Wilayah dengan curah hujan rendah masih dijumpai

antara lain di bagian selatan Sumatera dan beberapa bagian Kalimantan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tekanan hujan rendah yang berkembang selama Q3 masih berpotensi berlanjut hingga awal Q4.

Situasinya mulai berubah pada November. Proporsi wilayah dengan curah hujan rendah diperkirakan menyusut menjadi sekitar 17%, sementara sekitar 70% wilayah mulai menerima hujan kategori menengah (BMKG, 2026e). Memasuki Desember, kondisi hujan diperkirakan semakin membaik dan tidak terdapat wilayah yang diperkirakan memiliki peluang tinggi mengalami curah hujan ekstrem rendah di bawah 50 mm per bulan. Dengan demikian, Oktober–Desember menunjukkan peralihan dari tekanan kondisi kering pada awal kuartal menuju peningkatan hujan secara bertahap pada akhir tahun (BMKG, 2026c).



Gambar 13. Prediksi Curah Hujan Bulan Oktober – Desember 2026

Sumber: BMKG (2026b)

Perbaikan curah hujan tersebut tidak berarti kondisi tanaman dan ketersediaan air langsung kembali normal. Q4 dimulai setelah sebagian wilayah mengalami periode kering yang cukup panjang selama Q3. Pada perkebunan sawit, akumulasi defisit hujan dapat secara bertahap mengurangi ketersediaan air tanah sehingga kondisi pada awal Q4 tidak hanya ditentukan oleh jumlah hujan yang turun

pada Oktober, tetapi juga oleh tekanan air yang telah terbentuk sebelumnya. BMKG juga menunjukkan adanya kantong ketersediaan air kategori sedang hingga kurang pada sejumlah wilayah sentra sawit di Sumatera dan Kalimantan (BMKG, 2026a).

Dengan demikian, *climate hazard* Q4 2026 lebih tepat dibaca sebagai **lintasan perubahan kondisi** daripada satu keadaan yang berlaku sepanjang kuartal. Oktober masih membawa tekanan kondisi kering dari Q3, sedangkan November–Desember menjadi periode ketika peningkatan curah hujan secara bertahap memperbaiki ketersediaan air. Implikasi terhadap produksi karena itu sangat bergantung pada lokasi sentra produksi, lamanya tekanan air sebelumnya, dan kecepatan pemulihan kondisi air di masing-masing wilayah (BMKG, 2026b).

Dengan demikian, isu utama Q4 2026 bukan semata-mata bahwa Indonesia mengalami El Niño, tetapi bahwa awal Q4 berlangsung ketika sejumlah wilayah telah membawa “warisan” kondisi kering dari Q3, sementara pemulihan hujan baru berlangsung bertahap menuju November–Desember.

Box 1. Bagaimana membaca indikator *climate hazard* Q4 2026?

Indikator	Situasi dan Kondisi	Interpretasi
ENSO/El Niño	Indeks ENSO Juli-Agustus-September 2026 +2,6°C; Niño3.4 Dasarian I September +2,76°C	ENSO menggambarkan anomali suhu muka laut di Pasifik tropis. Nilai $\geq +2,0^{\circ}\text{C}$ menunjukkan El Niño sangat kuat. Namun, besarnya indeks ENSO tidak secara langsung menunjukkan besarnya kekeringan di setiap wilayah ; dampaknya perlu dibaca bersama kondisi hujan aktual dan regional.
IOD/Dipole Mode Index	Agustus +0,37 dan Dasarian I September +0,394; pemantauan mingguan 15 September sekitar +0,65	IOD menggambarkan perbedaan anomali suhu muka laut antara Samudra Hindia bagian barat dan timur. IOD positif dapat memperkuat kecenderungan berkurangnya hujan di sebagian wilayah Indonesia. Karena kondisi Q4 masih berupa prediksi , perkembangannya perlu terus dimonitor.
Curah hujan bulanan	Oktober: 49,92% wilayah rendah; November: 16,97% wilayah rendah	Menunjukkan jumlah hujan absolut yang diterima. BMKG mengelompokkan hujan rendah 0–100 mm/bulan, menengah 100–300 mm, tinggi 300–500 mm, dan sangat tinggi >500 mm. Penurunan luas wilayah hujan rendah menunjukkan berkurangnya tekanan kering menuju akhir Q4.
Sifat hujan	Oktober–Desember secara umum Bawah Normal hingga Normal	Berbeda dengan curah hujan absolut. <i>Bawah Normal</i> berarti hujan yang diterima <85% dari kondisi klimatologisnya. Karena itu, suatu wilayah dapat menerima hujan kategori menengah tetapi tetap mengalami sifat hujan Bawah Normal.
Hari Tanpa Hujan (HTH)	1.637 titik telah mencatat >60 hari tanpa hujan s.d September	HTH menunjukkan akumulasi periode kering sebelum memasuki Q4. Nilai >60 hari dikategorikan ekstrem. Indikator ini penting karena kondisi tanaman dan ketersediaan air pada awal Q4 tidak hanya ditentukan oleh hujan Oktober, tetapi juga oleh tekanan kering yang telah terbentuk sebelumnya.

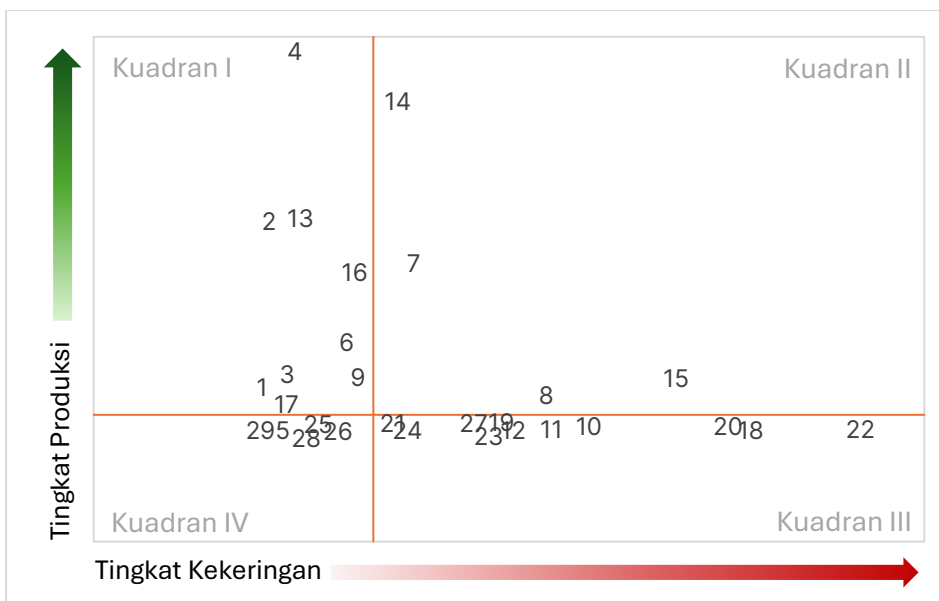
3.2 Spatial Exposure dan Prioritas Mitigasi

Implikasi kondisi kering terhadap industri sawit nasional tidak hanya ditentukan oleh intensitas *hazard*, tetapi juga oleh lokasi terjadinya tekanan tersebut terhadap basis produksi. Produksi sawit Indonesia terkonsentrasi terutama di Sumatera dan Kalimantan. Enam

provinsi—Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Timur—menyumbang sekitar 76,09% produksi minyak sawit nasional (Ditjenbun, 2025; IPOSS, 2025). Riau merupakan produsen terbesar dengan 10,41 juta ton atau 19,86% produksi nasional, disusul Kalimantan Tengah 9,03 juta ton atau 17,23%, Kalimantan Barat 10,99%, Sumatera Utara 10,96%, Sumatera Selatan 8,76%, dan Kalimantan Timur 8,29%.

Namun, provinsi dengan produksi terbesar belum tentu merupakan wilayah yang mengalami tekanan kekeringan tertinggi. Untuk melihat materialitas risiko sekaligus menentukan arah mitigasi, tingkat kekeringan dibandingkan dengan besarnya produksi sawit pada masing-masing provinsi. Pendekatan ini memungkinkan tekanan iklim dibaca bersama dengan kepentingan wilayah tersebut terhadap produksi nasional.

Matriks disusun menggunakan dua variabel, yaitu tingkat kekeringan dan tingkat produksi masing-masing provinsi. Tingkat kekeringan ditampilkan pada sumbu horizontal dan meningkat dari kiri ke kanan, sedangkan tingkat produksi ditampilkan pada sumbu vertikal dan meningkat dari bawah ke atas. Kuadran I menunjukkan wilayah dengan produksi relatif tinggi tetapi tingkat kekeringan relatif rendah; Kuadran II menunjukkan wilayah dengan produksi dan tingkat kekeringan yang sama-sama relatif tinggi; Kuadran III menunjukkan wilayah dengan tingkat kekeringan relatif tinggi tetapi produksi relatif rendah; sedangkan Kuadran IV menunjukkan wilayah dengan produksi dan tingkat kekeringan yang sama-sama relatif rendah. Setiap provinsi direpresentasikan dengan nomor 1–29 sebagaimana ditampilkan pada legenda Gambar 14.



No	Provinsi	No	Provinsi	No	Provinsi
1	Aceh	11	Jawa Barat	21	Sulawesi Barat
2	Sumatera Utara	12	Banten	22	Sulawesi Tenggara
3	Sumatera Barat	13	Kalimantan Barat	23	Maluku
4	Riau	14	Kalimantan Tengah	24	Maluku Utara
5	Kepulauan Riau	15	Kalimantan Selatan	25	Papua
6	Jambi	16	Kalimantan Timur	26	Papua Barat
7	Sumatera Selatan	17	Kalimantan Utara	27	Papua Selatan
8	Kep. Bangka Belitung	18	Gorontalo	28	Papua Tengah
9	Bengkulu	19	Sulawesi Tengah	29	Papua Barat Daya
10	Lampung	20	Sulawesi Selatan		

Gambar 14. Matriks Keterpaparan Produksi Sawit terhadap Tingkat Kekeringan Q4 2026

Sumber: Analisis IPOSS (2026)

Berdasarkan matriks tersebut, perhatian mitigasi terutama perlu diarahkan pada **Kuadran II**, yaitu Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kalimantan Selatan. Posisi pada kuadran ini menunjukkan kombinasi tingkat kekeringan yang relatif tinggi dengan basis produksi yang juga berada di atas batas pembandingan. Matriks ini tidak menunjukkan secara langsung berapa luas kebun atau volume produksi yang terdampak kekeringan, tetapi berfungsi sebagai *screening* untuk menentukan wilayah yang memerlukan perhatian lebih besar.

Kalimantan Tengah (14) mempunyai materialitas terbesar dalam kelompok tersebut karena menyumbang sekitar 17,23% produksi nasional. Pada Oktober, zona hujan rendah diperkirakan mencakup Sukamara, Kotawaringin Barat, Seruyan, Kotawaringin Timur, Pulang Pisau, Kapuas hingga wilayah Barito (BMKG, 2026f). Tekanan tersebut telah berkembang sebelum Q4, karena pada September sebagian wilayah Kalimantan menunjukkan ketersediaan air tanaman kategori kurang sebelum diperkirakan mulai membaik pada Oktober dan November (BMKG, 2026a). Dengan basis produksi yang besar, mitigasi perlu terutama diarahkan pada sentra produksi yang masih mengalami tekanan ketersediaan air pada awal Q4.

Sumatera Selatan (7) juga berada pada Kuadran II dan menghasilkan sekitar 4,59 juta ton minyak sawit atau 8,76% produksi nasional. Pada Oktober, curah hujan rendah diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah termasuk Musi Banyuasin, Banyuasin, Muara Enim, dan Ogan Komering Ilir (BMKG, 2026f). Mitigasi karena itu perlu difokuskan pada wilayah produksi yang beririsan dengan kondisi kering, terutama untuk menjaga ketersediaan air, kondisi tanaman, serta mengantisipasi risiko kebakaran dan gangguan kegiatan perkebunan.

Kalimantan Selatan (15) dan **Kepulauan Bangka Belitung (8)** melengkapi kelompok Kuadran II dengan bobot produksi yang lebih kecil. Kalimantan Selatan menyumbang sekitar 2,8% produksi nasional, tetapi sebagian besar wilayahnya diperkirakan berada pada kategori hujan rendah pada Oktober. Kepulauan Bangka Belitung juga berada pada tingkat kekeringan relatif tinggi dengan basis produksi yang telah melewati batas pembanding dalam matriks. Pada kedua provinsi tersebut, mitigasi tetap diperlukan terutama pada wilayah produksi yang mengalami tekanan kondisi kering, meskipun materialitasnya terhadap volume produksi nasional lebih kecil dibandingkan Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan.

Matriks juga menunjukkan bahwa **basis produksi yang besar tetapi tingkat keterpaparan kekeringan tidak tinggi**, seperti Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur yang berada pada Kuadran I. Keempatnya memiliki basis produksi besar,

tetapi tingkat kekeringan agregat provinsinya relatif lebih rendah. Riau, misalnya, menyumbang hampir seperlima produksi nasional, tetapi sebagian besar wilayahnya pada Oktober diperkirakan menerima curah hujan kategori menengah. Sumatera Utara juga mempunyai basis produksi besar dengan prakiraan Oktober–November yang didominasi hujan menengah hingga tinggi. Pada kelompok ini, pendekatan yang lebih tepat adalah **monitoring intensif dan mitigasi secara lokal**, bukan memperlakukan seluruh wilayah provinsi sebagai daerah berisiko tinggi.

Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur memperlihatkan pentingnya pendekatan tersebut. Kondisi hujan di Kalimantan Barat cukup beragam antara bagian utara dan selatan, sementara di Kalimantan Timur sejumlah wilayah seperti Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Paser, Kutai Timur, dan Penajam Paser Utara masih diperkirakan mengalami hujan rendah. Walaupun secara agregat berada pada Kuadran I, kantong-kantong produksi yang beririsan dengan kondisi kering tetap membutuhkan pemantauan dan tindakan mitigasi.

Kebutuhan mitigasi diperkirakan paling tinggi pada awal Q4. Memasuki November, wilayah dengan curah hujan rendah mulai menyusut di sejumlah sentra produksi. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur lebih banyak beralih ke kategori hujan menengah, Kalimantan Barat menerima hujan yang lebih tinggi, dan kondisi Kalimantan Selatan juga mulai membaik. Dengan demikian, **Oktober menjadi jendela utama mitigasi kondisi kering**, sementara perkembangan hujan November–Desember akan menentukan kecepatan pemulihan ketersediaan air pada masing-masing wilayah Gambar 13 (BMKG, 2026e).

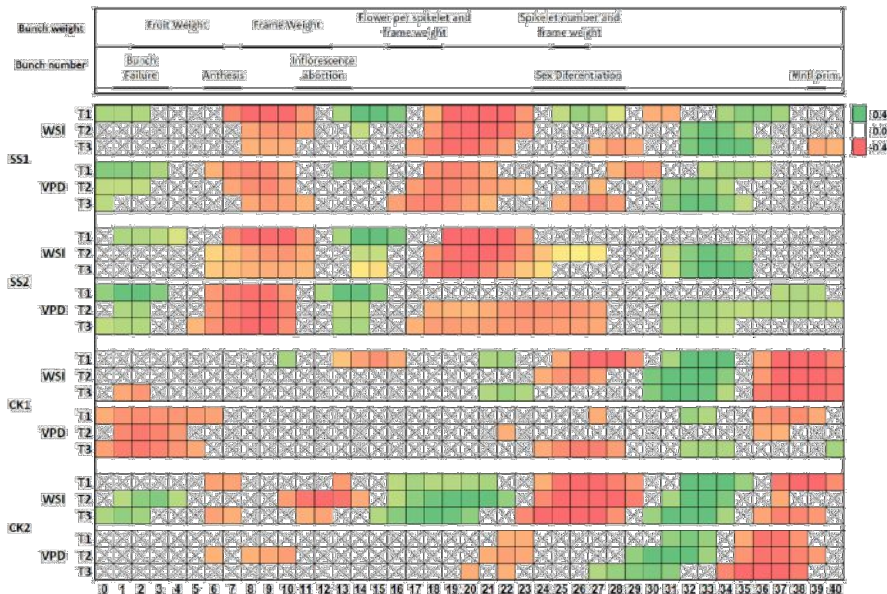
Matriks keterpaparan karena itu bukan hanya menggambarkan distribusi risiko, tetapi menjadi dasar untuk menentukan **prioritas mitigasi secara spasial**. Kuadran II memerlukan perhatian lebih besar karena menggabungkan tingkat kekeringan dan basis produksi yang relatif tinggi. Sementara itu, sentra produksi besar pada Kuadran I tetap perlu dipantau karena tekanan iklim dapat berkembang secara lokal. Pendekatan ini memungkinkan sumber daya mitigasi diarahkan

lebih proporsional sesuai dengan tingkat *hazard*, besarnya basis produksi, dan distribusi tekanan iklim di dalam masing-masing wilayah.

3.3 Implikasi Iklim terhadap Produksi dan Arah Mitigasi

Outlook produksi pada Bab 2 menunjukkan bahwa produksi minyak sawit Indonesia pada 2026 diperkirakan masih meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun kenaikannya relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tekanan iklim yang berkembang pada 2026 tidak dapat dibaca secara sederhana sebagai penurunan produksi pada periode yang sama. Produksi yang dipanen pada 2026 merupakan hasil dari proses pembentukan tandan yang telah berlangsung jauh sebelumnya, sehingga kondisi iklim pada periode sebelumnya turut menentukan potensi produksi yang tersedia pada tahun berjalan.

Hubungan tersebut sejalan dengan karakter biologis pembentukan produksi kelapa sawit. Wandri et al. (2025), berdasarkan data hasil bulanan selama 7–9 tahun dari empat percobaan pemupukan di Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah, menganalisis hubungan antara hasil TBS dengan *water stress index* (WSI) dan *vapor pressure deficit* (VPD) hingga sekitar 40 bulan sebelum panen. Analisis menunjukkan hubungan negatif antara hasil bulanan dengan tekanan air dan VPD, terutama pada periode yang berkaitan dengan *inflorescence abortion* dan *sex differentiation*. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengaruh kondisi iklim terhadap produksi dapat muncul dengan jeda yang berbeda sesuai fase perkembangan reproduktif tanaman.



Gambar 15. Hubungan Water Stress Index (WSI) dan Vapor Pressure Deficit (VPD) dengan Produksi TBS pada Berbagai Periode sebelum Panen

Sumber: Wandri et al. (2025)

Matriks pada Gambar 15 perlu dibaca sebagai hubungan antara kondisi lingkungan pada berbagai periode sebelum panen dengan hasil yang kemudian diamati, bukan sebagai kalender prediksi produksi. Sumbu waktu menunjukkan bulan sebelum hasil dipanen, sementara perbedaan pola hubungan mencerminkan bahwa sensitivitas tanaman terhadap tekanan air berubah menurut fase perkembangan tandan. Secara biologis, proses pembentukan tandan kelapa sawit berlangsung sekitar 39 bulan dari inisiasi primordia hingga panen, dengan *sex differentiation* terjadi sekitar 24–28 bulan sebelum panen dan *inflorescence abortion* sekitar 10–12 bulan sebelum panen.

Karakter tersebut sekaligus menunjukkan keterbatasan untuk menerjemahkan episode kering 2026 secara langsung menjadi angka kehilangan produksi pada 2027, 2028, atau 2029. Untuk membangun proyeksi berbasis mekanisme tersebut secara lengkap diperlukan rangkaian informasi kondisi iklim dan tanaman selama keseluruhan periode pembentukan tandan. Kondisi iklim Q4 2026 hanya merepresentasikan sebagian dari rangkaian tersebut. Oleh karena

itu, Outlook ini tidak mengkuantifikasi besarnya kehilangan produksi pada tahun-tahun berikutnya hanya berdasarkan episode El Niño 2026.

Dalam jangka pendek, peningkatan curah hujan menuju akhir Q4 memberikan ruang bagi perbaikan ketersediaan air tanaman dan berkurangnya tekanan kondisi kering pada sejumlah sentra produksi. Kondisi ini konsisten dengan outlook pada Bab 2 bahwa produksi 2026 masih memiliki ruang untuk meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagian dinamika produksi pada batas Q3 dan Q4 juga dapat berkaitan dengan perubahan distribusi waktu panen pada tandan yang telah berada pada fase akhir perkembangan.

Dalam konteks ini, kondisi kering dan kebakaran yang terjadi menjelang akhir Q3 perlu dilihat tidak hanya dari sisi ketersediaan air, tetapi juga dari kemungkinan berkurangnya penerimaan radiasi matahari akibat kabut asap. Kabut asap yang persisten dapat mengurangi cahaya yang mencapai kanopi sehingga membatasi proses fotosintesis dan pembentukan asimilat. Pada tandan yang telah berada pada fase akhir perkembangan, kombinasi tekanan air dan berkurangnya penerimaan radiasi tersebut berpotensi memperlambat pengisian dan perkembangan tandan menuju kematangan panen. Mekanisme ini dapat menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap bergesernya sebagian produksi dari akhir Q3, terutama September, ke awal Q4, meskipun besarnya pengaruh tersebut belum dapat dikuantifikasi.

Mekanisme jangka pendek tersebut perlu dibedakan dari pengaruh tekanan iklim terhadap fase reproduktif tanaman yang mempunyai jeda lebih panjang. Episode kering 2026 karena itu lebih tepat diperlakukan sebagai faktor risiko terhadap keberlanjutan momentum produksi, bukan sebagai dasar untuk menyimpulkan bahwa produksi akan turun pada tahun tertentu. Arah produksi setelah 2026 akan bergantung pada kombinasi kondisi iklim sebelum dan sesudah episode tersebut, lamanya dan intensitas tekanan air, fase perkembangan tanaman ketika tekanan terjadi, umur tanaman, kondisi tanah, serta efektivitas pengelolaan kebun. Temuan Wandri

et al. (2025) juga menunjukkan bahwa variabilitas hasil tidak semata-mata ditentukan oleh faktor iklim karena siklus produksi internal tanaman dan faktor manajemen turut memengaruhi hasil.

Atas dasar itu, mitigasi perlu dilakukan dalam dua horizon. **Mitigasi jangka pendek** terutama diarahkan untuk mempertahankan kondisi tanaman sekaligus menjaga normalitas kegiatan perkebunan selama periode kering. Prioritasnya meliputi menjaga ketersediaan air, mengurangi kehilangan air dari sistem kebun, mempertahankan kelembapan tanah, memastikan fungsi infrastruktur tata air, dan meningkatkan monitoring terhadap blok yang menunjukkan tekanan air. Pada wilayah dengan risiko kebakaran tinggi, kesiapan sumber air, *water point*, pompa dan peralatan pemadam, patroli areal rawan, perlindungan pekerja, serta pengawasan areal rentan perlu diperkuat. Pada areal gambut, pengelolaan muka air dan pembasahan menjadi semakin penting untuk mencegah kondisi lahan berkembang menjadi lebih mudah terbakar.

Kebutuhan tersebut menjadi semakin penting karena tekanan kondisi kering menjelang Q4 telah disertai peningkatan aktivitas *hotspot* di sejumlah wilayah produksi utama. Pada 7–16 September 2026, BMKG mencatat 3.177 *hotspot* dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Tengah, 1.305 di Sumatera Selatan, dan 1.088 di Kalimantan Barat. Angka tersebut tidak dapat disamakan dengan jumlah kejadian kebakaran maupun luas lahan yang terbakar, tetapi menunjukkan meningkatnya kerawanan terhadap kemunculan dan penyebaran api pada periode kering. Prakiraan BMKG juga menunjukkan bahwa risiko kemunculan titik panas pada Oktober masih relatif tinggi di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan. Kondisi ini menjadi penting karena sebagian wilayah tersebut juga merupakan sentra produksi sawit yang pada analisis keterpaparan sebelumnya menghadapi tekanan kekeringan relatif tinggi.

Dampak musim kebakaran terhadap produksi dapat berlangsung melalui beberapa jalur. Kebakaran yang menjangkau sebagian areal perkebunan dapat menyebabkan kerusakan langsung pada tanaman

dan menurunkan potensi produksi pada areal terdampak. Sementara itu, kabut asap dapat memengaruhi kondisi fisiologis tanaman melalui berkurangnya penerimaan radiasi matahari, sekaligus menyebabkan kegiatan perkebunan tidak berjalan secara normal. Kondisi asap yang berat dapat membatasi pekerjaan lapangan dan mobilitas tenaga kerja, mengganggu rotasi panen dan pengangkutan TBS, serta menimbulkan hambatan pada logistik perkebunan. Dengan demikian, pengaruh musim kebakaran terhadap produksi tidak hanya berasal dari areal yang secara langsung terdampak api, tetapi juga dari tekanan fisiologis akibat kondisi asap serta hilangnya efektivitas hari kerja dan terganggunya normalitas kegiatan panen dan operasional kebun.

Implikasinya, kesiapan menghadapi kebakaran bukan hanya merupakan bagian dari perlindungan lingkungan, tetapi juga bagian dari manajemen kontinuitas produksi. Tambahan pengeluaran untuk patroli, pemompaan dan pengelolaan air, pemeliharaan *water point*, peralatan pemadam, alat pelindung diri, serta monitoring kondisi lapangan perlu dipandang sebagai *risk-control expenditure* yang diperlukan untuk mengurangi kemungkinan gangguan produksi ketika risiko iklim dan kebakaran meningkat.

Sementara itu, **mitigasi jangka panjang** perlu diarahkan pada peningkatan ketahanan sistem produksi terhadap variabilitas iklim. Temuan empiris menunjukkan bahwa peningkatan nutrisi dapat meningkatkan produktivitas pada kondisi yang mendukung, tetapi kemampuan pemupukan untuk mengompensasi kehilangan hasil menjadi terbatas ketika air merupakan faktor pembatas utama. Karena itu, strategi adaptasi tidak dapat hanya mengandalkan peningkatan input nutrisi, tetapi perlu semakin menempatkan pengelolaan air dan konservasi kelembapan tanah sebagai bagian dari manajemen produktivitas.

Pada tanah mineral, pendekatan tersebut dapat mencakup peningkatan kemampuan tanah menyimpan air, konservasi tanah dan air terutama pada areal berlereng, pemanfaatan biomassa dan bahan organik untuk membantu mempertahankan kelembapan, serta

pengelolaan vegetasi penutup yang sesuai. Pada lahan dengan sistem tata air, termasuk gambut, strategi harus disesuaikan dengan karakteristik hidrologi setempat dan diarahkan pada pengendalian muka air serta pencegahan *over-drainage*. Dalam jangka lebih panjang, penggunaan bahan tanam yang lebih toleran terhadap defisit air, perbaikan *field upkeep*, penguatan sistem monitoring iklim-tanaman, dan pengembangan intervensi pengelolaan air menjadi bagian penting dari adaptasi.

Pengalaman 2026 juga menunjukkan perlunya sistem peringatan dan pengambilan keputusan yang lebih terintegrasi pada tingkat perkebunan. Informasi ENSO dan IOD penting sebagai indikator awal, tetapi keputusan operasional membutuhkan informasi yang lebih dekat dengan kondisi kebun, seperti curah hujan aktual, hari tanpa hujan, neraca air, kelembapan tanah, kondisi vegetatif tanaman, serta perkembangan produksi. **Pada periode kebakaran, informasi tersebut perlu dilengkapi dengan pemantauan hotspot, kejadian kebakaran di sekitar kebun, intensitas kabut asap, dan gangguan terhadap kegiatan panen maupun transportasi TBS.** Dengan menggabungkan informasi tersebut, tindakan mitigasi dapat dilakukan sebelum tekanan iklim berkembang menjadi gangguan yang lebih berat terhadap tanaman maupun kegiatan operasional.

Dalam perspektif yang lebih panjang, informasi iklim historis juga membuka peluang untuk memperkuat sistem prediksi produksi. Kerangka biologis sebagaimana ditunjukkan Wandri et al. (2025) menunjukkan bahwa kondisi lingkungan selama proses pembentukan tandan membawa informasi mengenai potensi hasil pada periode berikutnya. Namun, pengembangan model semacam itu memerlukan basis data iklim, kondisi tanaman, dan produksi yang konsisten selama beberapa tahun. Karena itu, penguatan *time-series database* pada tingkat kebun menjadi langkah penting apabila industri ingin bergerak dari sistem monitoring menuju *predictive plantation management*.

Dengan demikian, kondisi iklim Q4 2026 tidak mengubah arah utama outlook produksi pada Bab 2 bahwa produksi nasional masih

diperkirakan meningkat pada 2026. Sebaliknya, pembahasan iklim menunjukkan bahwa ruang peningkatan produksi tersebut perlu dijaga. Perbaikan hujan menuju akhir tahun memberikan ruang bagi pemulihan kondisi air, sementara meredanya kebakaran dan kabut asap dapat mendukung normalisasi kegiatan perkebunan. Hal ini juga memberikan dasar untuk melihat bahwa sebagian peningkatan produksi pada awal Q4 dapat berasal dari normalisasi kegiatan panen dan perubahan distribusi waktu panen setelah tekanan kondisi kering dan asap pada akhir Q3, bukan semata-mata dari peningkatan kapasitas produksi. Pada saat yang sama, episode kering yang telah terjadi tetap perlu dimitigasi karena sebagian respons tanaman dapat muncul setelah jeda waktu tertentu.

Tantangan iklim karena itu bukan semata-mata menentukan apakah produksi pada satu kuartal meningkat atau menurun. Tantangan yang lebih penting adalah memastikan bahwa tekanan kondisi kering dan risiko kebakaran tidak mengurangi kemampuan industri untuk meningkatkan produksi secara berkelanjutan pada periode berikutnya. Dalam situasi ketika kebutuhan domestik terhadap minyak sawit terus meningkat dan ruang ekspor semakin bergantung pada pertumbuhan pasokan, **mitigasi risiko iklim menjadi bagian dari strategi menjaga ruang tumbuh produksi nasional.**



BAB 4. OUTLOOK HARGA CPO Q4 2026

Outlook harga CPO Q4 2026 disusun untuk melihat arah pergerakan harga CPO global dan domestik pada periode Oktober hingga Desember 2026. Sebagai produk komoditas, harga CPO tidak ditentukan secara mandiri, melainkan terhubung dengan rantai nilai yang terbentuk di pasar global dan lokal secara simultan. Keterkaitan ini telah berlangsung selama puluhan tahun sejak terbentuknya pasar komoditas modern di Eropa dan Malaysia, di mana harga ditentukan melalui interaksi antara pelaku pasar, kondisi pasokan, permintaan, serta ekspektasi terhadap masa depan.

Oleh karena itu proyeksi harga dapat dilakukan menggunakan pendekatan model ARIMAX (*Autoregressive Integrated Moving Average with Exogenous Variables*), di mana model ini dapat digunakan untuk menganalisis data deret waktu yang menggunakan lebih dari satu variabel penyebab, sehingga analisis pergerakan harga CPO tidak hanya dianalisis dari pola historis harga itu sendiri, tetapi juga oleh variabel eksternal lain yang mencerminkan dinamika pasar, pasokan, permintaan, serta kebijakan.

Secara umum, *Outlook* harga CPO Q4 2026 perlu dibaca sebagai kelanjutan dari kondisi neraca sawit nasional yang semakin ketat sebagaimana yang dibahas dalam Bab 2. Di mana produksi pada Q4 mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya, tetapi konsumsi domestik meningkat akibat implementasi B50, ekspor menjadi variabel penyesuaian, dan stok akhir masih berada pada level rendah secara historis. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor fundamental yang menopang harga CPO pada Q4 2026. Namun, arah pergerakan harga tetap dipengaruhi oleh dinamika pasar yang lebih luas, termasuk perkembangan harga minyak nabati lainnya, ketersediaan stok, permintaan ekspor, serta kondisi pasar global.

4.1 Harga CPO Global

Forecast harga CPO global dalam analisis ini merujuk pada harga CPO di Bursa Malaysia Derivatives (BMD) sebagai salah satu *benchmark*

utama perdagangan internasional. Harga BMD mencerminkan harga CPO yang diperdagangkan di pasar derivatif Malaysia dan digunakan secara luas sebagai acuan pembentukan harga serta ekspektasi pasar terhadap pergerakan harga CPO internasional.

Dalam *Outlook* Q4 ini, terjadi pergeseran sentralistik data dalam mengamati harga sawit global, di mana sebelumnya menggunakan pendekatan harga CPO CIF Rotterdam namun saat ini bergeser menjadi harga Bursa Malaysia Derivatives (BMD) sebagai referensi pasar global. Hal ini sejalan dengan Mistry (2025) dalam *Price Outlook 2026* yang dipresentasikan dalam IPOC di Bali tahun lalu yang menyebutkan bahwa harga CPO *futures* BMD merupakan indikator utama dalam proyeksi harga sawit global, sementara komoditas minyak nabati lain seperti *soybean oil* menggunakan referensi CBOT futures. Hal ini sejalan dengan pandangan Thomas Mielke (2026) bahwa harga CPO CIF Rotterdam semakin kehilangan fungsi sebagai *benchmark* representatif karena perubahan struktur perdagangan global, sehingga referensi harga berbasis pasar Malaysia menjadi lebih mencerminkan aktivitas perdagangan dan price discovery minyak sawit dunia.

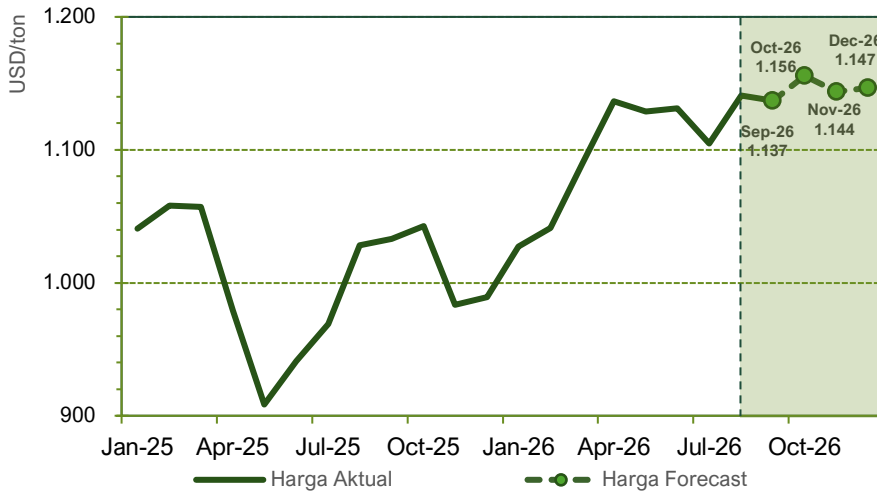
Adapun *forecast* harga CPO global pada Q4 2026 menggunakan model ARIMAX yang mempertimbangkan sejumlah variabel utama, yaitu harga CPO global (harga BMD) pada bulan sebelumnya, selain itu variabel harga minyak kedelai, volume stok akhir CPO gabungan Indonesia dan Malaysia, serta total ekspor produk sawit Indonesia. Variabel-variabel tersebut dipilih karena mewakili faktor harga historis, acuan pasar global, substitusi minyak nabati, ketersediaan pasokan, dan kapasitas *supply* untuk ekspor.

Harga CPO global (harga BMD) bulan sebelumnya digunakan untuk menangkap pola pergerakan harga dari periode sebelumnya. Hal ini penting karena harga komoditas umumnya memiliki kecenderungan untuk mengikuti tren historis dalam jangka pendek. Sementara itu, harga CPO di BMD digunakan sebagai indikator arah pasar karena mencerminkan ekspektasi pelaku pasar di Malaysia dan Asia terhadap kondisi permintaan, pasokan, dan sentimen kebijakan

regional. Harga minyak kedelai dimasukkan sebagai variabel pembanding karena merupakan salah satu minyak nabati substitusi utama bagi CPO di pasar global.

Dari sisi pasokan, stok akhir CPO di Indonesia dan Malaysia digunakan untuk mencerminkan tingkat ketersediaan minyak sawit di dua negara produsen utama. Semakin rendah stok yang tersedia, semakin besar potensi tekanan kenaikan harga. Sebab Indonesia dan Malaysia menguasai lebih dari 80% produksi minyak sawit dunia. Sementara itu, total ekspor produk sawit digunakan untuk menangkap kekuatan permintaan global. Apabila ekspor meningkat, hal tersebut dapat menunjukkan kuatnya permintaan luar negeri; sebaliknya, apabila ekspor menurun akibat keterbatasan pasokan, pasar global dapat merespons melalui penguatan harga.

Kinerja model peramalan tersebut juga dievaluasi menggunakan beberapa ukuran kesalahan peramalan, yaitu *Root Mean Squared Error* (RMSE), *Mean Absolute Error* (MAE), *Mean Percentage Error* (MPE), dan *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE). Dari hasil pemodelan yang sudah dilakukan, sebagaimana hasil peramalannya dapat dilihat pada Gambar 16, hasil evaluasi model juga menunjukkan bahwa model yang dipilih memiliki tingkat kesalahan peramalan yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan model alternatif lain yang diuji. Oleh karena itu, hasil peramalan harga sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 16 berikut memiliki Tingkat keyakinan yang dapat diandalkan.



Gambar 16. Harga CPO Global (BMD) Aktual dan *Forecast* (Q4 2026)

Sumber: GAPKI (2026), dikompilasi oleh IPOSS (2026c) dan diolah kembali oleh IPOSS

Berdasarkan hasil *forecasting*, harga CPO global (harga BMD) pada Oktober meningkat menjadi USD 1.156/ton dibandingkan posisi pada September yang berada di USD 1.137/ton. Sedangkan harga untuk periode November sedikit terkoreksi menjadi USD 1.144/ton dan relatif stabil di USD 1.147/ton pada Desember 2026. Dengan demikian, harga pada Q4 2026 diperkirakan bergerak relatif stabil pada kisaran USD 1.144–1.156/ton.

Berdasarkan model *forecasting* yang dilakukan, diketahui bahwa harga CPO global di Malaysia relatif kuat dipengaruhi oleh penyerapan CPO di pasar domestik Indonesia, terutama setelah peningkatan mandatori biodiesel B50. Hal ini terlihat dari meningkatnya harga CPO pada Oktober 2026. Namun pada bulan berikutnya, November dan Desember, harga kembali melandai dikarenakan pengaruh data stok gabungan Indonesia dan Malaysia yang diperkirakan meningkat.

Di sisi lain, kenaikan harga juga dibatasi oleh persaingan dengan minyak nabati lain. Ketika harga CPO menjadi terlalu tinggi dibandingkan dengan soybean oil, sunflower oil, atau rapeseed oil, sebagian permintaan dapat beralih ke minyak nabati alternatif.

Kombinasi faktor tersebut membuat harga CPO pada Q4 2026 berpotensi cenderung stabil.

4.2 Harga CPO Domestik

Secara umum, harga CPO domestik dan global memiliki keterkaitan yang cukup kuat. Dalam kondisi *ceteris paribus*, penguatan harga CPO di pasar global akan memberikan dorongan terhadap harga CPO domestik, demikian pula sebaliknya. Namun, transmisi harga global ke pasar domestik tidak selalu berlangsung secara langsung dan proporsional karena terdapat sejumlah faktor lain yang turut memengaruhi pembentukan harga CPO di dalam negeri.

Dalam perspektif *supply-demand*, harga domestik dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan dan kebutuhan CPO di dalam negeri, serta besarnya volume yang dapat dialokasikan ke pasar ekspor. Di sisi lain, keterkaitan dengan pasar global juga dipengaruhi oleh kebijakan yang mengubah insentif perdagangan, termasuk bea keluar (BK) dan pungutan ekspor (PE). Dengan demikian, dapat dikatakan harga CPO domestik pada “suatu periode” merupakan hasil interaksi antara harga global, keseimbangan pasokan dan permintaan domestik dan volume ekspor, serta kebijakan yang memengaruhi insentif antara penjualan ke pasar domestik.

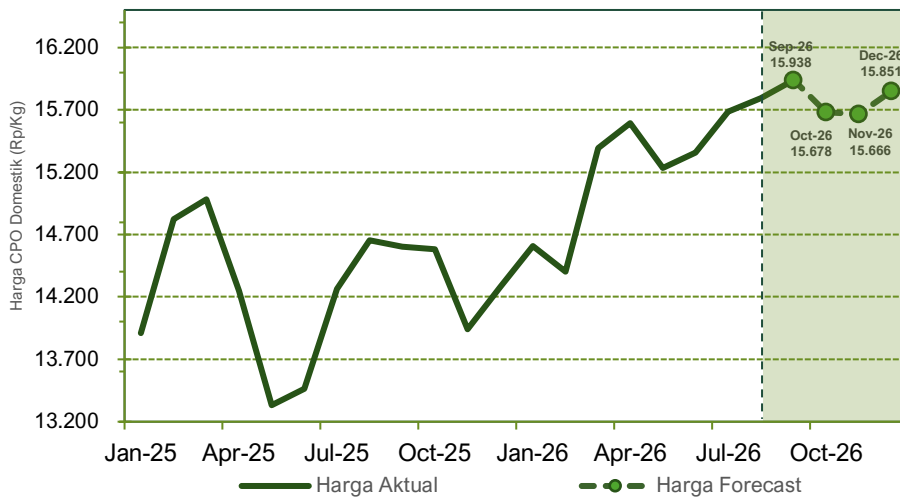
Forecast harga CPO domestik disusun menggunakan model ARIMAX dengan melibatkan variabel harga CPO domestik bulan sebelumnya, harga BMD, total konsumsi domestik CPO dan CPKO, total ekspor Indonesia, total produksi domestik CPO dan CPKO, total stok akhir, pungutan ekspor, bea keluar, dan harga referensi CPO. Variabel-variabel tersebut digunakan untuk menangkap interaksi antara harga historis, acuan pasar global, kondisi pasokan domestik, kebutuhan dalam negeri, ekspor, dan faktor kebijakan.

Harga CPO domestik bulan sebelumnya digunakan untuk menangkap pola pergerakan harga jangka pendek. Harga BMD berperan sebagai acuan eksternal yang mencerminkan arah pasar global. Dari sisi domestik, total konsumsi lokal menunjukkan kebutuhan CPO untuk pangan, oleokimia, dan biodiesel. Total ekspor mencerminkan

penyerapan CPO dan produk turunannya di pasar luar negeri, sedangkan total produksi dan stok akhir menggambarkan ketersediaan pasokan domestik.

Model juga memasukkan PE dan BK karena keduanya memengaruhi harga yang diterima atau *netback price* yang diterima eksportir. Ketika harga referensi CPO meningkat akan mengikuti kenaikan harga global, besaran PE dan BK juga dapat meningkat. Beban ekspor yang lebih tinggi akan mengurangi nilai bersih yang diterima eksportir, sehingga insentif untuk mengekspor CPO dapat melemah di sisi lain, sebagian pemrintaan domestik menguat dengan adanya program B50. Kondisi ini pada akhirnya dapat menahan kenaikan harga CPO di dalam negeri.

Berdasarkan hasil pemodelan tersebut, diperoleh hasil *forecast* terhadap harga CPO domestik, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 17. Berdasarkan hasil analisis, harga CPO domestik Oktober diperkirakan terkoreksi 260 poin di bandingkan posisi September menjadi Rp15.678/kg, dan diperkirakan pada November belum mengalami perubahan yang berarti dengan perkiraan harga sedikit lebih rendah menjadi Rp15.666/kg. Harga CPO Domestik diperkirakan akan kembali meningkat menjadi Rp15.851/kg pada Desember 2026. Dengan demikian, harga pada Q4 2026 diperkirakan relatif stagnan pada kisaran Rp15.666–15.851/kg dan belum dapat meningkat lebih jauh lagi.



Gambar 17. Harga CPO Domestik Aktual dan Forecast

Sumber: GAPKI (2026) dikompilasi IPOSS (2026c) dan diolah kembali oleh IPOSS

Pergerakan harga domestik tersebut mencerminkan adanya tekanan yang bekerja dari **dua arah**. Pertama, peningkatan kebutuhan CPO domestik, terutama untuk memenuhi mandatori biodiesel B50, dan pada saat yang sama, faktor kedua bekerja, yakni terjadinya kenaikan PE dan BK yang diakibatkan oleh meningkatnya perkiraan harga referensi CPO. Besarnya gabungan tarif PE dan BK dapat menekan *netback price* eksportir, yang akan mengurangi manfaat dari kenaikan harga ekspor. Kombinasi faktor tersebut diperkirakan membuat harga CPO domestik pada Q4 2026 cenderung bertahan pada level di bawah Rp 15.900/kg.



BAB 5. OUTLOOK PUNGUTAN EKSPOR DAN BEA KELUAR SAWIT Q4 2026

Perkembangan harga CPO tidak hanya memengaruhi penerimaan yang diperoleh pelaku usaha, tetapi juga menentukan besarnya beban ekspor melalui mekanisme Pungutan Ekspor (PE) dan Bea Keluar (BK). Kedua instrumen tersebut merupakan kebijakan pemerintah yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK), masing-masing melalui PMK Nomor 9 Tahun 2026 untuk Pungutan Ekspor dan PMK Nomor 68/PMK.010/2025 untuk Bea Keluar. Keduanya memiliki mekanisme penetapan yang berbeda. Pungutan Ekspor CPO ditetapkan sebagai persentase dari Harga Referensi, sedangkan Bea Keluar menggunakan struktur tarif berjenjang berdasarkan rentang Harga Referensi CPO.

Perbedaan mekanisme tersebut menyebabkan perubahan Harga Referensi tidak selalu menghasilkan perubahan beban ekspor secara proporsional. Selama Harga Referensi masih berada dalam rentang pos tarif yang sama, perubahan total beban ekspor terutama berasal dari perubahan PE. Namun, ketika Harga Referensi melewati batas suatu pos tarif, maka BK dapat meningkat secara *discrete* sehingga kenaikan total beban ekspor menjadi lebih besar dibandingkan perubahan Harga Referensinya.

Dalam konteks tersebut, maka *Outlook* Harga Referensi CPO menjadi *material* untuk dianalisis karena dapat memperkirakan besarnya PE dan BK yang akan dihadapi industri selama Q4 2026. Bab ini karena itu diawali dengan *Outlook* Harga Referensi CPO, dilanjutkan dengan proyeksi Pungutan Ekspor dan Bea Keluar, serta implikasi perubahan kedua instrumen tersebut terhadap beban ekspor dan dinamika pasar sawit domestik.

5.1 Outlook Harga Referensi CPO Q4 2026

Harga Referensi CPO (HR CPO) berperan penting dalam kebijakan perdagangan sawit Indonesia karena menjadi dasar penetapan

Pungutan Ekspor (PE) dan Bea Keluar (BK). Harga Referensi (HR) ditetapkan setiap bulan oleh Kementerian Perdagangan dan selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menentukan besaran PE dan BK yang berlaku pada periode tersebut.

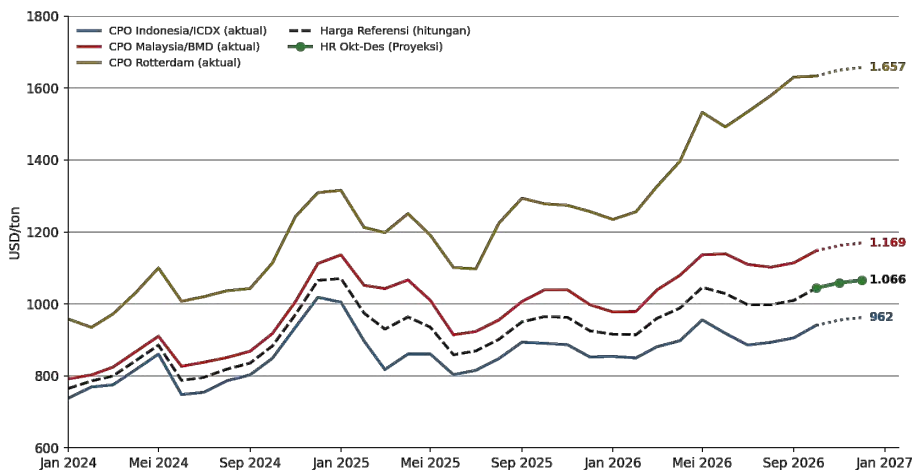
HR CPO disusun dengan memperhatikan perkembangan harga CPO pada tiga sumber harga utama, yaitu *Bursa Malaysia Derivatives* (BMD), *Indonesia Commodity and Derivatives Exchange* (ICDX), dan CIF Rotterdam. Perhitungannya menggunakan rata-rata harga pada periode pengamatan sebelum bulan berlakunya Harga Referensi. Dalam pendekatan yang digunakan pada *Outlook* ini, periode pengamatan mengikuti jendela tanggal 20 dua bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 19 bulan sebelumnya, dengan menggunakan dua harga acuan yang paling berdekatan. Dengan mekanisme tersebut, HR yang dihitung dan berlaku pada suatu bulan pada dasarnya mencerminkan perkembangan harga CPO pada periode sebelumnya.

Proyeksi Harga Referensi pada bab ini berkaitan dengan *Outlook* harga CPO global yang telah dibahas pada Bab 4. Proyeksi harga BMD pada Bab 4 memberikan gambaran mengenai arah harga CPO global, tetapi BMD hanya merupakan **salah satu sumber harga** dalam pembentukan Harga Referensi. Selain BMD, perhitungan Harga Referensi juga mempertimbangkan harga CPO pada ICDX dan CIF Rotterdam. Oleh karena itu, untuk memperkirakan Harga Referensi, perkembangan ketiga sumber harga tersebut perlu diproyeksikan sesuai dengan periode pengamatan yang digunakan dalam mekanisme perhitungan HR CPO.

Karakter tersebut juga menyebabkan periode HR CPO tidak sepenuhnya berimpit dengan periode harga pasar yang sedang berjalan. Di mana HR yang ditetapkan untuk suatu periode, sebenarnya mencerminkan situasi kondisi harga pasar yang terjadi pada periode sebelumnya. Oleh karena itu, perbedaan waktu ini penting diperhatikan karena tidak dapat dibandingkan *Outlook* harga CPO pada Bab 4 dengan *Outlook* Harga Referensi pada periode yang sama.

Pendekatan peramalan Harga Referensi pada *Outlook* Q4 disempurnakan berdasarkan evaluasi terhadap proyeksi *Outlook* Q3, terutama untuk menyesuaikan metode peramalan dengan horizon proyeksi yang relatif pendek dan karakter periode pengamatan Harga Referensi. Dalam *Outlook* Q4, proyeksi HR CPO disusun dengan memperhatikan perkembangan historis harga pada ketiga sumber harga yang digunakan.

Berdasarkan pendekatan tersebut, HR CPO pada awal Q4 menunjukkan peningkatan dibandingkan akhir Q3. Harga Referensi Oktober 2026 ditetapkan sebesar USD1.042,2 per ton, meningkat dari USD1.007,5 per ton pada September 2026. Dalam konteks penentuan tarif BK, peningkatan tersebut material, karena walaupun hanya naik 3,4%, tetapi HR telah melewati bracket pos tarif memasuki pos tarif IX yakni pada rentang harga USD1.030 – 1.080 per ton. HR CPO diperkirakan tidak turun hingga Desember, dengan perkiraan sebesar **USD1.058,7 per ton** pada November dan **USD1.065,7 per ton** pada Desember 2026. Sebagaimana dapat dilihat pada Gambar berikut.



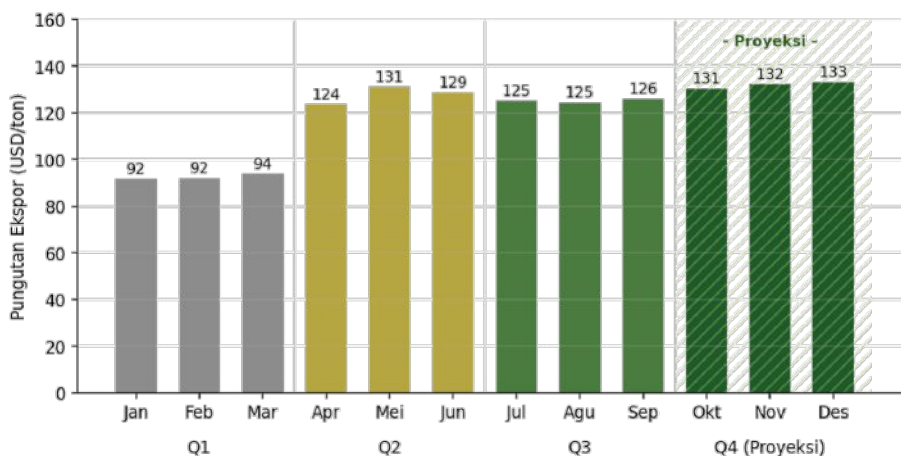
Gambar 18. Forecasting Harga Tiga Bursa dan Harga Referensi Q4 2026
Sumber: IPOSS (2026b), diolah kembali

Pergerakan HR CPO sepanjang Q4 selanjutnya akan menentukan besarnya tarif PE dan BK yang akan berlaku. Meskipun kenaikan HR yang diproyeksikan relatif terbatas, tetapi dampaknya terhadap total

beban ekspor menjadi penting untuk diperhatikan. Pembahasan tersebut menjadi fokus pada bagian berikutnya.

5.2 Outlook Pungutan Ekspor Q4 2026

Pungutan Ekspor CPO dihitung berdasarkan persentase tertentu dari Harga Referensi. Dengan mengacu pada PMK Nomor 9 Tahun 2026, Pungutan Ekspor CPO pada periode ini ditetapkan sebesar **12,5% dari Harga Referensi**. Dengan mekanisme tersebut, perubahan Harga Referensi secara langsung memengaruhi besarnya Pungutan Ekspor yang dikenakan.



Gambar 19. Pungutan Ekspor CPO Q1 - Q4 Tahun 2026

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No. 9 Tahun 2026 (2026), diolah kembali oleh IPOSS

Sejalan dengan perkembangan Harga Referensi, Pungutan Ekspor CPO pada Q4 2026 diperkirakan berada pada kisaran USD130–133 per ton. Pada Oktober 2026, Pungutan Ekspor ditetapkan sebesar USD130,27 per ton, meningkat dari USD125,94 per ton pada September karena naiknya HR CPO Oktober. Selanjutnya, tarif PE CPO diperkirakan meningkat menjadi USD132,34 per ton pada November dan USD133,22 per ton pada Desember 2026.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan Pungutan Ekspor sepanjang Q4 relatif terbatas karena mengikuti perubahan Harga Referensi secara proporsional. Dari Oktober hingga Desember,

PE hanya meningkat sekitar USD2,95 per ton, sejalan dengan proyeksi Harga Referensi yang juga bergerak naik secara terbatas. Dengan demikian, perubahan PE sendiri tidak menunjukkan lonjakan beban ekspor yang besar sepanjang Q4.

Meningkatnya tarif PE CPO dan produk turunannya dibandingkan bulan sebelumnya akan memengaruhi struktur harga domestik karena PE merupakan salah satu komponen biaya yang mengurangi nilai bersih yang diperoleh dari kegiatan ekspor. Peningkatan PE akan menurunkan *export netback* dan pada akhirnya dapat membatasi transmisi kenaikan harga CPO internasional ke pasar domestik. Pengaruh tersebut menjadi semakin penting ketika PE dikombinasikan dengan BK yang juga menjadi komponen biaya dalam kegiatan ekspor.

Namun, di sisi lain, PE merupakan salah satu sumber utama penerimaan dana yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dari sektor kelapa sawit. Dana tersebut memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan berbagai program strategis industri sawit, terutama program biodiesel. Ketersediaan dana BPDP menjadi penting untuk mendukung pembiayaan selisih antara harga biodiesel dan harga BBM Solar ketika harga biodiesel berada pada tingkat yang lebih tinggi. Selain biodiesel, dana tersebut juga digunakan untuk mendukung program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), bantuan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia pekebun, beasiswa, grand riset kelapa sawit, serta berbagai program pengembangan industri sawit lainnya.

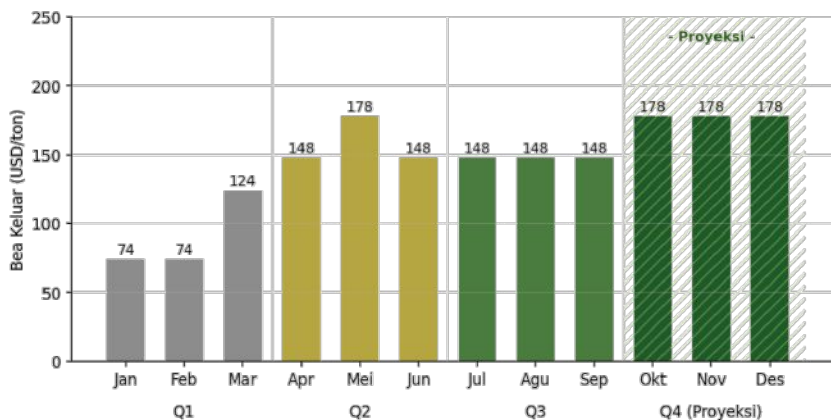
Dengan demikian, PE memiliki **dua fungsi ekonomi yang berjalan secara bersamaan**. Dari sisi perdagangan, PE meningkatkan beban ekspor dan memengaruhi *export netback*. Dari sisi kebijakan industri, PE menyediakan sumber pembiayaan bagi berbagai program strategis sektor sawit. Keseimbangan antara kedua fungsi tersebut menjadi semakin penting ketika kebutuhan pembiayaan program biodiesel meningkat sejalan dengan implementasi mandatori B50.

5.3 Outlook Bea Keluar Q4 2026

Bea Keluar CPO dikenakan berdasarkan struktur tarif progresif yang mengikuti tingkat HR CPO. Besaran tarifnya ditetapkan melalui PMK Nomor 68 Tahun 2025 dengan menggunakan sistem *bracket* berdasarkan rentang HR CPO sebesar USD50 per ton. Berbeda dengan PE yang berubah secara proporsional mengikuti HR CPO, tarif BK bersifat tetap selama HR CPO masih berada dalam *bracket* harga yang sama.

Sebagai contoh, ketika HR CPO berada pada rentang **USD930–980 per ton**, tarif BK CPO ditetapkan sebesar **USD124 per ton**. Namun, ketika HR CPO melewati batas atas rentang tersebut dan masuk ke *bracket* berikutnya, tarif BK meningkat menjadi **USD148 per ton**. Dengan demikian, perubahan HR CPO yang relatif kecil di sekitar batas antar-*bracket* dapat menghasilkan kenaikan tarif BK yang relatif besar.

Karakteristik tersebut menyebabkan proyeksi HR CPO menjadi penting bagi industri untuk memperkirakan posisi tarif BK yang kemungkinan berlaku pada periode berikutnya. Hal ini terutama relevan ketika proyeksi HR CPO berada mendekati batas antar-*bracket*, karena perubahan harga yang relatif kecil dapat mengubah besarnya beban ekspor secara signifikan.



Gambar 20. Bea Keluar CPO Q1 - Q4 Tahun 2026

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No. 68 Tahun 2025 (2025), diolah kembali oleh IPOSS

Berdasarkan perkembangan dan proyeksi HR CPO, Bea Keluar CPO pada Q4 2026 diperkirakan berada satu pos tarif lebih tinggi dibandingkan September 2026 dan bertahan pada level tersebut sepanjang Q4.

Pada Oktober 2026, HR CPO ditetapkan sebesar USD1.042,15 per ton. Tingkat harga tersebut telah melampaui batas atas Pos Tarif VIII dan masuk ke Pos Tarif IX, yaitu *bracket* HR CPO antara USD1.030–1.080 per ton. Dengan perubahan posisi tersebut, Bea Keluar CPO meningkat dari USD148 per ton pada September menjadi USD178 per ton pada Oktober, atau naik sebesar USD30 per ton.

Pada November dan Desember 2026, HR CPO diproyeksikan masing-masing sebesar USD1.059 dan USD1.066 per ton. Kedua nilai tersebut masih berada dalam rentang Pos Tarif IX, sehingga Bea Keluar CPO diperkirakan tetap sebesar USD178 per ton hingga akhir tahun.

Perkembangan ini menunjukkan karakter penting dari mekanisme Bea Keluar. Kenaikan HR CPO tidak selalu diikuti kenaikan BK secara bertahap. Ketika HR masih berada dalam *bracket* yang sama, BK tidak berubah. Namun, ketika HR melewati batas antar-*bracket*, kenaikan tarif dapat terjadi secara diskrit dan menghasilkan tambahan beban ekspor yang jauh lebih besar dibandingkan perubahan PE pada periode yang sama.

5.4 Integrasi Proyeksi PE dan BK Q4 2026

Integrasi antara Harga Referensi, Pungutan Ekspor, dan Bea Keluar menunjukkan bahwa total beban ekspor CPO pada Q4 2026 berada pada level yang relatif tinggi dan cenderung stabil setelah mengalami kenaikan pada awal kuartal. Pada Oktober 2026, HR CPO ditetapkan sebesar USD1.042,15 per ton, dengan PE sebesar USD130,27 per ton dan BK sebesar USD178 per ton, sehingga total PE dan BK mencapai USD308,27 per ton. Nilai tersebut meningkat cukup tajam dibandingkan September 2026 yang sebesar USD273,94 per ton.

Pada November 2026, HR CPO diproyeksikan meningkat menjadi USD1.058,68 per ton, dengan PE sebesar USD132,34 per ton dan BK tetap sebesar USD178 per ton, sehingga total PE dan BK diperkirakan mencapai USD310,34 per ton. Pada Desember 2026, HR CPO diproyeksikan sebesar USD1.065,74 per ton, dengan PE sebesar USD133,22 per ton dan BK tetap sebesar USD178 per ton, sehingga total beban ekspor mencapai USD311,22 per ton.

Tabel 1. Proyeksi Total Pungutan Ekspor dan Bea Keluar CPO pada Q4 2026 (USD/ton)

Periode	Proyeksi HR CPO	Pungutan Ekspor (PE)	Bea Keluar (BK)	Total PE + BK
September 2026	1.007,5	125,94	148 (Pos VIII)	273,94
Oktober 2026	1.042,2	130,27	178 (Pos IX)	308,27
November 2026	1.058,7	132,34	178 (Pos IX)	310,34
Desember 2026	1.065,7	133,22	178 (Pos IX)	311,22

Sumber: Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 1777 Tahun 2026 (2026), Peraturan Menteri Keuangan No. 68 Tahun 2025 (2025), Peraturan Menteri Keuangan No. 9 Tahun 2026 (2026), dan diproyeksikan oleh IPOSS (2026b)

Perubahan dari September ke Oktober memperlihatkan karakter yang berbeda antara PE dan BK. HR CPO meningkat sebesar USD34,64 per ton atau sekitar 3,4%, yang menyebabkan PE meningkat secara proporsional sebesar USD4,33 per ton. Namun, kenaikan HR tersebut sekaligus membawa CPO dari Pos Tarif VIII ke Pos Tarif IX, sehingga BK meningkat sebesar USD30 per ton. Akibatnya, total PE dan BK meningkat sebesar USD34,33 per ton atau sekitar 12,5%, jauh lebih tinggi secara persentase dibandingkan kenaikan HR CPO.

Setelah memasuki Pos Tarif IX pada Oktober, kenaikan HR CPO yang diproyeksikan pada November dan Desember tidak lagi menghasilkan perubahan BK karena HR masih berada pada *bracket* yang sama, yaitu di atas USD1.030 hingga USD1.080 per ton. Dengan demikian, total PE dan BK hanya meningkat secara terbatas dari

USD308,27 per ton pada Oktober menjadi USD311,22 per ton pada Desember, terutama akibat kenaikan PE yang mengikuti HR CPO. Struktur *bracket* dan tarif BK untuk CPO dan produk turunannya tersebut ditetapkan dalam PMK Nomor 68 Tahun 2025.

5.5 Proyeksi PE dan BK dan Insentif Hilirisasi

Meskipun CPO merupakan acuan utama dalam melihat perkembangan PE dan BK, dampak kedua instrumen tersebut terhadap industri sawit tidak cukup dinilai hanya dari CPO. Struktur tarif yang berlaku mencakup berbagai produk mulai dari bahan baku dan produk primer hingga produk hasil pengolahan lebih lanjut. Masing-masing kelompok produk memiliki tarif PE dan BK yang berbeda, sehingga perubahan HR CPO dapat menghasilkan beban ekspor yang berbeda pula pada setiap produk.

Perbedaan tersebut terutama berasal dari desain kedua instrumen. Dalam PMK Nomor 9 Tahun 2026, sebagian produk dikenakan PE dalam nilai nominal tetap, sedangkan produk lainnya dikenakan berdasarkan persentase HR CPO. CPO dan sejumlah produk dalam Kelompok II dikenakan PE sebesar 12,5% dari HR CPO, produk Kelompok III sebesar 12%, produk Kelompok IV sebesar 10%, dan produk Kelompok V sebesar 7,25%.

Pada saat yang sama, BK ditetapkan secara berbeda untuk masing-masing jenis produk pada setiap pos tarif. Karena HR CPO Oktober serta proyeksi November dan Desember seluruhnya masih berada dalam **Pos Tarif IX**, tarif BK masing-masing produk diperkirakan tidak berubah sepanjang Q4. Perubahan total beban ekspor selama periode tersebut terutama berasal dari perubahan PE untuk produk yang punggutannya dihitung sebagai persentase dari HR CPO.

Untuk melihat implikasi kedua instrumen tersebut secara lebih utuh, proyeksi PE dan BK perlu dilihat di sepanjang rantai produk sawit. Perbandingan ini sekaligus memberikan gambaran mengenai bagaimana struktur tarif membedakan beban ekspor antara CPO, produk fraksinasi, produk *refined*, produk kemasan, hingga biodiesel,

serta implikasinya terhadap insentif pengolahan lebih lanjut di dalam negeri.

Tabel 2. Proyeksi Pungutan Ekspor dan Bea Keluar Produk Kelapa Sawit dan Turunannya Q4 2026 (USD/ton)

Nama Produk	HS Code	Oktober			November			Desember		
		PE	BK	PE+BK	PE	BK	PE+BK	PE	BK	PE+BK
Tandan Buah Segar	1207.99.50	0	171	171	0	171	171	0	171	171
Inti Sawit / Palm Kernel	1207.10.10; 1207.10.30; 1207.10.90	25	151	176	25	151	176	25	151	176
Bungkil Inti Sawit / PKM	ex 2306.60.10; ex 2306.60.90	30	12	42	30	12	42	30	12	42
Tandan Kosong Kelapa Sawit	1404.90.92	15	21	36	15	21	36	15	21	36
Cangkang Kernel Sawit	1404.90.91	5	10	15	5	10	15	5	10	15
Crude Palm Oil (CPO)	1511.10.00	130,27	178	308,27	132,34	178	310,34	133,22	178	311,22
Crude Palm Kernel Oil (CPKO)	1513.21.10	130,27	224	354,27	132,34	224	356,34	133,22	224	357,22
Palm Oil Mill Effluent Oil	ex 2306.60.90 ex 2306.90.90	130,27	178	308,27	132,34	178	310,34	133,22	178	311,22
High Acid Palm Oil Residue	ex 2306.60.90 ex 2306.90.90	130,27	178	308,27	132,34	178	310,34	133,22	178	311,22
Crude Palm Olein	1511.90.42; 1511.90.49	125,06	99	224,06	127,04	99	226,04	127,89	99	226,89
Crude Palm Stearin	1511.90.41	125,06	88	213,06	127,04	88	215,04	127,89	88	215,89
Crude Palm Kernel Olein	1513.29.13	125,06	124	249,06	127,04	124	251,04	127,89	124	251,89
Crude Palm Kernel Stearin	1513.29.11	125,06	124	249,06	127,04	124	251,04	127,89	124	251,89
PFAD	3823.19.20	125,06	81	206,06	127,04	81	208,04	127,89	81	208,89
PKFAD	3823.19.30	125,06	81	206,06	127,04	81	208,04	127,89	81	208,89

Nama Produk	HS Code	Oktober			November			Desember		
		PE	BK	PE+BK	PE	BK	PE+BK	PE	BK	PE+BK
Split Fatty Acid CPO/CPKO/fraksi mentah	ex 3823.19.90	125,06	184	309,06	127,04	184	311,04	127,89	184	311,89
SPFAD	ex 3823.19.90	125,06	128	253,06	127,04	128	255,04	127,89	128	255,89
SPKFAD	ex 3823.19.90	125,06	241	366,06	127,04	241	368,04	127,89	241	368,89
RBD Palm Olein	1511.90.36; 1511.90.37; 1511.90.39.	104,22	104	208,22	105,87	104	209,87	106,57	104	210,57
RBD Palm Oil	1511.90.20	104,22	91	195,22	105,87	91	196,87	106,57	91	197,57
RBD Palm Stearin	1511.90.31; 1511.90.32.	104,22	84	188,22	105,87	84	189,87	106,57	84	190,57
RBD Palm Kernel Oil	1513.29.95	104,22	117	221,22	105,87	117	222,87	106,57	117	223,57
RBD Palm Kernel Olein	1513.29.94	104,22	105	209,22	105,87	105	210,87	106,57	105	211,57
RBD Palm Kernel Stearin	1513.29.91	104,22	139	243,22	105,87	139	244,87	106,57	139	245,57
RBD Palm Olein bermerek ≤25 kg	ex 1511.90.36	75,56	48	123,56	76,75	48	124,75	77,27	48	125,27
Biodiesel FAME	3826.00.21; 3826.00.22; ex 3826.00.90	75,56	37	112,56	76,75	37	113,75	77,27	37	114,27

Sumber: Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 1777 Tahun 2026 (2026), Peraturan Menteri Keuangan No. 68 Tahun 2025 (2025), Peraturan Menteri Keuangan No. 9 Tahun 2026 (2026), dan diproyeksikan oleh IPOSS (2026b)

Catatan: HR CPO Oktober 2026 sebesar USD1.042,15/ton merupakan realisasi, sedangkan HR November sebesar USD1.058,68/ton dan Desember sebesar USD1.065,74/ton merupakan proyeksi. Ketiganya berada pada Pos Tarif IX BK.

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa beban PE dan BK berbeda cukup lebar antarproduk. Pada Oktober 2026, misalnya, CPO menghadapi total PE dan BK sebesar USD308,27 per ton, sedangkan *Crude Palm Olein* sebesar USD224,06 per ton dan RBD Palm Olein sebesar USD208,22 per ton. Untuk RBD Palm Olein dalam kemasan bermerek dengan berat netto tidak lebih dari 25 kg, total beban turun menjadi USD123,56 per ton, sedangkan biodiesel sebesar USD112,56 per ton.

Perbedaan tersebut memperlihatkan adanya diferensiasi beban ekspor menurut jenis dan tingkat pengolahan produk. Secara umum, beberapa produk hasil pengolahan lebih lanjut menghadapi kombinasi PE dan BK yang lebih rendah dibandingkan CPO mentah. Struktur ini konsisten dengan desain tarif yang membedakan beban ekspor menurut kelompok produk, meskipun pola penurunannya tidak selalu linear karena besarnya BK juga berbeda untuk setiap jenis produk.

Dari perspektif industri, diferensiasi tersebut penting karena PE dan BK tidak hanya menentukan besarnya penerimaan negara dan dana perkebunan, tetapi juga memengaruhi harga relatif dan *export netback* antarproduk. Perbedaan beban antara CPO, produk fraksinasi, produk *refined*, produk kemasan, dan biodiesel dapat memengaruhi insentif ekonomi untuk melakukan pengolahan lebih lanjut sebelum produk dipasarkan ke luar negeri. Dengan demikian, analisis PE dan BK perlu dilihat tidak hanya dari besarnya beban pada CPO, tetapi juga dari struktur tarif di sepanjang rantai hilirisasi sawit.

Dalam konteks Q4 2026, struktur tersebut bekerja bersamaan dengan meningkatnya kebutuhan CPO domestik setelah implementasi B50 dan kondisi stok yang relatif terbatas. Tingginya PE dan BK pada produk hulu dapat membatasi *export netback*, sementara struktur tarif yang lebih rendah pada sejumlah produk hilir memberikan insentif relatif bagi peningkatan nilai tambah di dalam negeri. Pada saat yang sama, PE tetap memiliki fungsi penting sebagai sumber pembiayaan berbagai program strategis sektor sawit. Oleh karena itu, perkembangan PE dan BK perlu dilihat secara seimbang dari sisi penerimaan, daya saing ekspor, transmisi harga, kebutuhan pasar domestik, dan insentif hilirisasi.

5.6 PE dan BK dalam Menjaga Keseimbangan Ekonomi Industri Sawit

Pungutan Ekspor dan Bea Keluar memang dapat dilihat terutama sebagai tambahan beban terhadap produk sawit yang dipasarkan ke luar negeri. Dalam perspektif ekonomi perdagangan, pandangan

tersebut cukup relevan karena kedua instrumen mengurangi nilai bersih yang dapat diperoleh dari ekspor dan memengaruhi pembentukan harga domestik. Namun, melihat PE dan BK semata-mata sebagai beban ekspor belum menggambarkan keseluruhan fungsi ekonominya. Kedua instrumen memiliki tujuan dan mekanisme yang berbeda, serta berinteraksi dengan struktur pasar sawit domestik.

Bea Keluar pada dasarnya merupakan instrumen fiskal dan perdagangan. Struktur tarifnya yang meningkat mengikuti kenaikan Harga Referensi menyebabkan sebagian manfaat dari tingginya harga komoditas menjadi penerimaan negara, sekaligus memengaruhi insentif relatif antara ekspor bahan mentah dan produk hasil pengolahan. Diferensiasi tarif antarproduk sebagaimana dibahas pada bagian sebelumnya juga memberikan insentif relatif bagi peningkatan pengolahan dan nilai tambah di dalam negeri.

Sedangkan **Pungutan Ekspor memiliki dimensi yang berbeda karena penerimaannya kembali digunakan untuk membiayai berbagai program pengembangan industri sawit.** Dana tersebut antara lain mendukung pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi, peremajaan perkebunan, sarana dan prasarana, serta program biodiesel. Dengan demikian, PE tidak hanya bekerja pada sisi ekspor, tetapi juga menjadi bagian dari mekanisme pembiayaan kebijakan yang memengaruhi permintaan dan pengembangan industri sawit di dalam negeri.

Fungsi tersebut menjadi semakin penting dalam konteks program biodiesel. Program biodiesel telah menciptakan pasar domestik yang besar bagi minyak sawit dan meningkatkan penyerapan CPO di dalam negeri. Besarnya penyerapan tersebut sekaligus dapat berfungsi sebagai **bantalan permintaan bagi pasar CPO domestik.** Ketika harga CPO global mengalami penurunan, tekanan terhadap pasar domestik dapat diredam karena sebagian produksi tetap terserap oleh kebutuhan biodiesel dengan harga yang cenderung stabil dan tidak seluruhnya bergantung pada pasar ekspor.

Mekanisme ini juga didukung oleh sistem penetapan Harga Indeks Pasar (HIP) Biodiesel yang berlaku untuk periode bulanan, sehingga memberikan kepastian harga dalam transaksi biodiesel selama periode tersebut. Dalam pelaksanaannya, apabila terdapat selisih antara HIP Biodiesel dan harga bahan bakar minyak jenis solar yang menjadi acuannya, dana yang antara lain bersumber dari PE digunakan untuk membiayai selisih tersebut. Dengan demikian, PE tidak hanya berfungsi sebagai pungutan atas ekspor, tetapi juga menjadi salah satu sumber pembiayaan yang memungkinkan program biodiesel mempertahankan penyerapan CPO di pasar domestik.

Dari perspektif pasar CPO, mekanisme tersebut memperlihatkan **dua sisi pengaruh PE**. Pada satu sisi, PE menjadi bagian dari beban ekspor yang mengurangi *export netback*. Namun, pada sisi lain, penerimaan PE yang digunakan untuk mendukung program biodiesel turut mempertahankan permintaan CPO domestik dalam volume yang besar. Pada 2026, konsumsi CPO untuk biodiesel diproyeksikan mencapai sekitar **15,3 juta ton**, atau lebih dari separuh konsumsi minyak sawit domestik. Oleh karena itu, pengaruh ekonomi PE tidak cukup dinilai hanya dari besarnya pungutan yang dikenakan terhadap setiap ton produk yang diekspor.

Dalam kerangka tersebut, wacana penghapusan PE yang pernah muncul dari sebagian kalangan pekebun, terutama pada periode awal penerapan kebijakan, juga perlu dilihat dalam perspektif yang lebih luas. Penghapusan PE tidak serta-merta berarti seluruh nilai pungutan tersebut akan ditransmisikan menjadi tambahan harga yang diterima produsen. Dampaknya akan sangat bergantung pada bagaimana program-program yang selama ini dibiayai dari PE, terutama biodiesel, memperoleh sumber pembiayaan pengganti. Apabila penghapusan PE mengurangi kemampuan pembiayaan program biodiesel tanpa tersedia sumber pendanaan alternatif yang memadai, kapasitas program tersebut dalam mempertahankan penyerapan CPO domestik juga dapat terpengaruh.

Penurunan penyerapan domestik dalam skala besar pada akhirnya akan meningkatkan volume CPO yang harus dialihkan ke pasar

ekspor. Tambahan pasokan tersebut belum tentu dapat sepenuhnya diserap oleh permintaan global pada tingkat harga yang sama, sehingga berpotensi menimbulkan tekanan terhadap harga CPO.

Dengan demikian, hubungan antara PE dan harga CPO bekerja melalui **dua mekanisme yang berlawanan tetapi saling berkaitan**: PE pada satu sisi menambah beban ekspor dan menekan *export netback*, tetapi pada sisi lain menjadi sumber pembiayaan yang membantu mempertahankan permintaan domestik melalui program biodiesel. Karena itu, evaluasi terhadap PE perlu mempertimbangkan kedua sisi tersebut secara bersamaan, bukan semata-mata melihat besarnya pungutan terhadap ekspor.



BAB 6. KONTRIBUSI SAWIT DALAM PEREKONOMIAN

Perubahan keseimbangan industri sawit pada 2026 tidak hanya berimplikasi terhadap produksi, konsumsi domestik, ekspor, dan harga, tetapi juga terhadap kontribusinya dalam perekonomian Indonesia. Peningkatan penyerapan domestik, terutama melalui mandatori B50, membuat sebagian nilai ekonomi yang sebelumnya lebih banyak direalisasikan melalui ekspor semakin bergeser ke dalam negeri melalui substitusi impor energi, pengolahan CPO, dan penciptaan nilai tambah. Pada saat yang sama, ekspor tetap berperan penting sebagai sumber devisa dan penopang neraca perdagangan. Bab ini membahas perubahan tersebut untuk melihat bagaimana keseimbangan baru antara pasar domestik dan ekspor memengaruhi kontribusi sawit terhadap perekonomian Indonesia.

6.1 Kontribusi Sawit terhadap Neraca Perdagangan

Kinerja neraca perdagangan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kemampuan ekspor menghasilkan penerimaan dari luar negeri, tetapi juga oleh besarnya kebutuhan untuk membiayai impor. Dalam struktur tersebut, sawit memiliki posisi penting sebagai salah satu sumber ekspor nonmigas terbesar, sementara Indonesia masih menghadapi tekanan dari defisit perdagangan migas. Ketika kebutuhan devisa untuk energi meningkat, kemampuan sektor nonmigas menghasilkan surplus menjadi semakin penting untuk menjaga keseimbangan perdagangan.

Peran tersebut terlihat dari perkembangan nilai ekspor produk sawit dan turunannya yang mencapai USD18,60 miliar pada 2015, meningkat menjadi USD37,07 miliar pada 2025, dan telah mencapai USD19,45 miliar pada Semester I 2026. Besarnya nilai ini menunjukkan bahwa sawit bukan hanya menghasilkan penerimaan ekspor yang besar, tetapi juga menjadi salah satu sumber utama penerimaan eksternal yang dapat mengimbangi tekanan dari sisi impor.

Tabel 3. Kontribusi Sawit Terhadap Neraca Perdagangan Indonesia, 2015–Semester I 2026

Uraian (Miliar USD)	2015	2020	2022	2024	2025	2026
						Jan-Jun
Nilai Ekspor Sawit & Turunannya	18,60	23,00	39,01	28,33	37,07	19,45
Penghematan Impor Solar dari Mandatori Biodiesel	0,29	2,64	8,34	7,86	8,08	4,24
Total Kontribusi Sawit	18,89	25,64	47,35	36,19	45,15	23,69
Neraca Perdagangan Migas Indonesia						
Tanpa Kontribusi Mandatori Biodiesel	-6,19	-8,64	-32,73	-28,26	-27,78	-20,01
Dengan Kontribusi Mandatori Biodiesel	-5,90	-6,00	-24,39	-20,40	-19,70	-15,77
Neraca Perdagangan Non-Migas Indonesia						
Tanpa Kontribusi Ekspor Sawit & Turunannya	-5,00	4,70	39,84	23,11	23,68	-0,11
Dengan Kontribusi Ekspor Sawit & Turunannya	13,60	27,70	78,85	51,44	60,75	19,34
Neraca Perdagangan Indonesia						
Tanpa Kontribusi Sawit	-11,19	-3,94	7,11	-5,15	-4,10	-20,12
Dengan Kontribusi Sawit	7,70	21,70	54,46	31,04	41,05	3,57

Sumber: BPS (2026b, 2026a), Kementerian ESDM (2026), PASPI (2026), diolah kembali oleh IPOSS

Besarnya peran tersebut terlihat lebih jelas melalui pendekatan *counterfactual*. Pada Semester I 2026, neraca perdagangan nonmigas mencatat surplus USD19,34 miliar. Jika nilai ekspor sawit dan turunannya sebesar USD19,45 miliar dikeluarkan dari perhitungan, posisi tersebut berubah menjadi defisit sekitar USD110 juta. Artinya, tanpa ekspor produk sawit, surplus nonmigas yang menjadi penyangga neraca perdagangan praktis tidak terbentuk. Pada 2025, surplus nonmigas sebesar USD60,75 miliar dapat turun menjadi sekitar USD23,68 miliar apabila ekspor produk sawit dan turunannya dikeluarkan. Ini menunjukkan bahwa sawit bukan sekadar salah satu komoditas dengan nilai ekspor besar, tetapi memiliki bobot yang nyata terhadap kapasitas Indonesia menghasilkan surplus perdagangan.

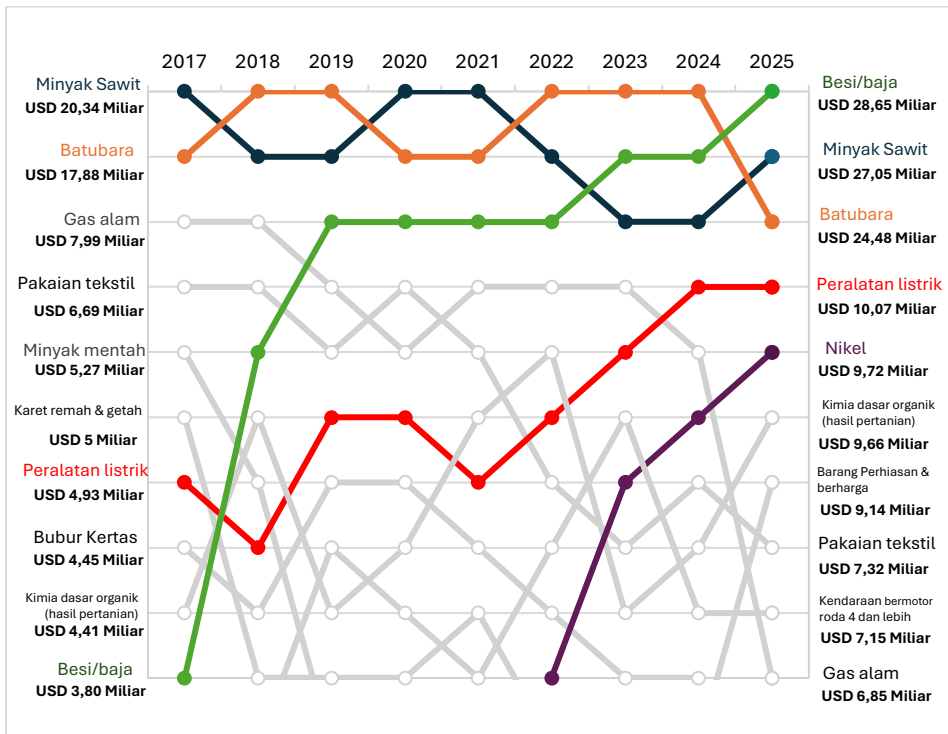
Signifikansi tersebut semakin besar ketika ditempatkan dalam konteks defisit migas. Neraca perdagangan migas mencatat defisit USD19,70 miliar pada 2025 dan USD15,77 miliar pada Semester I 2026. Artinya, surplus nonmigas harus bekerja untuk menutup sebagian besar tekanan yang berasal dari kebutuhan impor energi. Dalam situasi seperti ini, setiap sumber surplus nonmigas menjadi strategis, dan besarnya ekspor sawit memberikan ruang penyangga yang penting bagi neraca perdagangan secara keseluruhan.

Pada saat yang sama, pemanfaatan sawit untuk biodiesel memberikan manfaat dari sisi yang berbeda. Pada 2025, mandatori biodiesel diperkirakan menghemat impor solar sekitar USD8,08 miliar, sementara pada Semester I 2026 penghematannya mencapai sekitar USD4,24 miliar. Nilai tersebut tidak muncul sebagai tambahan ekspor, tetapi sebagai devisa yang tidak perlu dikeluarkan untuk membeli solar dari luar negeri. Karena itu, manfaat sawit terhadap neraca perdagangan tidak berhenti pada kemampuannya menghasilkan penerimaan ekspor. Sebagian CPO yang digunakan di dalam negeri juga membantu mengurangi kebutuhan impor energi dan menahan tekanan defisit migas.

Dua mekanisme tersebut menunjukkan pentingnya sawit dalam neraca perdagangan dari sisi yang berbeda. Ekspor sawit dan turunannya menyediakan penerimaan dari pasar internasional, sementara pemanfaatan CPO untuk biodiesel membantu mengurangi pengeluaran devisa untuk impor energi. Pada saat defisit migas masih besar, kedua kanal tersebut menjadi semakin relevan bagi ketahanan neraca perdagangan Indonesia.

Posisi strategis sawit juga terlihat ketika dibandingkan dengan komoditas ekspor utama lainnya. Struktur komoditas ekspor Indonesia mengalami perubahan cukup besar dalam sembilan tahun terakhir. Pada 2017, tiga posisi teratas masih ditempati minyak sawit sebesar USD20,34 miliar, batubara USD17,88 miliar, dan gas alam USD7,99 miliar. Pada 2025, susunannya berubah menjadi besi/baja sebesar USD28,65 miliar, minyak sawit USD27,05 miliar, dan batubara USD24,48 miliar. Perubahan paling mencolok terjadi pada besi/baja

yang bergerak dari peringkat kesepuluh pada 2017 menjadi peringkat pertama pada 2025, sementara nikel naik hingga peringkat kelima. Perkembangan ini menunjukkan semakin besarnya peran produk hasil pengolahan mineral dalam struktur ekspor Indonesia, sejalan dengan ekspansi hilirisasi yang berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Kenaikan kelompok besi/baja juga tidak terlepas dari berkembangnya hilirisasi nikel, antara lain melalui produksi feronikel yang dalam klasifikasi HS termasuk ke dalam kelompok ferro-alloy pada *Chapter 72* (Iron and Steel).



Gambar 21. Pergeseran Ranking Komoditas Ekspor Utama Indonesia, 2017–2025

Sumber: Bank Indonesia (2026) diolah kembali oleh IPOSS

Catatan: Kelompok komoditas minyak sawit mencakup CPO, minyak inti sawit (CPKO), dan produk olahan/fraksinya, serta tidak mencakup produk oleokimia.

Di tengah perubahan tersebut, sawit justru menunjukkan posisi yang relatif konsisten. Sepanjang 2017–2025, minyak sawit selalu berada dalam tiga besar komoditas ekspor Indonesia. Nilainya meningkat dari USD20,34 miliar pada 2017 menjadi USD27,05 miliar pada 2025. Dengan demikian, pergeseran sawit dari peringkat pertama menjadi

kedua pada 2025 tidak mencerminkan penurunan nilai ekspor, melainkan munculnya sumber ekspor baru yang tumbuh lebih cepat, terutama besi/baja. Bahkan pada 2025, selisih nilai ekspor minyak sawit dengan besi/baja hanya sekitar USD1,6 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa di tengah transformasi struktur ekspor nasional, sawit tetap bertahan sebagai salah satu jangkar utama penerimaan ekspor Indonesia.

Menariknya, perubahan komposisi tersebut belum banyak mengubah konsentrasi ekspor pada kelompok teratas. Tiga komoditas terbesar menyumbang sekitar 27,4% dari total ekspor Indonesia pada 2017, sementara pada 2025 porsinya sekitar 28,3%. Artinya, struktur ekspor Indonesia memang mengalami transformasi, tetapi lebih dalam bentuk pergantian dan penguatan komoditas utama daripada penyebaran ekspor yang sepenuhnya lebih merata. Jika pada 2017 kelompok teratas didominasi sawit, batubara, dan gas alam, pada 2025 muncul besi/baja sebagai pemimpin baru, sementara sawit dan batubara tetap berada di dalam tiga besar.

6.2 Program B50 dan Tantangan Menjaga Ruang Ekspor Sawit

Implementasi mandatori B50 meningkatkan penyerapan CPO di pasar domestik dan memperkuat peran sawit dalam mendukung ketahanan energi nasional. Namun, peningkatan penggunaan CPO untuk biodiesel juga mengubah keseimbangan antara kebutuhan domestik dan ekspor. Dengan produksi minyak sawit yang tidak meningkat pada kecepatan yang sama dengan pertumbuhan kebutuhan domestik, ruang ekspor menjadi semakin bergantung pada kemampuan industri meningkatkan produksi.

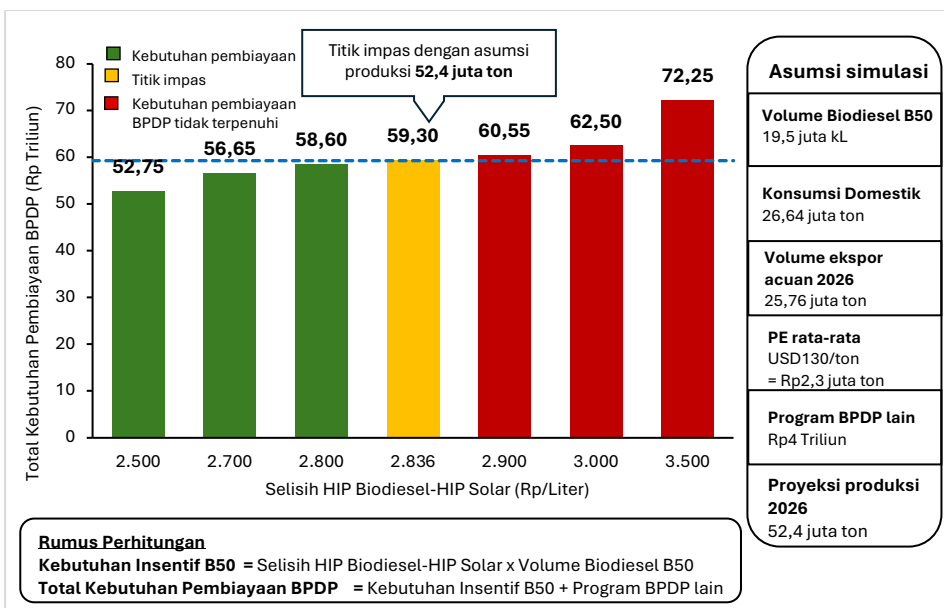
Keterkaitan tersebut menjadi semakin penting karena ekspor tidak hanya menghasilkan devisa, tetapi juga menjadi salah satu basis penerimaan Pungutan Ekspor (PE) yang digunakan untuk membiayai berbagai program pengembangan industri sawit, termasuk dukungan pembiayaan program biodiesel. Dengan demikian, terdapat hubungan antara produksi, penyerapan domestik untuk biodiesel, volume ekspor, dan kapasitas pembiayaan program. Peningkatan

penyerapan domestik tanpa diikuti pertumbuhan produksi dapat mengurangi ruang ekspor dan pada akhirnya mempersempit basis penerimaan PE.

Untuk menggambarkan hubungan tersebut, analisis berikut menggunakan **simulasi ilustratif**, bukan proyeksi penerimaan aktual BPDP. Simulasi menggunakan volume ekspor minyak sawit 2026 sebesar 25,76 juta ton dan untuk menyederhanakan perhitungan, seluruh volume ekspor tersebut diasumsikan ekuivalen dengan ekspor CPO yang dikenai PE rata-rata sebesar USD130/ton. Asumsi ini sengaja digunakan sebagai *benchmark* agar hubungan antara perubahan kebutuhan pembiayaan biodiesel, ruang ekspor, dan kebutuhan produksi dapat terlihat secara sederhana.

Dalam praktiknya, ekspor sawit Indonesia terdiri atas CPO dan berbagai produk turunannya yang memiliki tarif PE berbeda sebagaimana dibahas pada Bab 5. Oleh karena itu, hasil simulasi ini tidak dimaksudkan sebagai estimasi penerimaan PE aktual, melainkan sebagai ilustrasi sensitivitas untuk melihat seberapa jauh perubahan kebutuhan pembiayaan biodiesel dapat memengaruhi kebutuhan mempertahankan ruang ekspor dan meningkatkan produksi.

Dengan asumsi volume biodiesel B50 sebesar **19,5 juta kL per tahun**, kebutuhan pembiayaan biodiesel dihitung berdasarkan selisih antara HIP Biodiesel dan HIP Solar. Semakin besar selisih kedua harga tersebut, semakin besar kebutuhan dana untuk mempertahankan keekonomian program biodiesel. Selain kebutuhan tersebut, simulasi juga memperhitungkan sekitar **Rp4 triliun** untuk program BPDP lainnya.



Gambar 22. Simulasi Total Kebutuhan Pembiayaan BPDP pada Berbagai Selisih HIP Biodiesel-HIP Solar

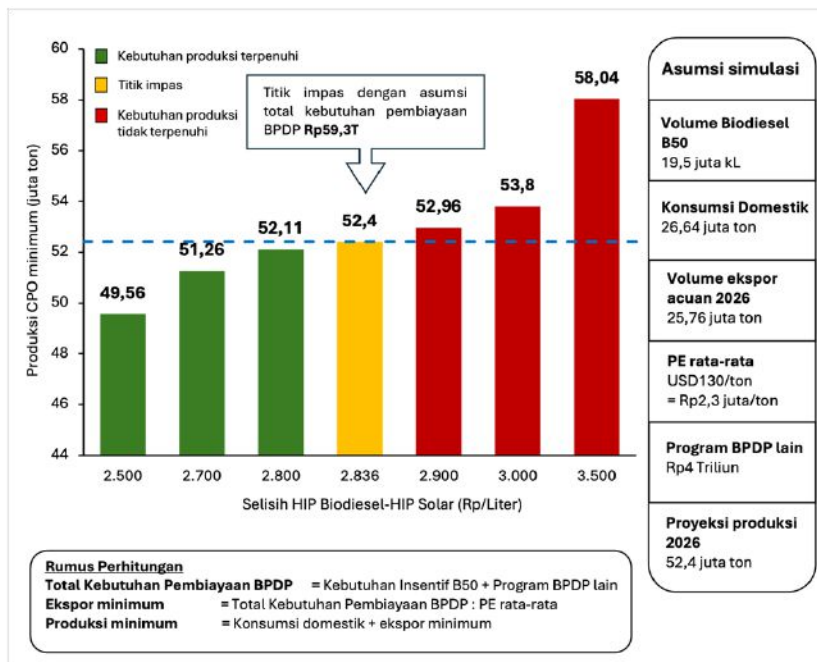
Sumber: IPOSS (2026a), diolah

Pada simulasi ini, selisih HIP Biodiesel–HIP Solar digunakan sebagai variabel sensitivitas untuk melihat perubahan kebutuhan pembiayaan program biodiesel. Semakin besar selisih kedua harga tersebut, semakin besar kebutuhan pembiayaan yang diperlukan untuk mempertahankan keekonomian biodiesel. Dengan asumsi yang digunakan dalam simulasi, kapasitas pembiayaan ilustratif pada kondisi produksi dan ekspor 2026 diperkirakan sekitar **Rp59,3 triliun per tahun**. Tingkat tersebut bertepatan dengan selisih HIP Biodiesel–HIP Solar sekitar **Rp2.836/liter**.

Angka tersebut tidak dimaksudkan sebagai estimasi penerimaan aktual BPDP, melainkan sebagai perhitungan **titik impas** dalam skenario simulasi. Pada titik tersebut, kebutuhan pembiayaan biodiesel dan program BPDP lainnya setara dengan kapasitas pembiayaan yang dihitung berdasarkan asumsi volume ekspor 25,76 juta ton dan PE rata-rata USD130/ton, dengan seluruh volume ekspor secara sederhana diasumsikan ekuivalen dengan ekspor CPO.

Apabila selisih HIP Biodiesel–HIP Solar berada di bawah Rp2.836/liter, kebutuhan pembiayaan dalam simulasi masih berada di bawah kapasitas pembiayaan tersebut. Sebaliknya, apabila selisih HIP meningkat melampaui titik impas, kebutuhan pembiayaan bertambah lebih cepat daripada kapasitas yang tersedia pada volume ekspor acuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan pembiayaan B50 akan semakin sensitif terhadap perubahan selisih harga biodiesel dan solar ketika produksi dan ruang ekspor tidak bertambah.

Implikasi berikutnya dapat dilihat dari sisi produksi. Jika tambahan kebutuhan pembiayaan diasumsikan tetap bersumber dari PE, maka peningkatan kebutuhan dana harus ditopang oleh basis ekspor yang lebih besar. Dengan konsumsi domestik yang telah ditentukan oleh kebutuhan pangan, oleokimia, dan biodiesel, tambahan ruang ekspor tersebut pada akhirnya membutuhkan tambahan produksi. Hubungan inilah yang diilustrasikan pada Gambar 23.



Gambar 23. Simulasi Produksi CPO minimum pada Berbagai Selisih HIP Biodiesel-HIP Solar

Sumber: IPOSS (2026a), diolah

Dalam simulasi ini, kebutuhan pembiayaan pada setiap skenario selisih HIP diterjemahkan menjadi **volume ekspor ekuivalen minimum** berdasarkan asumsi PE rata-rata USD130/ton. Volume tersebut kemudian ditambahkan pada kebutuhan domestik untuk memperoleh kebutuhan produksi minimum. Karena itu, angka produksi pada Gambar 23 bukan merupakan proyeksi produksi nasional, melainkan ilustrasi mengenai tingkat produksi yang diperlukan dalam memenuhi skenario tersebut apabila kebutuhan pembiayaan diasumsikan ditopang oleh PE dengan struktur asumsi yang sama seperti pada Gambar 22.

Hasil simulasi menunjukkan bahwa kebutuhan produksi meningkat sejalan dengan pelebaran selisih HIP Biodiesel–HIP Solar. Pada selisih **Rp2.500/liter**, kebutuhan produksi dalam simulasi berada pada sekitar **49,6 juta ton**. Kebutuhan tersebut meningkat menjadi sekitar 51,3 juta ton pada selisih Rp2.700/liter dan 52,1 juta ton pada selisih Rp2.800/liter. Pada titik impas sekitar Rp2.836/liter, kebutuhan produksi mencapai sekitar 52,4 juta ton, atau kurang lebih sama dengan proyeksi produksi minyak sawit nasional 2026.

Setelah melewati titik tersebut, kebutuhan produksi dalam simulasi mulai berada di atas proyeksi produksi 2026. Pada selisih HIP sebesar Rp2.900/liter, kebutuhan produksi meningkat menjadi sekitar 53,0 juta ton, dan pada Rp3.000/liter menjadi sekitar 53,8 juta ton. Apabila selisih HIP melebar hingga Rp3.500/liter, kebutuhan produksi mencapai sekitar 58,0 juta ton per tahun, atau sekitar 5,6 juta ton lebih tinggi dibandingkan proyeksi produksi 2026 sebesar 52,4 juta ton.

Hasil tersebut tidak berarti bahwa produksi nasional harus mencapai 58 juta ton ketika selisih HIP berada pada Rp3.500/liter. Angka tersebut merupakan **konsekuensi** dari asumsi simulasi bahwa **tambahan kebutuhan pembiayaan seluruhnya dipenuhi melalui tambahan penerimaan PE** dengan asumsi tarif dan struktur ekspor yang digunakan dalam simulasi. Dalam praktiknya, kebutuhan pembiayaan dapat dipengaruhi oleh struktur ekspor dan tarif PE antarproduk, saldo dana yang tersedia, perubahan harga energi,

penyesuaian kebijakan, maupun sumber pembiayaan lainnya. Karena itu, Gambar 23 lebih tepat dibaca sebagai **indikator sensitivitas** yang menunjukkan bagaimana tekanan pembiayaan B50 dapat semakin berkaitan dengan kebutuhan menjaga ruang ekspor ketika pertumbuhan produksi terbatas.

Meskipun bersifat ilustratif, simulasi tersebut memperlihatkan satu persoalan struktural yang penting. Ketika konsumsi domestik meningkat sementara produksi relatif terbatas, ruang ekspor menjadi semakin sempit. Pada saat yang sama, apabila PE tetap menjadi salah satu sumber pembiayaan program biodiesel, penyempitan ruang ekspor juga dapat memperkecil basis penerimaan yang mendukung program tersebut. **Dengan demikian, peningkatan produksi memiliki 2 fungsi sekaligus, yaitu menyediakan pasokan untuk memenuhi pertumbuhan kebutuhan domestik dan mempertahankan ruang ekspor sebagai sumber devisa serta basis penerimaan PE.**

Dalam jangka menengah, kondisi tersebut memperkuat pentingnya peningkatan produktivitas sebagai salah satu fondasi keberlanjutan B50. Tambahan produksi perlu semakin banyak berasal dari peningkatan hasil pada areal yang telah tersedia melalui peremajaan tanaman, penggunaan bahan tanam unggul, perbaikan praktik budidaya, dan peningkatan produktivitas kebun rakyat, tanpa bergantung pada ekspansi lahan baru. Pembahasan mengenai peran PSR dalam membentuk tambahan kapasitas produksi tersebut selanjutnya dibahas lebih khusus pada Bab 7.

6.3 Mandatori B50 dan Penciptaan Nilai Ekonomi Domestik

Peningkatan penyerapan CPO untuk biodiesel memang dapat mempersempit ruang yang tersedia untuk ekspor apabila tidak diimbangi oleh pertumbuhan produksi. Namun, berkurangnya ekspor tidak berarti bahwa seluruh nilai ekonomi dari CPO yang dialihkan ke pasar domestik turut hilang. Ketika CPO diproses menjadi biodiesel di dalam negeri, sebagian penciptaan nilai bergeser dari transaksi eksternal menuju aktivitas ekonomi domestik melalui proses

pengolahan, pembentukan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, serta investasi pada kapasitas industri. Dengan kebutuhan CPO untuk biodiesel sekitar 17 juta ton per tahun pada B50, peningkatan serapan domestik tersebut memperbesar peran industri biodiesel dalam rantai nilai sawit nasional.

Dampak ekonomi dari peningkatan pengolahan CPO di dalam negeri tersebut tercermin pada pembentukan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja. Kementerian ESDM memproyeksikan nilai tambah CPO yang diolah menjadi biodiesel meningkat dari Rp20,92 triliun pada B40 menjadi Rp23,49 triliun pada B50. Pada saat yang sama, penyerapan tenaga kerja yang dikaitkan dengan program biodiesel diproyeksikan meningkat dari sekitar 1,8 juta orang pada B40 menjadi 2,1 juta orang pada B50. Dengan demikian, tambahan CPO yang diserap untuk biodiesel tidak hanya meningkatkan kebutuhan bahan baku, tetapi juga memperluas aktivitas ekonomi yang berlangsung di sepanjang rantai produksi domestik.

Dampak tersebut juga terlihat pada pembentukan kapasitas industri. Pengalaman implementasi B40 pada 2025 menunjukkan bahwa peningkatan mandatori juga diikuti peningkatan investasi pada industri biodiesel. Pada tahun tersebut, terdapat 2 BU BBN yang membangun pabrik biodiesel baru (PT Selago Makmur Plantation dan PT Wahana Prima Sejati) dan 2 BU BBN yang melakukan perluasan kapasitas (PT Eco Prima Energi dan PT Energi Unggul Persada) dengan total kapasitas tambahan dari 4 BU BBN sebesar 2,86 juta kL/tahun dan total investasi sekitar 2,37 triliun rupiah. Penambahan 4 BU BBN yang telah diterbitkan perizinan berusahnya berdampak pada naiknya total kapasitas produksi pabrik biodiesel Indonesia menjadi 22,02 juta kL/tahun (Kementerian ESDM, 2025). Tambahan kapasitas tersebut setara dengan peningkatan sekitar 15% dibandingkan kapasitas sebelum keempat proyek tersebut masuk. Perkembangan ini menunjukkan bahwa peningkatan mandatori biodiesel tidak hanya meningkatkan pemanfaatan kapasitas produksi yang telah tersedia, tetapi juga mendorong investasi dan pembentukan kapasitas produksi baru.



Juta kL	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kapasitas terpasang (aktif)	11,62	15,46	17,56	18,68	19,15	19,15	22,02

Gambar 24. Persebaran Pabrik dan Perkembangan Kapasitas Terpasang Biodiesel Indonesia, 2020–2026

Sumber: Kementerian ESDM (2026)

Investasi tersebut memiliki dua dimensi penciptaan nilai. Pertama, investasi membentuk aset produktif berupa tambahan kapasitas yang dapat digunakan berulang kali untuk memenuhi kebutuhan biodiesel pada periode berikutnya. Kedua, proses pembangunan kapasitas itu sendiri menciptakan permintaan antarsektor. Pembangunan dan perluasan pabrik memerlukan pekerjaan konstruksi, mesin dan peralatan, instalasi, produk logam, jasa engineering, transportasi, pergudangan, serta berbagai jasa perusahaan. Karena itu, nilai Rp2,37 triliun tidak hanya merepresentasikan pembentukan aset di industri biodiesel, tetapi juga menjadi investment shock yang mendorong aktivitas produksi pada sektor-sektor pemasok.

Dengan menggunakan output multiplier sektor konstruksi sebesar 1,82 sebagai pendekatan berbasis Tabel Input-Output Indonesia, investasi sebesar Rp2,37 triliun secara ilustratif berkaitan dengan sekitar Rp4,31 triliun total output ekonomi (Pitaloka et al., 2020). Artinya, setelah memperhitungkan investasi awal dan keterkaitannya dengan sektor-sektor pemasok, terdapat sekitar Rp1,94 triliun

tambahan output di luar nilai investasi awal. Tambahan output tersebut berkaitan dengan meningkatnya aktivitas produksi pada sektor-sektor penunjang yang diperlukan dalam pembangunan dan perluasan kapasitas biodiesel, antara lain konstruksi, mesin dan peralatan, produk logam, instalasi, jasa engineering, transportasi, pergudangan, serta jasa perusahaan. Dengan kata lain, investasi yang dilakukan pada industri biodiesel turut menciptakan aktivitas ekonomi pada sektor-sektor lain yang terhubung dalam rantai pasoknya.

Pada akhirnya, peningkatan penyerapan CPO melalui B50 tidak hanya mengubah komposisi antara konsumsi domestik dan ekspor, tetapi juga mengubah di mana nilai ekonomi sawit direalisasikan. Sebagian CPO yang dialihkan dari pasar ekspor tetap menghasilkan aktivitas ekonomi ketika diolah di dalam negeri melalui berbagai keterkaitan di sepanjang rantai produksi. Karena itu, tantangan ke depan bukan memilih antara memenuhi kebutuhan domestik atau mempertahankan ekspor, melainkan meningkatkan produksi dan produktivitas agar kebutuhan keduanya dapat tumbuh secara bersamaan. Peningkatan produksi tersebut perlu diarahkan melalui peningkatan produktivitas pada lahan yang telah ada, sehingga tambahan pasokan tidak bergantung pada ekspansi areal perkebunan. Dengan demikian, kebutuhan biodiesel domestik dan ruang ekspor dapat tetap dijaga sejalan dengan upaya memperkuat keberlanjutan industri sawit.

6.4 Outlook Program Biodiesel B50 Q4 2026

Pembahasan *Outlook* program biodiesel B50 menjadi penting dalam konteks keberlanjutan kebijakan mandatori biodiesel di Indonesia. Salah satu indikator utama keberlanjutan tersebut adalah kemampuan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dalam membiayai selisih harga antara biodiesel dan solar. Selisih harga ini mencerminkan besarnya insentif yang harus disalurkan agar biodiesel tetap kompetitif di pasar domestik. Memasuki kuartal kedua implementasi penuh B50, analisis terhadap potensi beban pembiayaan BPDP pada Q4 2026 menjadi krusial untuk menilai

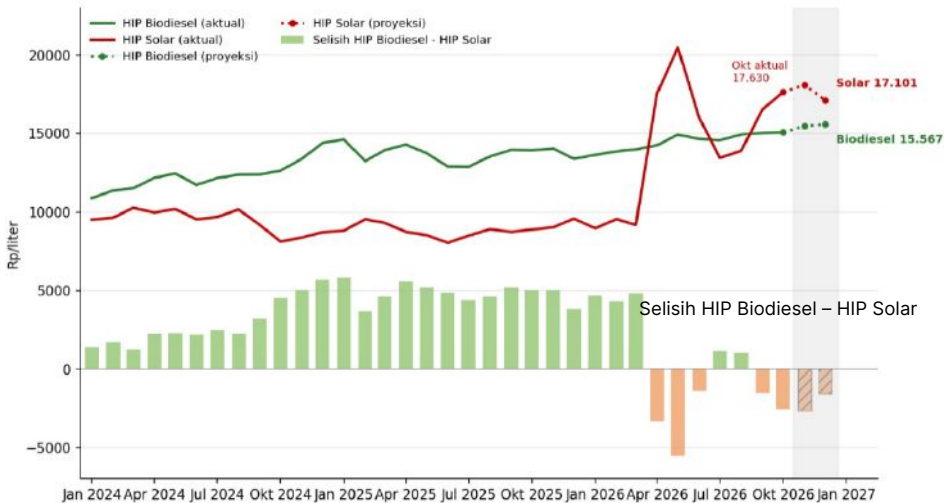
apakah kapasitas dana sawit masih memadai dalam mendukung program secara berkelanjutan.

Outlook beban program biodiesel B50 pada Q4 2026 perlu dilihat dari perbandingan antara Harga Indeks Pasar (HIP) Biodiesel dan HIP Solar. Dalam skema mandatori biodiesel, selisih antara HIP Biodiesel dan HIP Solar menjadi dasar perhitungan kebutuhan pembayaran selisih harga yang ditanggung melalui dana sawit. Semakin besar selisih HIP Biodiesel terhadap HIP Solar, semakin besar kebutuhan pembiayaan yang harus disediakan. Sebaliknya, apabila HIP Solar meningkat dan mendekati atau bahkan melampaui HIP Biodiesel, kebutuhan pembayaran selisih menjadi lebih kecil atau hilang sama sekali.

Secara metodologis, HIP Biodiesel dihitung dengan mengacu pada formula harga indeks pasar bahan bakar nabati yang ditetapkan Kementerian ESDM, yaitu rata-rata harga CPO KPBN pada periode tanggal 25 dua bulan sebelumnya sampai tanggal 24 bulan sebelumnya, ditambah biaya konversi sebesar USD 85/ton yang dikonversi dengan kurs tengah Bank Indonesia, kemudian dikalikan faktor konversi 0,87 kg CPO per liter. Formula ini diuji terhadap 37 bulan rilis resmi ESDM sejak Agustus 2023 dan menghasilkan selisih rata-rata di bawah Rp30/liter, sehingga proyeksi HIP Biodiesel praktis hanya bergantung pada proyeksi harga CPO KPBN dan kurs. Harga KPBN sendiri diturunkan dari proyeksi harga Bursa Malaysia pada Bab 4 melalui selisih harga KPBN terhadap Bursa Malaysia, yang sejak Juni 2026 stabil di sekitar USD 243/ton di bawah harga Malaysia.

Sementara itu, HIP Solar dihitung berdasarkan harga publikasi MOPS atau Argus untuk Gas Oil 0,25 persen sulfur, yang dalam proyeksi ini dimodelkan dari harga minyak mentah Brent pada periode acuan yang sama ditambah selisih harga gas oil terhadap minyak mentah, kemudian dikonversi ke rupiah per liter dengan kurs tengah Bank Indonesia. Harga Brent harian mengacu pada publikasi EIA hingga 17 September 2026, dan untuk periode setelahnya diasumsikan melandai secara bertahap dari harga terakhir sebesar USD 121/bbl menuju USD 90/bbl pada akhir Desember 2026, tingkat yang menjadi

titik temu proyeksi EIA untuk paruh kedua 2026 dan S&P Global untuk sisa tahun. Selisih gas oil terhadap Brent mengacu pada rata-rata tiga bulan terakhir sebesar USD 43/bbl, jauh di atas kisaran normal USD 15 sampai 25/bbl karena ketatnya pasar distilat global. Dengan demikian, proyeksi beban B50 pada Q4 2026 tidak hanya dipengaruhi oleh harga CPO sebagai bahan baku biodiesel, tetapi terutama oleh dinamika harga energi fosil.



Gambar 25. Proyeksi HIP Biodiesel, HIP Solar, dan Selisih Insentif Q4 2026

Sumber: Hasil Olahan IPOSS (2026a) dari data ESDM, BPDP, CPO KPNB, JISDOR, dan EIA

Perkembangan harga minyak mentah pada September 2026 mengubah gambaran Q4 secara mendasar. Brent yang masih berada di sekitar USD 88/bbl pada akhir Agustus melonjak ke USD 130/bbl pada 15 September seiring gangguan arus minyak dari Timur Tengah yang tidak kunjung pulih, dan bertahan di atas USD 120/bbl hingga pertengahan bulan. Karena periode acuan HIP Oktober berakhir pada 24 September, lonjakan ini langsung masuk ke HIP Solar Oktober, dan karena periode acuan November berakhir 24 Oktober, dampaknya akan bertahan setidaknya sampai HIP November.

Berdasarkan hasil proyeksi, HIP Solar berada di atas HIP Biodiesel sepanjang Q4 2026. Pada Oktober 2026, HIP Solar diproyeksikan sebesar Rp17.630/liter dengan rata-rata Brent pada periode acuan sebesar USD 109,6/bbl, sementara HIP Biodiesel diperkirakan

Rp15.072/liter, dihitung dari harga KPBN aktual pada sebagian besar periode acuan. Selisihnya negatif sekitar Rp2.558/liter, sehingga kebutuhan insentif nol. Pada November 2026, HIP Solar mencapai puncaknya di Rp17.538/liter karena periode acuannya mencakup harga Brent tertinggi pada akhir September dan awal Oktober, dengan selisih negatif Rp2.079/liter terhadap HIP Biodiesel sebesar Rp15.459/liter. Pada Desember 2026, seiring harga Brent yang diasumsikan melandai ke sekitar USD 106/bbl pada periode acuan, HIP Solar turun ke Rp16.543/liter, tetapi masih Rp975/liter di atas HIP Biodiesel sebesar Rp15.568/liter.

Tabel 4. Proyeksi HIP Biodiesel, HIP Solar, dan Insentif Q4 2026

Bulan	Brent (USD/bbl)	HIP Solar (Rp/L)	HIP Biodiesel (Rp/L)	Selisih HIP Biodiesel - Solar (Rp/L)	Insentif (Rp/L)
Oktober 2026	109,6	17.630	15.072	-2.558	0
November 2026	114,5	17.538	15.459	-2.079	0
Desember 2026	105,6	16.543	15.568	-975	0

Sumber: Hasil olahan IPOSS

Dengan asumsi volume biodiesel yang dibiayai pemerintah pada Q4 2026 sebesar 4,9 juta kL, sama dengan asumsi Q3, kebutuhan pembiayaan selisih harga dihitung dengan mengalikan volume biodiesel dengan besaran insentif per liter. Jika volume tersebut dibagi merata selama tiga bulan, volume pembiayaan per bulan sekitar 1,63 juta kL, atau setara 1,63 miliar liter. Karena insentif per liter nol di ketiga bulan, kebutuhan pembayaran selisih harga pada Q4 2026 diperkirakan nol, dibandingkan proyeksi Q3 sebesar Rp3,44 triliun dan realisasi selisih positif yang tipis pada Juli dan Agustus 2026.

Tabel 5. Simulasi Beban Pembiayaan Biodiesel B50 Q4 2026

Bulan	Volume Biodiesel Dibiayai (Juta kL)	Insentif (Rp/L)	Estimasi Beban Pembiayaan (Rp)
Oktober 2026	1,63	0	0 triliun
November 2026	1,63	0	0 triliun
Desember 2026	1,63	0	0 triliun
Total Q4 2026	4,90	0	0 triliun

Sumber: Hasil olahan IPOSS

Simulasi ini menunjukkan bahwa beban program B50 pada Q4 2026 berada pada titik terendah sejak program mandatori biodiesel diperluas. Penyebabnya adalah kombinasi dua hal yang jarang terjadi bersamaan: harga minyak mentah yang melonjak ke atas USD 100/bbl akibat gangguan pasokan dari Timur Tengah, dan selisih harga gas oil terhadap minyak mentah yang melebar hingga dua kali lipat kondisi normal karena ketatnya pasar distilat global. Kedua faktor itu mendorong HIP Solar hingga Rp1.000 sampai 2.000/liter di atas HIP Biodiesel, sehingga biodiesel untuk sementara menjadi bahan bakar yang lebih murah daripada solar.

Namun, kondisi tersebut tidak berarti bahwa risiko pembiayaan B50 telah hilang, karena sangat dipengaruhi oleh dinamika harga minyak fosil yang dapat berubah dengan cepat. Berdasarkan analisis sensitivitas pada Tabel 6, apabila harga Brent turun menjadi USD80/barel pada akhir November, sejalan dengan proyeksi J.P. Morgan dan Goldman Sachs untuk kuartal keempat, kebutuhan insentif diperkirakan kembali muncul pada Desember sekitar Rp600/liter, dengan kebutuhan pembiayaan sekitar Rp1 triliun. Dalam skenario koreksi yang lebih tajam hingga USD70/barel, misalnya apabila gangguan di Selat Hormuz pulih lebih cepat dari perkiraan, selisih harga pada Desember dapat melebar sehingga kebutuhan insentif meningkat menjadi sekitar Rp1.400/liter, dengan kebutuhan pembiayaan mencapai sekitar Rp2,3 triliun. Dengan asumsi *gas oil spread* tetap sebesar USD43/barel, titik impas ketika HIP Solar

menyamai HIP Biodiesel Desember diperkirakan terjadi pada harga Brent sekitar USD97/barel untuk periode acuan 25 Oktober–24 November.

Tabel 6. Sensitivitas Insentif Q4 2026 terhadap Jalur Harga Brent

Skenario Harga Brent (USD/bbl)	Insentif Okt (Rp/L)	Insentif Nov (Rp/L)	Insentif Des (Rp/L)	Beban Q4 (Rp triliun)
Dasar melandai ke USD90/barel pada akhir Desember	0	0	0	0
Bertahan di USD121/barel sepanjang kuartal	0	0	0	0
Turun cepat ke USD80/barel pada akhir November	0	0	596	0,97
Koreksi tajam ke USD70/barel pada akhir November	0	0	1.399	2,29

Sumber: Hasil olahan IPOSS

Dalam perspektif strategis, Q4 2026 menghadirkan kombinasi yang tidak biasa dan lebih ekstrem dari Q3. Pada satu sisi, Harga Referensi CPO, Pungutan Ekspor, dan Bea Keluar berada pada tingkat tertinggi sejak struktur tarif saat ini berlaku, sehingga penerimaan dana sawit per ton ekspor meningkat. Pada sisi lain, beban insentif biodiesel diproyeksikan nol karena HIP Solar melonjak jauh di atas HIP Biodiesel. Kondisi ini memberikan ruang fiskal yang sangat longgar bagi pengelolaan dana sawit pada Q4 2026, dan sebaiknya dimanfaatkan untuk memperkuat cadangan menghadapi periode ketika harga minyak mentah kembali turun dan gap HIP Biodiesel terhadap HIP Solar terbuka lagi, yang berdasarkan konsensus lembaga internasional dapat terjadi secepat awal 2027.

Secara keseluruhan, *Outlook* beban program B50 Q4 2026 menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan tidak hanya ditentukan oleh volume biodiesel yang disalurkan, tetapi juga oleh dinamika selisih harga antara biodiesel dan solar. Dengan volume pembiayaan sekitar 4,9 juta kL, setiap perubahan Rp100/liter pada selisih HIP

mengubah kebutuhan dana sekitar Rp490 miliar untuk satu kuartal. Karena pada Q4 2026 arah selisih itu ditentukan oleh harga minyak mentah, bukan oleh harga CPO, pengelolaan program B50 perlu memperhatikan secara simultan perkembangan harga minyak mentah dan gas oil, kurs rupiah, harga CPO, volume biodiesel, serta kapasitas dana sawit yang bersumber dari Pungutan Ekspor.

6.5 Tantangan Implementasi B50 dan Transformasi Peran Sawit dalam Ketahanan Energi

Implementasi B50 sejak Juli 2026 telah mengubah struktur penggunaan CPO domestik. Tambahan kebutuhan sekitar 1,7 juta ton CPO untuk mendukung peningkatan bauran biodiesel memperbesar porsi konsumsi domestik dalam neraca sawit nasional (IPOSS, 2026a). Memasuki Q4 2026, kuartal kedua implementasi penuh, alokasi CPO antara energi, pangan, oleokimia, ekspor, dan stok perlu dibaca lebih hati-hati karena tekanan yang pada Q3 masih berupa perkiraan kini mulai terlihat pada data.

Perhatian terhadap B50 menjadi semakin penting karena implementasinya berlangsung ketika neraca menegat. Harga Referensi yang bertahan di atas USD 1.000/ton sejak Juli, dan diproyeksikan melewati USD 1.030/ton pada Q4, mencerminkan pasokan yang tersedia untuk ekspor semakin terbatas. Dalam kondisi ini, tambahan kebutuhan biodiesel harus dipenuhi ketika ruang ekspor dan stok semakin terbatas, sementara produksi paruh kedua tahun masih dibayangi koreksi akibat kondisi kering.

Tekanan terhadap ruang ekspor menjadi penting karena volume ekspor memengaruhi penerimaan PE. Ketika volume yang tersedia untuk ekspor menurun, ruang penerimaan untuk mendukung program sawit juga ikut menyempit, meskipun tarif PE per ton berada pada tingkat yang tinggi. Pada saat yang sama, beban insentif B50 yang nol pada Q4 2026 bukan kondisi yang dapat diandalkan, karena bergantung sepenuhnya pada harga energi fosil yang berada di luar kendali kebijakan sawit. Dengan demikian, isu B50 tidak berhenti pada kecukupan CPO, tetapi juga menyangkut kemampuan menjaga

ruang ekspor sebagai salah satu penopang pendanaan program BPDP.

Dalam konteks tersebut, produktivitas menjadi kunci. Tambahan kebutuhan CPO untuk biodiesel tidak dapat terus-menerus dipenuhi dengan mengurangi ruang ekspor atau menekan stok akhir. Pasokan perlu ditingkatkan agar kebutuhan energi domestik tetap terpenuhi, sementara ekspor masih memiliki ruang yang cukup untuk menjaga penerimaan pungutan ekspor. Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), penggunaan benih unggul, perbaikan praktik budidaya, dan pendampingan pekebun menjadi jalur utama untuk menaikkan produksi tanpa memperluas areal perkebunan.

Simulasi gap antara HIP Biodiesel dan HIP Solar pada bagian 6.4 menunjukkan seberapa kuat B50 menghadapi perubahan harga. Ketika gap melebar, kebutuhan pembayaran selisih harga meningkat dan kebutuhan dukungan dari pungutan ekspor menjadi lebih besar. Ketika harga solar melampaui HIP Biodiesel seperti pada Q4 2026, tekanan pembayaran selisih hilang, meskipun risiko lain seperti biaya logistik dan inflasi energi tetap perlu diperhatikan. Dengan cara ini, simulasi tidak hanya membaca kebutuhan insentif, tetapi juga menunjukkan hubungan antara harga energi, pasokan CPO, ruang ekspor, dan daya tahan pendanaan program.

Dampak terhadap pekebun juga perlu menjadi perhatian. Kenaikan serapan domestik dapat menjaga permintaan CPO, namun manfaatnya di tingkat hulu bergantung pada transmisi harga, produktivitas kebun, akses pekebun ke rantai pasok formal, dan keberlanjutan program pendukung. Jika pasokan mengetat dan biaya insentif kembali meningkat, dampaknya terhadap harga TBS dan posisi pekebun perlu dibaca dengan hati-hati. Ukuran keberhasilan B50 perlu mencakup stabilitas harga dan posisi pekebun, selain realisasi penyaluran biodiesel itu sendiri.

Pilihan kebijakan perlu disiapkan apabila pasokan CPO atau pembiayaan biodiesel mulai tertekan. Opsi pertama adalah menyesuaikan bauran biodiesel dengan ketersediaan bahan baku,

sehingga implementasi B50 tetap mengikuti kemampuan pasokan CPO, stok, dan ruang ekspor, merujuk pada praktik penyesuaian bauran biodiesel di Thailand yang mengikuti kondisi pasokan, stok minyak sawit, dan biaya biofuel (USDA, 2024). Opsi kedua adalah mengatur volume biodiesel yang memperoleh insentif, terutama ketika selisih harga biodiesel dan solar kembali melebar dan kebutuhan pembayaran meningkat. Opsi ketiga adalah memanfaatkan ruang fiskal Q4 2026, ketika kebutuhan insentif nol dan penerimaan PE per ton tinggi, untuk memperkuat cadangan dana sawit sebagai penyangga ketika harga minyak mentah kembali turun. Ketiga opsi ini tetap perlu disertai percepatan produktivitas hulu melalui PSR, benih unggul, perbaikan budidaya, dan pendampingan pekebun.

Prospek B50 pada Q4 2026 dan awal 2027 akan sangat ditentukan oleh keseimbangan antara permintaan energi dan kapasitas pasokan CPO nasional, serta oleh arah harga energi global yang saat ini menutupi biaya sesungguhnya dari program. Fokus kebijakan perlu diarahkan pada pemantauan neraca CPO secara berkala, percepatan produktivitas melalui PSR, penguatan cadangan pembiayaan biodiesel selama ruang fiskal masih longgar, serta pengelolaan risiko terhadap ruang ekspor dan harga. B50 dapat memperkuat ketahanan energi, sepanjang implementasinya tetap menjaga keseimbangan pasokan, ekspor, pembiayaan, dan posisi pekebun.



BAB 7. OUTLOOK KONTRIBUSI SAWIT RAKYAT (PSR) DALAM MENDUKUNG KETAHANAN ENERGI NASIONAL

Peningkatan kebutuhan minyak sawit domestik, terutama untuk mendukung implementasi mandatori B50, membuat kemampuan meningkatkan produksi menjadi semakin penting dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan domestik, ekspor, dan stok. Dalam jangka panjang, tambahan pasokan tidak dapat terus bergantung pada perluasan areal, sehingga peningkatan produktivitas kebun yang telah ada menjadi salah satu sumber pertumbuhan produksi yang semakin strategis.

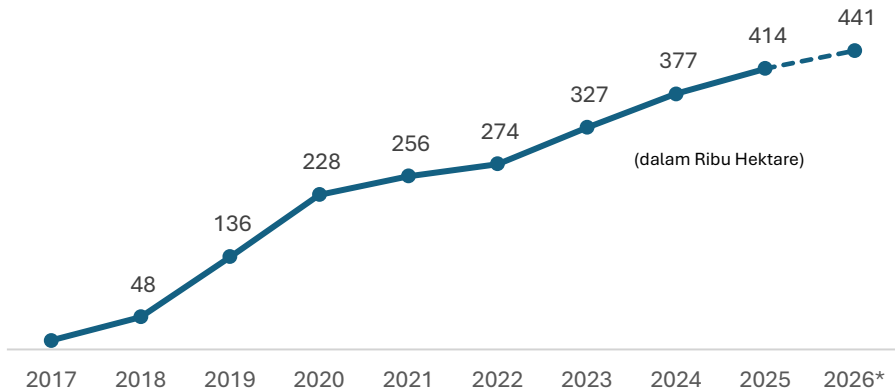
Dalam konteks tersebut, **Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)** memiliki peran penting karena mengganti tanaman tua dan berproduktivitas rendah dengan tanaman baru yang memiliki potensi produktivitas lebih tinggi. Setelah hampir satu dekade berjalan sejak 2017, sebagian areal hasil PSR telah memasuki fase menghasilkan dan mulai memberikan kontribusi terhadap produksi CPO nasional. Bab ini mengevaluasi perkembangan pelaksanaan PSR hingga 2026, mengestimasi kontribusinya terhadap produksi, serta melihat perannya sebagai salah satu sumber pertumbuhan produksi sawit nasional dan arah percepatan program memasuki 2027.

7.1 Perkembangan PSR 2017–2026: Percepatan yang Masih Tertahan

Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menjadi salah satu instrumen strategis dalam meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat melalui penggantian tanaman tua dan tidak produktif dengan bahan tanam yang lebih berkualitas (BPDP, 2024; Ditjenbun, 2024). Selain berperan dalam memperbaiki produktivitas kebun rakyat, percepatan PSR juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pasokan sawit nasional tanpa bergantung pada ekspansi areal baru.

Sejak mulai dilaksanakan pada 2017, PSR menunjukkan perkembangan positif dari sisi cakupan program. Berdasarkan data

Kementerian Pertanian, luas kumulatif PSR meningkat secara bertahap dari sekitar 27 ribu hektare pada 2017 menjadi sekitar 441 ribu hektare hingga September 2026 (Kementerian Pertanian, 2026). Peningkatan terbesar terjadi pada periode awal pelaksanaan program, sebelum pertumbuhan luas peremajaan berlangsung lebih moderat pada tahun-tahun berikutnya.



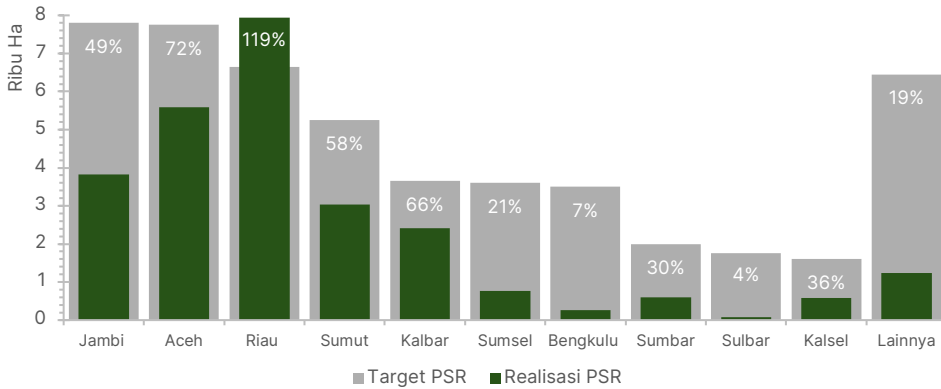
Gambar 26. Akumulasi Kinerja PSR 2017–2026

Sumber: Kementerian Pertanian (2026), diolah kembali oleh IPOSS

Capaian tersebut menunjukkan bahwa PSR telah membangun fondasi pelaksanaan peremajaan sawit rakyat secara nasional. Namun, luas kumulatif program perlu dilihat dalam konteks kebutuhan peremajaan yang terus bertambah seiring semakin banyaknya tanaman rakyat yang memasuki umur tua dan mengalami penurunan produktivitas. Dengan demikian, tantangan PSR tidak lagi hanya memperluas cakupan program, tetapi meningkatkan kecepatan peremajaan agar mampu mengimbangi pertambahan areal tanaman yang membutuhkan peremajaan.

Pada 2026, pemerintah menetapkan target PSR sebesar **50.000 hektare** yang tersebar di 21 provinsi. Hingga Agustus 2026, realisasi rekomendasi teknis mencapai **26.324 hektare**, melibatkan 179 kelembagaan pekebun dan 12.819 pekebun (Kementerian Pertanian, 2026). Secara regional, Riau mencatat capaian rekomendasi teknis sebesar 7.945 hektare atau 119% dari target 6.650 hektare. Capaian

relatif besar juga berasal dari Aceh sebesar 5.594 hektare, Jambi 3.829 hektare, dan Sumatera Utara 3.026 hektare.



Gambar 27. Perbandingan Target dan Realisasi PSR Tahun 2026

Sumber: Kementerian Pertanian (2026), diolah kembali oleh IPOSS

Perbedaan capaian antarwilayah menunjukkan bahwa kesiapan kelembagaan pekebun, kelengkapan administrasi, dan efektivitas proses verifikasi masih menjadi faktor penting dalam membentuk *pipeline* PSR. Selain itu, rekomendasi teknis merupakan indikator antara dan belum menggambarkan realisasi fisik penanaman. Karena itu, evaluasi keberhasilan PSR perlu bergerak lebih jauh dari sekadar luas rekomendasi teknis atau luas yang telah memperoleh persetujuan program menuju realisasi tanam dan, pada akhirnya, tambahan produksi yang dihasilkan oleh kebun hasil peremajaan.

7.2 Kontribusi PSR terhadap Produksi CPO Nasional

Setelah hampir satu dekade pelaksanaan PSR, sebagian kebun hasil peremajaan telah memasuki fase tanaman menghasilkan. Kondisi tersebut memungkinkan dampak PSR tidak lagi hanya dinilai berdasarkan luas program, tetapi mulai dapat dilihat dari kontribusinya terhadap produksi CPO nasional.

Untuk mengestimasi kontribusi tersebut, analisis dilakukan terhadap **realisasi areal PSR yang telah ditanam**, bukan keseluruhan luas yang telah masuk dalam program. Dari realisasi penanaman sejak 2017,

areal tahun tanam 2017–2023 yang pada 2026 telah berumur 3 tahun atau lebih diperkirakan mencapai **251 ribu hektare**. Areal tersebut digunakan sebagai basis untuk memperkirakan produksi CPO yang telah mulai dihasilkan oleh program PSR.

Produktivitas CPO menurut umur tanaman diestimasi berdasarkan rata-rata keragaan beberapa varietas unggul kelapa sawit yang digunakan sebagai referensi bahan tanam. Produktivitas tanaman diperkirakan meningkat mengikuti perkembangan umur tanaman, mulai sekitar 1,24 ton CPO/ha/tahun pada umur 3 tahun, meningkat menjadi 2,63 ton pada umur 4 tahun dan 4,01 ton pada umur 5 tahun, hingga mencapai sekitar 5,68 ton CPO/ha/tahun pada umur 9 tahun sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 7. Estimasi Produksi CPO Tahun 2026 berdasarkan Areal PSR Tertanam sejak 2017 - 2023

Tahun Tanam	Umur (tahun)	Luas Tanam (ha)	Potensi Produktivitas CPO (ton/ha/tahun)	Estimasi Produksi CPO (ton)
2017	9	666	5,68	3.786
2018	8	6.314	5,56	35.120
2019	7	25.801	5,29	136.492
2020	6	72.269	4,80	346.597
2021	5	66.675	4,01	267.259
2022	4	40.469	2,63	106.628
2023	3	38.614	1,24	47.853
Total/ Rata-rata	4,4	250.808	3,76	943.735

Sumber: Kementerian Pertanian (2026), diolah dan diestimasi oleh IPOSS

Dengan mempertimbangkan komposisi luas menurut tahun tanam dan umur tanaman, produktivitas rata-rata tertimbang areal PSR yang telah menghasilkan pada 2026 diperkirakan sekitar 3,76 ton CPO/ha/tahun. Dengan luas 251 ribu hektare, produksi CPO yang dihasilkan diperkirakan mencapai sekitar 943,7 ribu ton pada 2026, atau mendekati 1 juta ton CPO per tahun.

Dibandingkan dengan proyeksi produksi CPO nasional sebesar 47,3 juta ton pada 2026, kontribusi tersebut setara dengan sekitar 2%

produksi CPO nasional. Angka ini menunjukkan bahwa PSR telah mulai memberikan kontribusi yang terukur terhadap pasokan minyak sawit nasional. Dengan demikian, manfaat PSR tidak lagi semata-mata berupa potensi peningkatan produktivitas pada masa mendatang, tetapi sebagian telah mulai terealisasi dalam produksi nasional pada tahun ini dan diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan peningkatan luas tanam, umur tanaman dan konsistensi penerapan *good agricultural practices* (GAP).

7.3 PSR sebagai Sumber Pertumbuhan Produksi ke Depan

Kontribusi hampir satu juta ton CPO dari areal PSR yang telah menghasilkan memberikan gambaran mengenai peran peremajaan sebagai salah satu sumber tambahan produksi nasional. Berbeda dengan ekspansi areal yang meningkatkan produksi melalui penambahan luas perkebunan, PSR meningkatkan kapasitas produksi melalui penggantian tanaman tua dan berproduktivitas rendah dengan tanaman baru yang memiliki potensi produktivitas lebih tinggi.

Tambahan produksi dari PSR ke depan berasal dari 2 sumber. Pertama, peningkatan produktivitas areal PSR yang saat ini telah menghasilkan sejalan dengan bertambahnya umur tanaman. Kedua, masuknya areal PSR tahun tanam yang lebih muda ke fase tanaman menghasilkan. Dengan demikian, realisasi PSR pada suatu tahun membentuk *pipeline* produksi yang dampaknya terhadap pasokan nasional akan muncul secara bertahap beberapa tahun setelah penanaman.

Karakteristik tersebut membuat konsistensi pelaksanaan PSR menjadi penting. Perlambatan peremajaan pada satu periode tidak hanya memengaruhi capaian program pada tahun tersebut, tetapi juga mengurangi tambahan produksi yang seharusnya tersedia beberapa tahun kemudian. Sebaliknya, percepatan realisasi tanam hari ini akan membentuk tambahan kapasitas produksi ketika tanaman hasil peremajaan mulai memasuki fase menghasilkan.

Peran tersebut menjadi semakin strategis ketika kebutuhan minyak sawit domestik meningkat. Implementasi mandatori B50 memperbesar penyerapan CPO untuk biodiesel, sementara kebutuhan pangan, oleokimia, dan ekspor tetap perlu dipertahankan. Dalam kondisi tersebut, menjaga keseimbangan pasar tidak cukup hanya melalui pengaturan alokasi produksi yang tersedia, tetapi membutuhkan **pertumbuhan produksi yang berkelanjutan**.

PSR karena itu perlu ditempatkan bukan hanya sebagai program peremajaan kebun rakyat, tetapi sebagai salah satu instrumen peningkatan kapasitas produksi sawit nasional. Kontribusi sekitar 0,94 juta ton CPO pada 2026 menunjukkan bahwa dampak produksi dari peremajaan yang dilakukan sejak beberapa tahun sebelumnya mulai terlihat. Namun, besarnya kontribusi PSR pada periode berikutnya akan sangat ditentukan oleh kemampuan mempercepat realisasi tanam pada saat ini.

Kondisi tersebut menjadi semakin penting karena perkembangan PSR dalam beberapa tahun terakhir belum menunjukkan percepatan yang sebanding dengan besarnya kebutuhan peremajaan. Oleh karena itu, memasuki 2027, perhatian kebijakan perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan target PSR, tetapi terutama pada kemampuan mengubah target dan rekomendasi teknis menjadi realisasi penanaman yang lebih cepat, berkualitas, dan mampu menghasilkan produktivitas sesuai potensi bahan tanam yang digunakan.

7.4 Outlook Kebijakan Percepatan PSR 2027

Memasuki 2027, arah kebijakan PSR perlu difokuskan pada bagaimana membangun momentum percepatan melalui perbaikan mekanisme pelaksanaan. Pemerintah telah menyiapkan penyempurnaan proses bisnis PSR melalui revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2025, khususnya terkait penyederhanaan jalur pengusulan dan penguatan proses verifikasi (Kementerian Pertanian, 2026).

Salah satu perubahan yang diarahkan adalah penyederhanaan jalur pengusulan dari dua jalur sebelumnya, yaitu jalur dinas dan jalur

surveyor, menjadi satu jalur pengusulan terpadu dengan melibatkan dinas dan surveyor sejak tahap awal. Selain itu, peran surveyor diperkuat melalui pelaksanaan verifikasi *on desk* dan *on site* terhadap seluruh persyaratan pengusulan. Penyempurnaan tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pengajuan, meningkatkan kualitas verifikasi, dan memperkuat akuntabilitas pelaksanaan PSR (Kementerian Pertanian, 2026).

Namun, percepatan PSR tidak hanya bergantung pada penyederhanaan prosedur. Terdapat tiga aspek utama yang perlu diperkuat agar perubahan mekanisme tersebut dapat menghasilkan peningkatan capaian yang berkelanjutan.

7.4.1 Penguatan Kelembagaan Pekebun

Kelembagaan pekebun menjadi fondasi awal dalam memastikan kualitas usulan PSR. Kelompok tani, koperasi, dan kelembagaan pekebun perlu memiliki kemampuan dalam mengelola data anggota, memastikan kesesuaian calon petani dan calon lahan (CPCL), serta menyiapkan dokumen pendukung sebelum proses verifikasi (BPDP, 2026b).

Penguatan kelembagaan ke depan perlu diarahkan agar pekebun tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi aktor utama dalam kesiapan data dan administrasi program (BPDP, 2026b). Dengan meningkatnya kualitas usulan sejak awal, proses koreksi dapat dikurangi sehingga waktu menuju rekomendasi teknis menjadi lebih singkat.

7.4.2 Pendampingan Multipihak dan Dukungan Pembiayaan

Selain penguatan kelembagaan, percepatan PSR membutuhkan pendampingan untuk membantu pekebun memenuhi kebutuhan teknis dan administratif pengusulan. Keterlibatan perusahaan perkebunan, asosiasi, dan lembaga profesional telah menjadi bagian dari upaya percepatan program (Ditjenbun, 2023). Pendampingan oleh akademisi juga telah dilakukan melalui penyuluhan, penyediaan

sarana pembelajaran, dan bantuan penyusunan proposal PSR (Mardiana Wahyuni & Barus, 2021).

Ke depan, pendampingan perlu diarahkan untuk memperkuat kemampuan kelembagaan pekebun dalam menyiapkan dan mengelola usulannya. Mengingat persyaratan pengajuan mencakup data pekebun dan lahan, peta kebun, serta rencana kerja dan anggaran, dukungan perlu menjangkau tahap persiapan sebelum rekomendasi teknis diterbitkan (BPDP, 2026a). Untuk itu, perlu dipertimbangkan standar layanan, pembagian tanggung jawab, dan mekanisme pembiayaan bagi pendataan, pemetaan, penyusunan dokumen, serta tindak lanjut koreksi.

7.4.3 Sistem Informasi dan Verifikasi Berbasis SLA (*Service Level Agreement*)

Penguatan sistem informasi menjadi aspek penting untuk meningkatkan transparansi proses PSR. PSR *Online* ke depan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengajuan dokumen, tetapi juga sebagai sistem monitoring yang mampu menunjukkan posisi setiap usulan, tahapan yang sedang berjalan, kebutuhan koreksi, serta pihak yang bertanggung jawab menindaklanjuti (BPDP, 2026a).

Penerapan konsep *Service Level Agreement* (SLA) dapat menjadi instrumen untuk memastikan setiap tahapan memiliki standar waktu pelayanan yang jelas. SLA tidak dimaksudkan sebagai jaminan persetujuan dalam waktu tertentu, tetapi memberikan kepastian proses dan membantu mengidentifikasi titik hambatan dalam pelaksanaan PSR.

Dengan penguatan kelembagaan pekebun, pendampingan multipihak, serta sistem verifikasi yang lebih transparan, PSR 2027 diharapkan dapat bergerak menuju proses yang lebih cepat dan terukur. Keberhasilan percepatan PSR tidak hanya dilihat dari bertambahnya luas areal yang masuk program, tetapi juga dari kemampuan memastikan kebun hasil peremajaan mampu mencapai produktivitas optimal dan memperkuat kontribusi sawit rakyat terhadap produksi nasional dalam jangka panjang.



BAB 8. PERSPEKTIF INDUSTRI DAN KEBIJAKAN

8.1 Menyambut Implementasi EUDR: Kesiapan Indonesia dari Data Kebun ke Bukti Perdagangan

Mulai 30 Desember 2026, EUDR berlaku bagi operator besar dan menengah yang pertama kali menempatkan produk terkait di pasar Uni Eropa. Sebagian besar operator mikro dan kecil mulai tunduk pada 30 Juni 2027. Kewajiban uji tuntas dan penyampaian *due diligence statement* (DDS) berada pada operator Uni Eropa. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, mereka memerlukan informasi yang dapat membuktikan asal produk, legalitas produksi, dan status bebas deforestasi dari rantai pasok negara produsen (European Commission, n.d., 2023).

Pada 2025, ekspor produk sawit Indonesia ke Uni Eropa mencapai 4,37 juta ton dengan nilai US\$4,04 miliar dan menjangkau 26 dari 27 negara anggota. Dari jumlah tersebut, sekitar 2,89 juta ton senilai US\$2,33 miliar berasal dari 16 kode HS operasional yang dipadankan dengan 12 pos HS produk sawit dalam Lampiran I EUDR 2023. Volume tersebut terutama terdiri atas minyak sawit dan fraksinya, minyak inti sawit dan fraksinya, serta bungkil dan residu inti sawit (BPS, 2026b). Cakupan EUDR juga akan bertambah pada akhir 2027 dengan masuknya sebagian produk oleokimia, sabun, dan turunan sawit. Artinya, kebutuhan pembuktian akan mengikuti semakin panjang dan beragamnya rantai produk sawit yang masuk ke perdagangan global (BPS, 2026b).

8.1.1 Dari Pengapalan ke Kebun Sumber

EUDR mensyaratkan agar produk yang masuk ke pasar Uni Eropa memenuhi tiga ketentuan utama, yaitu bebas deforestasi setelah 31 Desember 2020, diproduksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara produsen, dan dicakup oleh *due diligence statement* (DDS). Dalam proses *due diligence*, operator juga harus mengumpulkan informasi mengenai produk dan kuantitas, negara dan periode produksi, pemasok dan penerima produk, serta

geolokasi seluruh plot lahan yang menjadi sumber komoditas. Untuk plot di atas empat hektare, informasi geolokasi harus disampaikan dalam bentuk poligon (European Commission, 2023).

Persyaratan tersebut menjadi lebih konkret apabila diterapkan pada satu pengapalan nyata. Sebagai ilustrasi, satu pengapalan sekitar 25.000 ton refined palm oil (RPO) dapat berasal dari beberapa *refinery*. Dengan asumsi yield sekitar 95%, volume tersebut memerlukan sekitar 26.316 ton CPO. Selanjutnya, dengan oil extraction rate (OER) sebesar 20%, kebutuhan bahan bakunya setara dengan sekitar 131.579 ton tandan buah segar (TBS).

Dengan demikian:

$$25.000 \text{ ton RPO} \div 95\% = 26.316 \text{ ton CPO}$$

$$26.316 \text{ ton CPO} \div 20\% = 131.579 \text{ ton TBS}$$

Untuk menggambarkan kompleksitas pemasok di tingkat hulu, dapat digunakan asumsi ilustratif bahwa sekitar 20% TBS berasal dari kebun sendiri dan 80% berasal dari pekebun. Apabila produktivitas rata-rata kebun rakyat diasumsikan sekitar 1,5 ton TBS per hektare per bulan, dengan rata-rata penguasaan lahan 4 hektare per pekebun, serta pengumpulan bahan baku untuk satu pengapalan berlangsung selama sekitar satu bulan, maka kebutuhan TBS dari pekebun mencapai sekitar 105.263 ton.

$$131.579 \times 80\% = 105.263 \text{ ton TBS}$$

Sehingga volume tersebut ekuivalen dengan sekitar:

$$105.263 \text{ ton TBS} \div 1,5 \text{ ton} \frac{\text{TBS}}{\text{ha}} = 70.175 \text{ ha}$$

atau sekitar:

$$70.175 \text{ ha} \div 4 \text{ ha/pekebun} = 17.544 \text{ pekebun}$$

Dengan demikian, satu shipment 25.000 ton RPO secara ilustratif dapat terkait dengan pasokan dari sekitar 17.500 pekebun, apabila sebagian besar bahan bakunya berasal dari pihak ketiga. Angka ini bukan jumlah aktual pemasok untuk setiap pengapalan, melainkan ilustrasi mengenai skala data dan sumber kebun yang perlu dikelola dalam proses *traceability*. Dalam praktiknya, jumlah PKS, pemasok TBS, kebun, dan plot sumber harus ditentukan berdasarkan catatan transaksi dan aliran bahan baku aktual perusahaan.

Tabel 8. Ilustrasi Kebutuhan Pemenuhan *Traceability* per Shipment Ekspor Produk RPO¹

Tahap	Produk/Unit	Volume ilustratif	Bukti/Data yang diperlukan
Pengapalan	RPO	±25.000 ton	Identitas kargo, kontrak, spesifikasi produk, <i>invoice</i> , <i>bill of lading</i> , volume, dan dokumen ekspor
<i>Refinery</i>	CPO	±26.316 ton	Alokasi volume per lot CPO, tanggal penerimaan, stok, proses produksi, <i>mass balance</i> , dan rekonsiliasi ke volume pengapalan
PKS	TBS	±131.579 ton	Asal CPO per PKS, <i>dispatch volume</i> , tanggal produksi, catatan timbang, daftar pemasok, dan rekonsiliasi CPO–TBS
Estate / <i>Smallholder</i>	TBS	20% estate; 80% <i>smallholder</i>	Identitas pemasok, volume dan tanggal penerimaan TBS, serta hubungan pemasok dengan kebun sumber
Pekebun	Unit pemasok	±17.500 pekebun ekuivalen*	Identitas pekebun, luas kebun, lokasi kebun, dan hubungan antara volume TBS yang dipasok dengan plot sumber

Hal yang perlu ditekankan adalah bahwa 17.500 pekebun bukan berarti satu pengapalan secara administratif selalu berasal dari jumlah pemasok tersebut. Angka tersebut menunjukkan besarnya kemungkinan populasi sumber yang harus dapat direkonsiliasi apabila sebagian besar TBS berasal dari pekebun pihak ketiga. Dalam praktiknya, suatu *refinery* dapat memperoleh CPO dari beberapa

¹ Ilustrasi menggunakan asumsi 80% TBS berasal dari pekebun, produktivitas 1,5 ton TBS/ha/bulan, rata-rata luas 4 ha/pekebun, untuk target pengiriman produk 1 bulan.

PKS, setiap PKS menerima TBS dari banyak pemasok, dan setiap pemasok dapat terkait dengan satu atau lebih plot kebun.

Karena itu, persoalan *traceability* tidak berhenti pada tersedianya data kebun. Tantangan utamanya adalah memastikan bahwa aliran fisik produk (*physical flow*) dapat direkonsiliasi dengan aliran data (*data flow*) pada setiap simpul rantai pasok. Volume RPO pada tingkat pengapalan harus dapat dihubungkan dengan alokasi CPO pada *refinery*, kemudian dengan asal CPO dari PKS, penerimaan TBS, pemasok, hingga plot kebun sumber. EUDR sendiri mensyaratkan geolokasi seluruh plot yang menghasilkan komoditas yang terkandung dalam produk relevan, dan kompleksitas rantai pasok merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam penilaian risiko.

Dengan pendekatan ini, satu *shipment* dapat digunakan sebagai unit uji *traceability* secara end-to-end. Keberhasilan sistem tidak hanya dinilai dari keberadaan aplikasi, sertifikat, atau database, tetapi dari kemampuan untuk menunjukkan bahwa *volume* yang benar-benar diperdagangkan mempunyai jejak data yang konsisten dan tidak terputus hingga kebun sumbernya.

Titik kritis muncul ketika bahan baku dari sumber yang belum memiliki informasi atau bukti yang memadai telah tercampur dengan sumber lain dan hubungan antara volume fisik dengan asal kebunnya tidak lagi dapat direkonstruksi. Dalam kondisi tersebut, operator akan menghadapi kesulitan untuk membuktikan bahwa produk yang ditempatkan di pasar Uni Eropa memenuhi persyaratan yang berlaku. Oleh sebab itu, *traceability* dalam konteks EUDR pada dasarnya merupakan persoalan rekonsiliasi antara produk, volume, waktu, pemasok, dan plot sumber, bukan sekadar pengumpulan geolokasi kebun.

8.1.2 Tiga Tingkat Kesiapan EUDR

Ketersediaan data belum otomatis menghasilkan bukti transaksi. Kesiapan EUDR perlu dilihat pada tiga tingkat: ketersediaan data (*data availability*), keterhubungan data (*data linkage*), dan bukti

transaksi (*transaction evidence*). Tingkat pertama melihat apakah data ISPO, STDB, legalitas, poligon, pemasok, PKS, *refinery*, dan pengapalan tersedia. Tingkat kedua melihat apakah data tersebut dapat ditautkan dari kebun hingga produk jadi. Tingkat ketiga melihat apakah keterhubungan tersebut dapat digunakan untuk membuktikan asal dan volume satu pengapalan tertentu.

Indonesia telah memiliki sejumlah *enabler*, antara lain ISPO, STDB, data geospasial, SI-ISPO, dan sistem *traceability* perusahaan. SI-ISPO dirancang untuk mendukung sertifikasi, ketertelusuran, interoperabilitas data, dan pengaturan akses (Permenko Perekonomian No. 14 Tahun 2025, 2025). Kebijakan Satu Peta dan BIG terutama berperan pada sisi geospasial, yaitu memastikan konsistensi referensi dan poligon. Fungsi ini tidak mencakup pembuktian legalitas, rekonsiliasi volume, atau asal suatu pengapalan (Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2021, 2021).

8.1.3 Governance dan Export Readiness

Kesiapan juga bergantung pada kejelasan pembagian fungsi antaraktor. Regulator menetapkan standar dan melakukan pengawasan, pemilik data menyiapkan dan menjaga keandalan data dasar, sementara *verifier* memeriksa konsistensi bukti dan, sesuai mandatnya, memvalidasi hasil pemeriksaan. Pada sisi ekspor, keterhubungan SI ekspor dan DSI dengan sistem ketertelusuran perlu dipastikan sehingga bukti dari kebun, pemasok, PKS, dan *refinery* dapat ditautkan hingga transaksi ekspor dan digunakan oleh operator Uni Eropa dalam pelaksanaan uji tuntas dan penyusunan DDS.

Titik paling rentan berada pada pemasok pihak ketiga dan pekebun rakyat. Data legalitas dan poligon kebun harus dapat ditautkan dengan aliran TBS, CPO, hingga volume produk yang akhirnya dikapalkan. Tanpa hubungan tersebut, data yang tersedia belum dapat menjadi bukti untuk transaksi tertentu. Dengan demikian, tantangannya bukan semata-mata kekurangan sistem, melainkan memastikan kejelasan pembagian fungsi dan interoperabilitas di

antara sistem yang telah tersedia maupun yang sedang dikembangkan.

8.1.4 Outlook Q4 2026–Q1 2027: Uji Pengapalan Produk

Prioritas Q4 2026 adalah melakukan pengujian pada transaksi pengapalan nyata yang mencakup perusahaan terintegrasi, *refinery* dengan pemasok pihak ketiga, serta rantai pasok yang melibatkan pekebun rakyat. Ukurannya sederhana: apakah suatu volume ekspor dapat ditelusuri kembali hingga seluruh kebun sumber, dan apakah rangkaian bukti tersebut dapat digunakan oleh operator Uni Eropa dalam pelaksanaan uji tuntas.

Q1 2027 menjadi titik evaluasi. Pemerintah perlu mengetahui berapa volume perdagangan yang telah dapat dibuktikan secara utuh, pada simpul mana data masih terputus, serta berapa waktu dan biaya yang diperlukan untuk menutup setiap kesenjangan. Hasil pengujian tersebut dapat menjadi dasar untuk memperbaiki sistem dan memperjelas jalur kepatuhan sebelum cakupan produk bertambah pada akhir 2027.

Kebutuhan pembuktian yang sama juga dapat muncul pada perdagangan melalui negara ketiga apabila produk sawit Indonesia kemudian masuk ke dalam rantai produk yang ditempatkan di pasar Uni Eropa. Dengan demikian, ukuran kesiapan Indonesia bukan hanya tersedianya data, tetapi kemampuan membuktikan keterhubungan suatu transaksi ekspor hingga kebun sumber. Karena itu, kebutuhan ke depan adalah membangun satu interoperable compliance pathway yang menghubungkan data kebun, rantai pasok, proses verifikasi, dan sistem ekspor, serta menghasilkan rangkaian bukti yang dapat digunakan oleh operator Uni Eropa dalam pelaksanaan due diligence dan penyusunan DDS.

8.2 Bursa Mineral dan Komoditas Strategis: Kesiapan Pasar Menentukan Kredibilitas Harga

8.2.1 BMKS Memasuki 2027 dengan Regulasi yang Sudah Tersedia

BMKS memasuki 2027 dengan dasar hukum dan pengawasan yang telah ditetapkan. OJK menerbitkan POJK Nomor 15 Tahun 2026 tentang peralihan tugas dan wewenang pengaturan serta pengawasan transaksi BMKS dari Bappebti kepada OJK. POJK Nomor 16 Tahun 2026 mengatur penyelenggaraan BMKS. POJK 15 berlaku sejak 17 September 2026 dan POJK 16 mulai berlaku pada 1 Januari 2027, bertepatan dengan target operasional BMKS (OJK, 2026).

Kerangka tersebut mencakup perdagangan, kliring, penjaminan, penyelesaian transaksi, tata kelola, manajemen risiko, perlindungan pengguna jasa, dan integritas pasar. UU Nomor 4 Tahun 2026 memberi mandat kepada OJK untuk mengatur dan mengawasi transaksi pada BMKS (UU No.4 Tahun 2026, 2026). Pekerjaan regulasi telah dimulai. Tahap berikutnya adalah memastikan pasar dapat bekerja.

Arah BMKS mencakup mineral dan komoditas strategis yang luas. Dalam pengumuman pembentukannya, Presiden menyebut kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, dan karet. Daftar tersebut menunjukkan posisi sawit dalam agenda perdagangan sumber daya alam Indonesia. Penetapan komoditas dan desain perdagangan per komoditas masih memerlukan kejelasan lebih lanjut (Kementerian Sekretariat Negara, 2026).

Dalam cakupan tersebut, sawit menjadi titik masuk untuk menilai kesiapan BMKS memasuki tahap operasional. Komoditas ini telah memiliki rantai perdagangan fisik, pelaku yang beragam, dan pengalaman bursa sebelumnya. Pertanyaan utamanya adalah apakah BMKS dapat menghimpun transaksi yang cukup rutin untuk membentuk harga referensi yang dipercaya. Pengujian pada Q4 2026 perlu mengukur partisipasi pelaku, penerimaan standar produk, serta

keandalan penyerahan dan penyelesaian transaksi. Hasilnya menjadi dasar bagi desain operasional 2027.

8.2.2 Pelajaran dari Bursa Fisik CPO Indonesia

Indonesia telah memiliki pengalaman menyelenggarakan pasar fisik CPO. ICDX ditunjuk sebagai penyelenggara Bursa CPO Indonesia pada Oktober 2023 dengan mandat membangun perdagangan fisik dan mendukung pembentukan harga acuan (ICDX, 2023). Pengalaman ini menunjukkan bahwa pembentukan bursa memerlukan waktu, partisipasi, dan alasan ekonomi yang cukup bagi pelaku usaha.

Produksi nasional yang besar belum otomatis menghasilkan kedalaman transaksi di bursa. Reuters mencatat perdagangan berjangka CPO Indonesia pada 2025 setara sekitar 151.705 ton. Bursa Malaysia Derivatives mencatat perdagangan CPO futures setara 490,43 juta ton pada tahun yang sama. Kedua angka tersebut berasal dari instrumen berjangka dan tidak menggambarkan pasar fisik secara langsung. Perbedaannya tetap memperlihatkan jarak antara pasar yang baru tumbuh dan pasar yang telah digunakan luas untuk harga serta lindung nilai (Reuters, 2026)

Likuiditas lahir dari konsentrasi transaksi. Produsen, *refinery*, pedagang, eksportir, importir, dan pengguna domestik perlu memiliki alasan untuk menempatkan order pada venue yang sama. Harga, kepastian pembayaran, mutu, lokasi serah, biaya, dan akses terhadap counterpart menentukan keputusan tersebut. Beberapa hal lain, seperti kebutuhan lindung nilai, aktivitas market maker, dan struktur penyedia likuiditas memengaruhi kualitas likuiditas di pasar komoditas (Jain et al., 2024).

Pengalaman ICDX juga memberi dasar yang dapat digunakan oleh BMKS. Infrastruktur perdagangan fisik, lembaga kliring, titik penyerahan, serta pelaku yang telah memahami proses perdagangan CPO perlu dipetakan dalam arsitektur baru. Hubungan BMKS dengan bursa, lembaga kliring, pialang, dan infrastruktur fisik perlu menjaga

konsentrasi order flow. Fragmentasi transaksi akan mengurangi kedalaman pasar dan memperlemah informasi harga.

8.2.3 Pasar Spot, Likuiditas, dan Desain Insentif Awal

Fase awal BMKS untuk sawit perlu diuji melalui satu kontrak spot CPO yang terstandar. Kontrak tersebut harus memiliki spesifikasi mutu, ukuran transaksi, titik serah, metode pemeriksaan, jadwal pembayaran, dan aturan penyelesaian yang jelas. Ukuran keberhasilannya sederhana: penjual dan pembeli bertemu secara kompetitif, transaksi terselesaikan, barang diserahkan sesuai kontrak, dan kedua pihak memiliki alasan ekonomi untuk kembali menggunakan bursa.

Q4 2026 perlu menguji seluruh siklus transaksi: pemasukan order, matching, konfirmasi, kliring, penjaminan, pemeriksaan mutu, pembayaran, penyerahan, dan pencatatan kepemilikan. Uji ini perlu memakai transaksi nyata atau dry run dengan konsekuensi komersial yang mendekati transaksi nyata. Hambatan pada mutu, titik serah, pembayaran, atau penyelesaian akan langsung terlihat dalam biaya dan minat pelaku untuk kembali bertransaksi.

Rencana kewajiban perdagangan melalui BMKS perlu dipisahkan dari tujuan pembentukan harga. Kewajiban dapat menaikkan volume tercatat, tetapi belum tentu menghasilkan harga yang mencerminkan penawaran dan permintaan. Tahap awal lebih tepat dimulai dengan kewajiban pelaporan untuk membangun data harga, volume, produk, dan pola perdagangan. Eksekusi melalui bursa perlu tumbuh melalui manfaat yang dirasakan pelaku: biaya yang kompetitif, kepastian kliring dan penjaminan, standar mutu yang dapat dipercaya, serta akses ke pembeli yang lebih luas. Insentif untuk standardisasi, pengujian mutu, kliring, atau transaksi dapat digunakan secara terbatas dan dievaluasi berdasarkan jumlah peserta yang tetap aktif setelah insentif berakhir.

Kewajiban eksekusi melalui BMKS baru layak dipertimbangkan setelah pasar menunjukkan transaksi berulang, penawaran dua arah, dan penyelesaian yang andal. Keputusan tersebut perlu didasarkan

pada jumlah pembeli dan penjual aktif, frekuensi transaksi, volume yang dieksekusi, bid-ask spread, biaya transaksi, tingkat keberhasilan penyelesaian, serta ketepatan penyerahan. Ukuran ini membedakan pertumbuhan pasar dari pertumbuhan administratif (Fernandez-Perez et al., 2023; Jain et al., 2024).

8.2.4 Outlook Q4 2026: DSI, BMKS, dan Uji Kesiapan Menuju 2027

DSI dan BMKS perlu dibangun sebagai dua lapisan yang terhubung dengan fungsi berbeda. Di BMKS, produsen, *refinery*, pedagang, eksportir, importir, dan pengguna domestik bertemu sebagai penjual dan pembeli. Bursa menjalankan perdagangan, kliring, penjaminan, dan penyelesaian secara netral. Harga memperoleh kredibilitas dari transaksi banyak penjual dan banyak pembeli, bukan dari satu pihak yang mengonsolidasikan perdagangan.

DSI berada pada lapisan data dan pengawasan. Setelah transaksi terbentuk, BMKS menyediakan data yang diperlukan sesuai kewenangan: identitas transaksi, produk, mutu, volume, harga, pihak bertransaksi, titik serah, waktu transaksi, dan status penyelesaian. DSI menghubungkan data tersebut dengan informasi ekspor dan pelaporan terkait untuk membangun visibilitas serta audit trail. Tata kelola konektivitas perlu menetapkan sumber data, hak akses, tata cara koreksi, dan pihak yang bertanggung jawab atas kualitas data.

Pembagian fungsi ini mencegah DSI berubah menjadi pembeli, penjual, pemilik barang, atau perantara tunggal. Posisi tersebut akan menambah tahapan kontrak, biaya, kebutuhan modal kerja, dan risiko komersial. BMKS tetap memerlukan order flow dari pelaku usaha agar harga terbentuk di pasar yang terbuka.

Hasil pengujian pada Q4 2026 menjadi dasar penetapan langkah BMKS pada 2027, termasuk perluasan produk dan peserta, perbaikan desain transaksi, serta penundaan kewajiban pada komponen yang belum siap. Harga BMKS mulai relevan sebagai pembanding ketika transaksi berlangsung rutin dan digunakan dalam kontrak komersial, valuasi, pengadaan, atau pengelolaan risiko. Pasar spot yang aktif membuka ruang bagi kontrak berjangka dan lindung nilai.

Pengalaman Malaysia menunjukkan hubungan harga spot dan futures dapat mendukung fungsi tersebut setelah pasar berkembang (Ab Rahman et al., 2012).

Ukuran fase awal BMKS dapat diringkas dalam tiga hal, yaitu pelaku yang aktif, transaksi yang rutin, dan harga yang digunakan pasar. Ketiga ukuran tersebut lebih relevan daripada jumlah sistem atau jumlah anggota terdaftar. Kesiapan pasar akan menentukan apakah BMKS berkembang sebagai pasar referensi yang dipercaya atau berhenti sebagai infrastruktur pencatatan transaksi.

8.3 HGU di Tengah Reforma Agraria: Risiko HGU dan Keberlanjutan Industri Sawit

Pengesahan UU Pengaturan Reforma Agraria pada 22 September 2026 membawa potensi risiko bagi pemegang HGU perkebunan. Risiko tersebut perlu dilihat bukan hanya sebagai persoalan legal perusahaan, tetapi juga dalam kaitannya dengan keberlanjutan industri sawit dan berbagai program pemerintah yang bergantung pada kinerja sektor ini. Apabila konflik, tumpang tindih, atau proses koreksi terhadap HGU sampai menghambat administrasi pertanahan, pembiayaan, maupun investasi, dampaknya dapat merambat ke kegiatan budidaya, peremajaan, pengembangan kapasitas, hingga kegiatan hilirisasi. Jika berlangsung pada skala yang cukup besar, gangguan tersebut pada akhirnya dapat menekan kemampuan industri untuk mempertahankan produksi CPO dan produk turunannya.

Risiko terhadap produksi menjadi semakin strategis karena industri sawit saat ini harus memenuhi kebutuhan domestik yang terus meningkat sekaligus mempertahankan ruang ekspor. *Outlook Q4* memproyeksikan produksi minyak sawit nasional 2026 sekitar **52,4 juta ton**, sementara konsumsi domestik meningkat menjadi sekitar 27,1 juta ton dan ekspor diproyeksikan sekitar 25,8 juta ton. Struktur tersebut menunjukkan bahwa ruang antara kebutuhan domestik dan ekspor semakin ketat, terlebih ketika kebutuhan CPO untuk biodiesel meningkat seiring implementasi B50. Dalam kondisi tersebut,

gangguan terhadap basis produksi akibat persoalan HGU dapat semakin mempersempit kemampuan industri memenuhi kebutuhan biodiesel, pangan, dan oleokimia sekaligus mempertahankan ruang ekspor.

Konsekuensinya dapat menjalar lebih jauh. Apabila tekanan terhadap produksi kemudian mengurangi ruang ekspor, basis penerimaan dari Pungutan Ekspor dan Bea Keluar juga berpotensi ikut tertekan, sehingga dampaknya dapat merambat ke berbagai aspek dalam rantai industri sawit. Kondisi ini penting untuk diperhatikan oleh pengambil kebijakan karena Pungutan Ekspor menjadi salah satu sumber pembiayaan berbagai program sawit, termasuk biodiesel dan Peremajaan Sawit Rakyat. Dengan demikian, persoalan HGU pada akhirnya tidak hanya menyangkut keberlangsungan perusahaan perkebunan, tetapi juga dapat memengaruhi ruang pembiayaan program pemerintah dan pekebun rakyat yang berada dalam rantai industri yang sama. Pada saat bersamaan, ekspor sawit merupakan salah satu penopang utama neraca perdagangan Indonesia. *Outlook* Q4 menunjukkan bahwa tanpa kontribusi ekspor sawit, neraca perdagangan nonmigas Semester I 2026 berpotensi berada dalam posisi defisit. Karena itu, **menjaga kepastian HGU dan keberlanjutan basis produksi sawit juga menjadi bagian dari upaya menjaga ruang ekspor, penerimaan negara, dan kontribusi industri terhadap perekonomian nasional.**



BAB 9. PENUTUP

Industri sawit Indonesia menutup tahun 2026 dengan struktur yang berbeda dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Perubahan tersebut terutama ditandai oleh semakin besarnya peran pasar domestik di tengah pertumbuhan produksi yang relatif terbatas. Produksi minyak sawit nasional diproyeksikan mencapai sekitar 52,4 juta ton, sementara konsumsi domestik meningkat menjadi sekitar 27,1 juta ton dan ekspor sekitar 25,8 juta ton. Dengan struktur tersebut, penggunaan domestik untuk pertama kalinya dalam periode pengamatan *Outlook* melampaui ekspor, dengan pangsa sekitar 51,3% dibandingkan 48,7%.

Perubahan tersebut menandai terbentuknya **keseimbangan baru** dalam industri sawit Indonesia. Pasar domestik tidak lagi sekadar menjadi salah satu tujuan penggunaan minyak sawit, tetapi semakin menentukan arah alokasi pasokan nasional. Implementasi B50 memperkuat posisi sawit dalam ketahanan energi, sementara kebutuhan pangan dan oleokimia tetap harus dipenuhi. Pada saat yang sama, ekspor tetap penting sebagai sumber devisa, penopang neraca perdagangan, serta bagian dari basis penerimaan yang mendukung berbagai program pengembangan industri sawit.

Tantangannya muncul karena pertumbuhan kebutuhan domestik berlangsung lebih cepat dibandingkan pertumbuhan produksi. Dalam kondisi tersebut, ekspor dan stok semakin berperan sebagai ruang penyesuaian. Neraca 2026 menunjukkan bahwa kebutuhan domestik dan ekspor masih dapat dipenuhi, tetapi ruang antara keduanya semakin ketat. Karena itu, mempertahankan keseimbangan ke depan tidak cukup hanya dengan mengatur bagaimana pasokan yang tersedia dibagi. ***Kapasitas pasokan dari produksi itu sendiri perlu ditingkatkan.***

Peningkatan kapasitas tersebut tidak dapat dilakukan secara instan. Produksi sawit sangat dipengaruhi oleh siklus biologis tanaman dan kondisi agroklimat. Dinamika iklim dapat memengaruhi kegiatan budidaya dan panen dalam jangka pendek, tetapi juga dapat

memberikan dampak tertunda terhadap pembentukan produksi pada periode berikutnya. Dengan demikian, kemampuan meningkatkan produksi tidak hanya ditentukan oleh luas areal, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan kebun, produktivitas tanaman, serta kemampuan mengelola risiko iklim.

Di sisi ekonomi, keseimbangan pasokan tersebut juga berinteraksi dengan harga dan instrumen perdagangan. Harga CPO global dan domestik memengaruhi Harga Referensi, Pungutan Ekspor, dan Bea Keluar, yang selanjutnya membentuk insentif antara pasar ekspor dan domestik. Dalam kondisi ketika kebutuhan domestik semakin besar, kebijakan perdagangan perlu ditempatkan sebagai bagian dari pengelolaan keseimbangan industri, bukan semata-mata sebagai instrumen penerimaan.

Implementasi B50 menunjukkan semakin eratnya keterkaitan tersebut. Sawit kini tidak hanya menghasilkan devisa melalui ekspor, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi melalui pengurangan kebutuhan impor bahan bakar. Dengan demikian, kontribusi sawit terhadap perekonomian berkembang melalui dua jalur sekaligus: **menghasilkan devisa dari perdagangan dan mengurangi kebutuhan devisa melalui substitusi impor energi**. Peran ganda ini memperkuat posisi strategis sawit, tetapi juga meningkatkan kebutuhan untuk memastikan bahwa kapasitas produksi mampu menopang pertumbuhan penggunaan domestik tanpa terus-menerus mempersempit ruang ekspor.

Karena itu, agenda peningkatan produktivitas menjadi semakin penting. Ketika ekspansi areal semakin terbatas, tambahan produksi perlu semakin banyak diperoleh dari areal yang telah tersedia. Dalam konteks ini, Peremajaan Sawit Rakyat menjadi salah satu bagian penting dari strategi penguatan pasokan. Tanaman hasil PSR yang telah memasuki fase menghasilkan mulai memberikan kontribusi terhadap produksi, sementara tanaman yang lebih muda akan menambah kapasitas produksi pada tahun-tahun berikutnya. Dengan demikian, percepatan PSR dan peningkatan produktivitas perkebunan rakyat bukan hanya agenda peningkatan kesejahteraan

pekebun, tetapi juga bagian dari strategi menjaga kecukupan pasokan nasional.

Namun, peningkatan produksi saja belum cukup untuk menjamin ruang tumbuh industri. Kemampuan industri mempertahankan pertumbuhan juga ditentukan oleh **akses pasar, kualitas tata kelola perdagangan, dan kepastian basis produksi**. Implementasi EUDR menempatkan ketertelusuran hingga kebun sumber sebagai bagian dari persyaratan akses pasar. Pengembangan BMKS menempatkan transparansi transaksi dan kredibilitas pembentukan harga sebagai bagian dari penguatan infrastruktur perdagangan. Sementara itu, dinamika HGU dan reforma agraria menunjukkan pentingnya kepastian usaha dalam menjaga investasi dan keberlanjutan basis produksi.

Ketiga aspek tersebut memperlihatkan bahwa ruang tumbuh industri sawit tidak hanya berada di kebun. Ruang tumbuh juga berada pada kemampuan produk Indonesia mempertahankan pasar, kemampuan mekanisme perdagangan membentuk nilai secara kredibel, serta kemampuan kebijakan memberikan kepastian bagi keberlanjutan produksi.

Dengan demikian, **“menjaga ruang tumbuh di tengah keseimbangan baru”** tidak berarti mempertahankan struktur industri sebagaimana adanya. Sebaliknya, keseimbangan baru menuntut perubahan sumber pertumbuhan. Tambahan kapasitas semakin perlu berasal dari produktivitas, peremajaan, efisiensi, dan penguatan perkebunan rakyat; sementara keberlanjutannya perlu ditopang oleh akses pasar, tata kelola perdagangan yang kredibel, serta kepastian usaha.

Memasuki 2027, tantangan industri sawit Indonesia karena itu bukan memilih antara kebutuhan domestik dan ekspor. Keduanya tetap diperlukan dan memberikan nilai melalui jalur yang berbeda. Tantangan yang lebih mendasar adalah *menciptakan tambahan kapasitas produksi agar peningkatan kebutuhan domestik dapat*

terus berjalan tanpa mengorbankan ruang ekspor, kecukupan stok, dan daya saing industri.

Pada akhirnya, perubahan struktur industri sepanjang 2026 membawa satu pesan utama: ***keseimbangan baru membutuhkan ruang tumbuh baru.***

Ruang tersebut tidak semata-mata berasal dari penambahan areal, tetapi dari kemampuan meningkatkan produktivitas, memperkuat kapasitas produksi, mengelola risiko, mempertahankan akses pasar, dan membangun kepastian usaha. Kemampuan untuk melakukan hal-hal tersebut secara bersamaan akan menentukan seberapa kuat industri sawit Indonesia memasuki fase pertumbuhan berikutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Ab Rahman, N. M. N., Nawi, A. S., & Nazima, Y. H. N. M. (2012). The Price Discovery of the Malaysian Crude Palm Oil Futures Markets,. *Journal of Applied Finance & Banking*, 2(3), 1–3. https://ideas.repec.org/a/spt/apfiba/v2y2012i4f2_4_3.html
- Bank Indonesia. (2026). *Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia*. <https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/seki/Pages/SEKI-AGUSTUS-2026.aspx>
- BMKG. (2026a). *Buletin Informasi Iklim Perkebunan Komoditas Sawit Agustus 2026*. 167–186. <https://www.bmkg.go.id/iklim/buletin-iklim/buletin-informasi-iklim-perkebunan-komoditas-sawit-bulan-agustus-2026>
- BMKG. (2026b). *Buletin Informasi Iklim Perkebunan Komoditas Sawit September 2026*. <https://www.bmkg.go.id/iklim/buletin-iklim/buletin-informasi-iklim-perkebunan-komoditas-sawit-bulan-setember-2026>
- BMKG. (2026c). *Analisis Dinamika Atmosfer Dasarian I September 2026 - Dinamika Atmosfer - BMKG*. <https://www.bmkg.go.id/iklim/dinamika-atmosfer/analisis-dinamika-atmosfer-dasarian-i-september-2026>
- BMKG. (2026d). *Prakiraan Cuaca Indonesia Sepekan Periode 15–21 September 2026: Atmosfer Kering Mendominasi, Karhutla dan Asap Meluas, Tetap Waspada Hujan Lokal dan Angin Kencang di Sebagian Wilayah Indonesia - Potensi Hujan Sepekan ke Depan - BMKG*. <https://www.bmkg.go.id/cuaca/potensi-hujan-sepekan/prakiraan-cuaca-indonesia-sepekan-periode-15-21-september-2026-atmosfer-kering-mendominasi-karhutla-dan-asap-meluas-tetap-waspada-hujan-lokal-dan-angin-kencang-di-sebagian-wilayah-indonesia>
- BMKG. (2026e). *Prediksi Curah Hujan Kumulatif Bulanan Deterministik - November 2026 - Iklim - BMKG*. <https://www.bmkg.go.id/iklim/prediksi-hujan-bulanan/curah->

hujan-deterministik/3

- BMKG. (2026f). *Prediksi Curah Hujan Kumulatif Bulanan Deterministik - Oktober 2026 - Iklim - BMKG*.
<https://www.bmkg.go.id/iklim/prediksi-hujan-bulanan/curah-hujan-deterministik/2>
- BPD. (2024). *BPDPS Kolaborasi Dengan Berbagai Pihak Demi Capai Target Percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)*. 2024.
- BPD. (2026a). *Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Jasa Konsultansi Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi Program Sarana dan Prasarana Perkebunan Berbasis Single Sign On (SSO)*. https://www.bpd.or.id/uploads/2026/06/26/2_V3_KAK_Pengembangan_Aplikasi_Sarpras_Kakao_Kelapa.pdf
- BPD. (2026b). *Dorong PSR, Samade dan BPD Bekali Gen Z Riau Jadi Admin Pengusul Program Strategis Sawit*.
<https://www.bpd.or.id/dorong-psr-samade-dan-bpd-bekali-gen-z-riau-jadi-admin-pengusul-program-strategis-sawit>
- BPS. (2025a). *Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia Maret 2025*. BPS.
<https://www.bps.go.id/id/publication/2025/10/10/755ea866289ba29e5104e58d/pengeluaran-untuk-konsumsi-penduduk-indonesia-maret-2025.html>
- BPS. (2025b). *Statistik Tanaman Perkebunan Tahunan Indonesia 2025* (Vol. 1).
<https://www.bps.go.id/id/publication/2025/08/29/8d2a6ab3510f9828daf73191/statistik-tanaman-perkebunan-tahunan-indonesia-2024--kelapa-sawit--kopi--kakao--karet--teh--dan-komoditas-perkebunan-unggulan-.html>
- BPS. (2026a). *Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia Juni 2026*.
<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/08/03/2597/ekspor-dan-impor-indonesia-juni-2026-masing-masing-tercatat-usd-25-46-miliar-dan-usd-25-91-miliar.html>

- BPS. (2026b). *Data Ekspor Impor Nasional*.
<https://www.bps.go.id/id/exim>
- Ditjenbun. (2023). *Ditjenbun Bersinergi dengan Multistakeholders Kelapa Sawit untuk Capai Target PSR 100.000 Ha*.
<https://ditjenbun.pertanian.go.id/ditjenbun-bersinergi-dengan-multistakeholders-kelapa-sawit-untuk-capai-target-psr-100-000-ha/>
- Ditjenbun. (2024). *Dorong Penyediaan Benih Legal dan Bersertifikat, Kementan Dampingi Petani PSR*.
<https://Ditjenbun.Pertanian.Go.Id/Dorong-Penyediaan-Benih-Legal-Dan-Bersertifikat-Kementan-Dampingi-Petani-Psr>.
- Ditjenbun. (2025). *Buku Statistik Perkebunan 2024-2026 Jilid I*.
<https://ditjenbun.pertanian.go.id/?publikasi=buku-statistik-perkebunan-2024-2026-jilid-i>
- European Commission. (n.d.). *Regulation on Deforestation-free Products. EU rules to guarantee that the products EU citizens consume do not contribute to deforestation or forest degradation worldwide*. EU.
https://environment.ec.europa.eu/topics/forests/deforestation/regulation-deforestation-free-products_en
- European Commission. (2023). *Regulation (EU) 2023/1115 (Regulation (EU) 2023/1115 of the European Parliament and of the Council of 31 May 2023 on the making available on the Union market and the export from the Union of certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation and r)*.
<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1115/oj/eng>
- Fernandez-Perez, A., Miffre, J., Schoen, T., & Scott, A. (2023). Do spot market auction data help price discovery? *Journal of Commodity Markets*, 31, 100335.
<https://doi.org/10.1016/j.jcomm.2023.100335>
- GAPKI. (2026). *Posisi Harga Komoditas pada Penutupan Bursa & Pasar Fisik*.
<https://gapki.id/news/category/posisi-harga->

komoditas/

- ICDX. (2023). *ICDX Resmi Ditunjuk Menjadi Penyelenggara Bursa CPO Indonesia*. <https://www.icdx.co.id/news-detail/corporate-news/icdx-resmi-ditunjuk-menjadi-penyelenggara-bursa-cpo-indonesia>
- IPOSS. (2025). *Outlook Industri Sawit Indonesia 2026 —Transformasi Industri Sawit: Menjaga Denyut Ekonomi, Menjawab Tantangan Keberlanjutan*. <https://iposs.co.id/id/outlook/iposs-rilis-outlook-industri-sawit-indonesia-2026-transformasi-industri-sawit-menjaga-denyut-ekonomi-menjawab-tantangan-keberlanjutan>
- IPOSS. (2026a). *Model Neraca Bahan Baku Minyak Sawit*. Dokumen tidak dipublikasikan. <https://data.iposs.co.id/dashboard?dataset=neraca-minyak-sawit>
- IPOSS. (2026b). *Palm Oil Database*. IPOSS. <https://data.iposs.co.id/>
- IPOSS. (2026c). *Posisi Harga CPO Terkini*. <https://data.iposs.co.id/dashboard?dataset=harga-cpo>
- Jain, P. K., Kayhan, A., & Onur, E. (2024). Determinants of commodity market liquidity. *Financial Review*, 59(1), 9–30. <https://doi.org/10.1111/fire.12366>
- Kementerian ESDM. (2025). *Laporan Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2025*. <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-laporan-kinerja-kementerian-esdm-tahun-2025.pdf>
- Kementerian ESDM. (2026). *Realisasi Program Mandatori Biodiesel*. Materi Paparan pada Workshop Jurnalis Program Biodiesel Sawit 2026 yang diselenggarakan oleh Majalah Sawit Indonesia pada tanggal 5 Februari 2026 di Depok, Jawa Barat.
- Kementerian Pertanian. (2026). *Tanggapan permohonan data Peremajaan Sawit Rakyat untuk penyusunan Outlook Palm Oil Q4 2026 (Surat Nomor B-1453/TI.030/E.4/09/2026, 28 September 2026)*.

Kementerian Sekretariat Negara. (2026). *Presiden Prabowo Siapkan Bursa Mineral Strategis, Perkuat Posisi Indonesia di Pasar Global*.

https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_prabowo_siapkan_bursa_mineral_strategis_perkuat_posisi_indonesia_di_pasar_global

Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 1777 Tahun 2026 (tentang Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum). (2026). <https://jdih.kemendag.go.id/peraturan/keputusan-menteri-perdagangan-republik-indonesia-nomor-1777-tahun-2026-tentang-harga-patokan-ekspor-dan-harga-referensi-atas-produk-pertanian-dan-kehutanan-yang-dikenakan-bea-keluar-dan-tarif-layanan-badan-layanan-umu>

Mardiana Wahyuni, & Barus, F. A. (2021). Peningkatan Pola Pikir Petani Untuk Mengikuti Program Peremajaan Sawit Rakyat Di Desa Laut Tador - Batu Bara- Provinsi Sumatera Utara. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 724–732. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i3.5545>

Mistry, D. E. (2025). *Price Outlook 2026 – Time for Indonesia to lift the Moratorium*. Materi paparan pada 21st Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) di Bali pada 14 November 2025.

OJK. (2026). *Siaran Pers: OJK Terbitkan Dua POJK Mengenai Bursa Mineral dan Komoditas Strategis*. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Terbitkan-Dua-POJK-Mengenai-Bursa-Mineral-dan-Komoditas-Strategis.aspx>

PASPI. (2026). Ekonomi Sawit Dalam Perekonomian Indonesia. *Journal Analysis of Palm Oil Strategic Issues*, 1, 46. <https://doi.org/10.5281/zenodo.21929343>

Peraturan Menteri Keuangan No. 68 Tahun 2025 (tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar).

(2025). <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-68-tahun-2025>

Peraturan Menteri Keuangan No. 9 Tahun 2026 (tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan pada Kementerian Keuangan). (2026). <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-9-tahun-2026>

Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2021 (tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000). (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/164964/perpres-no-23-tahun-2021>

Permenko Perekonomian No. 14 Tahun 2025 (tentang Sistem Informasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia). (2025). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/332445/permenko-perekonomian-no-14-tahun-2025>

Pitaloka, C. P., Jumiaty, A., & Wibisono, S. (2020). Analisis Keterkaitan dan Multiplier Efek Sektor Industri Pengolahan Terhadap Perekonomian Nasional. *Jurnal Ekonomi Ekuilibrium (JEK)*, 4, 20.

Reuters. (2026). *Indonesia's global commodities price-setting ambition risks backfiring*. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesias-global-commodities-price-setting-ambition-risks-backfiring-2026-09-03/>

USDA. (2024). *Biofuels Annual Thailand*. https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Biofuels+Annual_Bangkok_Thailand_TH2024-0032.pdf

UU No.4 Tahun 2026 (tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan). (2026). <https://lps.go.id/undang-undang-republik-indonesia-nomor-4-tahun-2026-tentang-perubahan-atas-undang-undang-nomor-4-tahun-2023-tentang-pengembangan-dan-penguatan-sektor-keuangan>

Wandri, R., Monzon, J. P., Carciochi, W. D., Hairiah, K., Suprayogo, D., van Noordwijk, M., Asmono, D., & Grassini, P. (2025). Can improved plant nutrition buffer against water-related yield losses in oil palm? *Agricultural Water Management*, 322, 109980. <https://doi.org/10.1016/j.agwat.2025.109980>





www.iposs.co.id